



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024



MARET, 2025

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpinang, 10 Maret 2025

Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,



ST. Irmendas, S.E., Ak., CA., QGIA., CGCAE.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19650726 199403 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpah karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan laporan atas capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga RPJMD 2021-2026. Laporan kinerja ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan.

Laporan kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya mengumpulkan berbagai data kinerja untuk disajikan dalam laporan kinerja ini agar dapat menguraikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, saya berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tanjungpinang, 17 Maret 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik.....	viii
Daftar Gambar	xi
Ikhtisar Eksekutif	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2
1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis	3
1.3.2 Gambaran Umum Demografi.....	5
1.4 Isu Strategis.....	6
1.5 Tugas dan Struktur Organisasi	12
1.6 Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi	12
1.7 Kondisi Pegawai	13
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	17
2.1.1 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	17
2.1.2 Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	17
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	18
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian	28
Pertumbuhan Ekonomi	29
PDRB Per Kapita	39
Indeks Gini	44
Tingkat Pengangguran Terbuka	49



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi.....	59
Indeks Reformasi Birokrasi.....	67
Indeks Pembangunan Manusia	88
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK.....	97
Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	103
Angka Kemiskinan	108
Prevalensi Stunting	113
Rasio Konektivitas.....	121
Indeks Pembangunan Kebudayaan.....	129
Rasio Elektrifikasi	139
Persentase Jalan Kondisi Mantap	143
BAB IV PENUTUP.....	151
4.1 Kesimpulan	152
4.2 Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang.....	153
Lampiran :	
I Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	154
II Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	155

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	4
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau (Ribuan Jiwa) Tahun 2024	6
Tabel 1.5 Jumlah PNS dan PPPK Provinsi Kepulauan Riau.....	14
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	25
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	28
Tabel 3.2 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q)(y-on-y)(c-to-c) Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (%)	32
Tabel 3.3 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q)(y-on-y)(c-to-c) Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (%).....	34
Tabel 3.4 Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera TW IV-2024 Tahun Dasar 2010	34
Tabel 3.5 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau.....	38
Tabel 3.6 Program Dan Realisasi Anggaran yang mendukung PDRB Per Kapita Kepulauan Riau	43
Tabel 3.7 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Indeks Gini Kepulauan Riau	48
Tabel 3.8 Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal 2019-2024	51
Tabel 3.9 TPT Menurut Kab/Kota Provinsi Kepri Tahun 2022-2024	52
Tabel 3.10 TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2024	53
Tabel 3.11 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2023 dan 2024 (%)	54
Tabel 3.12 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2023-2024	55
Tabel 3.13 Pelatihan Industri Melalui Pemagangan Tahun 2024	56
Tabel 3.14 Program-program yang Mendukung Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....	58



Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran	66
Tabel 3.16	Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	69
Tabel 3.17	Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektor.....	71
Tabel 3.18	Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	78
Tabel 3.19	Perbandingan Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester II Tahun 2024	79
Tabel 3.20	Target Capaian Nilai dan Presentase Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026.....	79
Tabel 3.21	Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024).....	79
Tabel 3.22	Sektor Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)	80
Tabel 3.23	Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024).....	80
Tabel 3.24	Capaian Nilai Realisasi Investasi per Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)	80
Tabel 3.25	Target dan Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025	80
Tabel 3.26	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024	81
Tabel 3.27	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2024 (%).....	82
Tabel 3.28	Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	83
Tabel 3.29	Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024.....	83
Tabel 3.30	Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang & Jasa PDN Periode 01 JAN s.d. DES 2024	85
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau	86
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau	87
Tabel 3.33	Capaian Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	89
Tabel 3.34	Perkembangan Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	90

Tabel 3.35	Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran	96
Tabel 3.36	APS Provinsi Wilayah Provinsi 2024	99
Tabel 3.37	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2024	100
Tabel 3.38	Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran	102
Tabel 3.39	Realisasi IPG Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2023	104
Tabel 3.40	Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kep Riau	104
Tabel 3.41	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau	105
Tabel 3.42	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Kepulauan Riau	105
Tabel 3.43	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Indonesia Tahun 2023	105
Tabel 3.44	Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Sumatera Tahun 2023	105
Tabel 3.45	Program/Kegiatan yang Menunjang Peningkatan IPG di Provinsi Kepulauan Riau....	107
Tabel 3.46	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester II Tahun 2024.....	109
Tabel 3.47	Program yang Menunjang Keberhasilan Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran.....	112
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024.....	114
Tabel 3.49	Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	114
Tabel 3.50	Program yang Menunjang Indikator Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran.....	120
Tabel 3.51	Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	122
Tabel 3.52	Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	122
Tabel 3.53	Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	123
Tabel 3.54	Realisasi Trayek / Lintas Angkutan Tahun 2024	124
Tabel 3.55	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Rasio Konektivitas	127
Tabel 3.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2023.....	130

Tabel 3.57	Perbandingan Nilai Dimensi Tahun 2024.....	131
Tabel 3.58	Tabel Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran IPK.....	138
Tabel 3.59	Perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024.....	140
Tabel 3.60	Tabel Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Rasio Elektrifikasi	142
Tabel 3.61	Persentase Capaian Kinerja Jalan kondisi mantap	144
Tabel 3.62	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	144
Tabel 3.63	Perbandingan Anggaran Program Pendukung Kinerja Beserta Realisasi dan Efisiensi Anggarannya	146
Tabel 3.64	Tabel Kegiatan dan Realisasi Anggaran Presentase Jalan Kondisi Mantap	147
Tabel 3.65	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	149

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	5
Grafik 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau	8
Grafik 1.3 Perbandingan PNS dan PPPK Provinsi Kepulauan Riau	14
Grafik 1.4 Perbandingan Pendidikan PNS dan PPPK Provinsi Kepulauan Riau	14
Grafik 3.1 Tren Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	30
Grafik 3.2 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (y-on-y)(%)	30
Grafik 3.3 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2024 (y-on-y)(%).....	31
Grafik 3.4 Pertumbuhan PDRB Triwulanan Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (q-to-q)(%)	31
Grafik 3.5 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2024 (q-to-q)(%).....	32
Grafik 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif TW IV Menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c)(%)	32
Grafik 3.7 Pertumbuhan dan Andil Ekonomi Kumulatif TW IV Menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c)(%)	32
Grafik 3.8 Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (y-on-y)(%).....	33
Grafik 3.9 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (q-to-q)(%)	33
Grafik 3.10 Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (%).....	33
Grafik 3.11 Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%)	34
Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Indikator PDRB Per Kapita Tahun 2022-2024	41
Grafik 3.13 Perkembangan Gini Ratio Kepulauan Riau S.D. September 2024	45
Grafik 3.14 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kepulauan Riau per September 2024	45



Grafik 3.15	Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2024	50
Grafik 3.16	TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024	51
Grafik 3.17	Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2024.....	60
Grafik 3.18	Tren Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	61
Grafik 3.19	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Prov. Kepri 2020 -2024.....	68
Grafik 3.20	Tren Capaian Indeks Pelayanan Publik Prov Kepri Tahun 2020-2024	72
Grafik 3.21	Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Prov Kepri Tahun 2020-2024.....	72
Grafik 3.22	Tren Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau	74
Grafik 3.23	Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024	89
Grafik 3.24	Perkembangan UHH IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024.....	90
Grafik 3.25	Perkembangan HLS & RLS IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	90
Grafik 3.26	Pengeluaran Rill per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024	91
Grafik 3.27	Realisasi Kinerja APS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2024	98
Grafik 3.28	Realisasi Kinerja APS Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2024.....	99
Grafik 3.29	Realisasi IPG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	104
Grafik 3.30	Tren Perkembangan Angka Kemiskinan	109
Grafik 3.31	Data Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 s.d. 2024	110
Grafik 3.32	Persentase Pemantauan Intervensi Gizi Kabupaten/Kota Tahun 2024	117
Grafik 3.33	Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten-Kota Tahun 2024.....	118
Grafik 3.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	118
Grafik 3.35	Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	124
Grafik 3.36	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (%).....	131
Grafik 3.37	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	132
Grafik 3.38	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total Pencatatan.....	132
Grafik 3.39	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	133

Grafik 3.40	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir.....	133
Grafik 3.41	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	133
Grafik 3.42	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir.....	134
Grafik 3.43	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan Organisasi.....	134
Grafik 3.44	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	134
Grafik 3.45	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara Adat	134
Grafik 3.46	Perbandingan Nilai Dimensi IPK Provinsi Kepri dan Nasional	136
Grafik 3.47	Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau.....	3
Gambar 1.2 Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.....	4
Gambar 3.1 Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia per September 2024.....	46
Gambar 3.2 Lokasi Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau.....	55
Gambar 3.3 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2024....	62
Gambar 3.4 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	63
Gambar 3.5 Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2024.....	63
Gambar 3.6 Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	64
Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Manajemen Talenta	70
Gambar 3.8 Daftar Provinsi Pelatihan Berpestasi Tahun 2024	71
Gambar 3.9 Data Penggunaan Naskah Dinas Elektronik	71
Gambar 3.10 Piagam Penghargaan Ombudsman	72
Gambar 3.11 Penandatanganan Komitmen BerAkhlak	73
Gambar 3.12 Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	74
Gambar 3.13 Penyerahan Penghargaan Predikat WTP	75
Gambar 3.14 Hierarki IPPN Pemerintah Provinsi.....	77
Gambar 3.15 IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	91
Gambar 3.16 Indikator IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	91
Gambar 3.17 Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2024.....	92
Gambar 3.18 Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan	128
Gambar 3.19 Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Kategori Emas.....	136
Gambar 3.20 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01).....	147
Gambar 3.21 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	148
Gambar 3.22 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan.....	148
Gambar 3.23 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan.....	148
Gambar 3.24 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga	148
Gambar 3.25 Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebu Lanjutan, Kab. Karimun (DAK – Tematik 03).....	148



Gambar 3.26 Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri).....	148
Gambar 3.27 Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan).....	148
Gambar 3.28 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna	148

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tkenis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja berdasarkan Visi dan Misi Gubernur.

Adapun Hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 bertujuan sebagai *feedback* bagi kepala daerah dan juga dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) pelaksanaan dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menghasilkan capaian yang memuaskan dalam hal mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 memberikan informasi terkait evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 yang tergambar dari pencapaian dengan 13 sasaran dan 15 indikator sasaran sebagaimana sudah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian 13 sasaran dan 15 Indikator tersebut pada tahun 2024 diperoleh rata-rata capaian sebesar 103% termasuk berhasil dengan kategori “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 11 Indikator tercapai dengan Kategori “Sangat Baik” dengan capaian kinerja (>100%)
- b. 4 Indikator tercapai dengan Kategori “Baik” dengan Capaian (75% s.d 100%)

Berdasarkan evaluasi terdapat beberapa indikator sasaran telah mencapai target tahun terakhir RPJMD, diantaranya :

- PDRB Perkapita (ADHK 108% dan ADHB 111%)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (107%)
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (106%)
- Indeks Reformasi Birokrasi (114%)
- Indeks Pembangunan Manusia (103%)
- Angka Kemiskinan (114%)
- Indeks Pembangunan Kebudayaan (103%)
- Rasio Elektrifikasi (101%)

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak eksternal pemerintahan dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dikaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

I.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

I.3 Gambaran Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002, Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi secara de facto penyelenggaraan pemerintahannya baru dimulai tanggal 1 Juli 2004. Kemudian dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024, dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2021-2024 merupakan periode pertama Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2024.



Secara Administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Kota Tanjungpinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, serta memiliki 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan terdiri dari 80 Kecamatan, 275 Desa dan 144 Kelurahan. Letak astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota	Ibu Kota Kab/Kota	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	Jumlah Kec	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	BINTAN	BANDAR SRI BENTAN	1.317.149	10	15	36
2	KARIMUN	TANJUNG BALAI	930.453	14	29	42
3	NATUNA	RANAI	1.999.155	17	7	70
4	LINGGA	DAIK	2.210.819	13	9	75
5	KEPULAUAN ANAMBAS	TAREMPA	627.027	10	2	52
6	KOTA BATAM	BATAM	1.034.732	12	64	-
7	KOTA TANJUNGPINANG	TANJUNGPINANG	150.373	4	18	-
PROVINSI KEPULAUAN RIAU			8.269.708	80	144	275

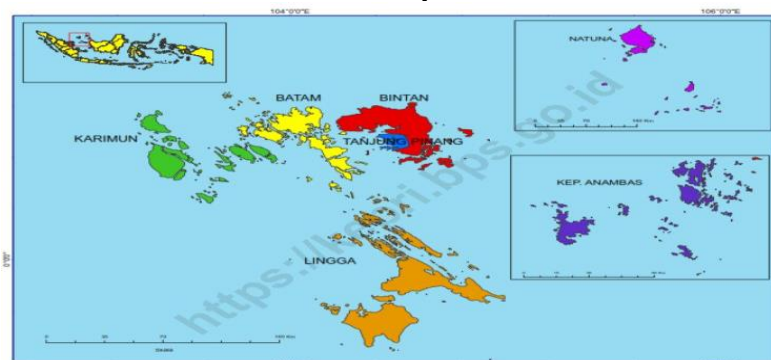
Sumber : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang daerahnya sebagian besar adalah daerah kepulauan. Sebagai daerah kepulauan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas 425.282,68 km², dengan luas lautan 417.012,97 km² (98,05 %) dan luas daratannya sebesar 8.269,71 km² (1,95 %). Luas daratan sekitar 0,43 % dari luas Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' dan 109°40' Bujur Timur.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Letak dan kondisi geografis ini memiliki keuntungan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau, hal ini karena Provinsi Kepulauan Riau berada di jalur emas perdagangan di bagian barat Indonesia yang dapat menjadi potensi untuk mendatangkan pendapatan bagi daerah maupun devisa bagi Negara Indonesia. Berikut ini peta Provinsi Kepulauan Riau :

Gambar 1.1
Peta Provinsi Kepulauan Riau

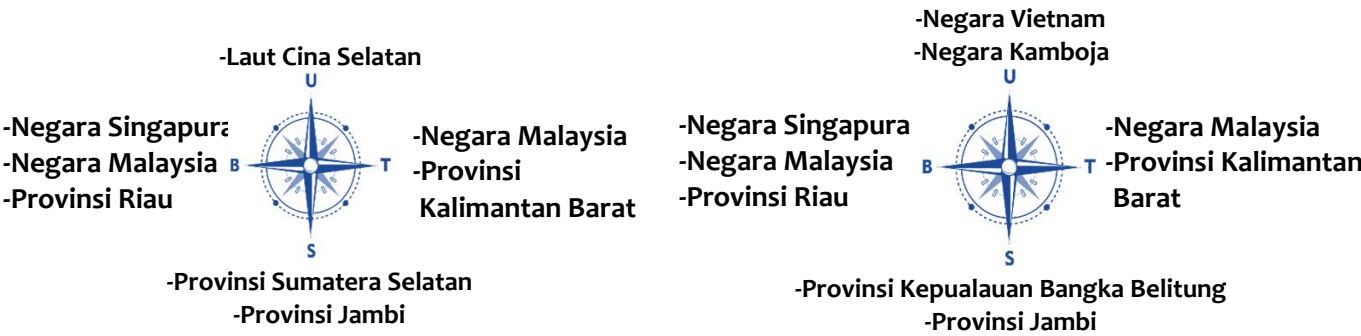


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota serta dikelilingi oleh lautan dan memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga, hal ini yang membuat Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat diplomatik wilayah, sehingga wilayah Indonesia pada umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau khususnya menjadi satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan. Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau laut merupakan potensi, jumlah lautnya yang luas, pantainya yang indah serta hasil lautnya yang melimpah sehingga membuat Provinsi Kepulauan Riau menjadi sasaran Negara luar/tetangga untuk berinvestasi, terutama dibidang perhotelan/resort. Luasnya wilayah laut lebih besar dibandingkan daratan, sehingga Provinsi Kepulauan Riau harus mengembangkan maritim menjadi salah satu potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ). Selain itu juga memiliki ribuan pulau dengan keindahan alami yang menawan dan eksotis, serta Kekayaan sumber daya alam (perikanan, kelautan, energi, mineral) yang melimpah. Tentunya hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaannya. Berikut ini Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

Gambar 1.2
Batas Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.028 pulau, Kota Tanjungpinang memiliki jumlah pulau paling sedikit, yaitu 8 pulau, sedangkan Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan jumlah pulau terbanyak, dengan 630 pulau yang. Kota Batam memiliki jumlah pulau yang berpenghuni terbanyak, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki jumlah pulau yang berpenghuni paling sedikit. Jumlah masing-masing pulau yang dimiliki Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pulau Menurut Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Persentase terhadap Luas Provinsi	Jumlah Pulau
1	KARIMUN	11,25	248
2	BINTAN	15,93	263
3	NATUNA	24,17	172
4	LINGGA	26,73	628
5	KEPULAUAN ANAMBAS	7,58	239
6	BATAM	12,51	453
7	TANJUNGPINANG	1,82	8
KEPULAUAN RIAU		100,00	2.028

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024



1.3.2 Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan data base kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 2.220.043 jiwa (Semester I Tahun 2024). Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam sebesar 1.294.548 jiwa, sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu du Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 50.703 jiwa. Hal ini memperlihatkan masih kurang meratanya persebaran penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut ini adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

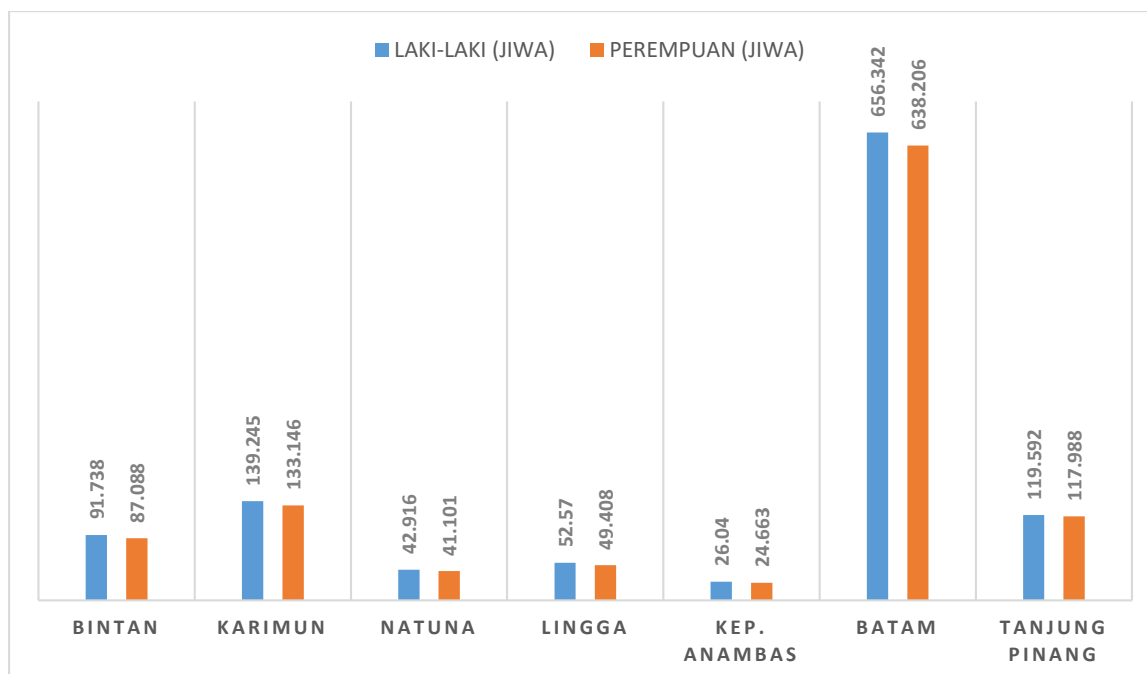
Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	KARIMUN	251.510	260.438	262.075	267.762	272.391
2	BINTAN	157.459	165.920	169.447	173.171	178.826
3	NATUNA	82.192	82.537	82.824	83.450	84.017
4	LINGGA	101.429	101.863	102.150	102.474	101.978
5	KEPULAUAN ANAMBAS	47.022	47.803	48.084	49.274	50.703
6	BATAM	1.121.875	1.169.648	1.207.082	1.240.792	1.294.548
7	TANJUNGPINANG	222.110	227.069	229.553	233.406	237.580
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1.983.597	2.055.278	2.101.215	2.150.329	2.220.043

Sumber : Dinas PMDDUKAPIL Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 1.1

Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Data Kependudukan Bersih Ditjen DUKAPIL Kemendagri 2024

Perbandingan jumlah penduduk antara Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh Laki-laki dengan perbandingan 51 % Laki-laki dan 49 % Perempuan berdasarkan jumlah total penduduk.

Dengan perbandingan yaitu Kabupaten Bintan 51% Laki-laki dan 49% Perempuan, Kabupaten Karimun 51% Laki-laki dan 49% Perempuan, Kabupaten Natuna 51% Laki-laki dan 49% Perempuan, Kabupaten Lingga 52% Laki-laki dan 48% Perempuan, Kabupaten Kep. Anambas 51% Laki-laki dan 49% Perempuan, Kota Batam 51% Laki-laki dan 49% Perempuan, Kota Tanjungpinang 50% Laki-laki dan 50% Perempuan.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin didominasi oleh kelompok pada rentang umur 0-44 tahun dengan jumlah diatas 170,00 jiwa, dengan kelompok paling banyak pada rentang umur 0-4 tahun yaitu 191,92 jiwa, dan kelompok paling sedikit pada rentang umur >75 tahun yaitu 22,80 jiwa. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau (Ribuan Jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	98,08	93,83	191,92
5-9	97,73	92,94	190,68
10-14	93,51	88,54	182,05
15-19	87,49	82,87	170,36
20-24	89,80	87,24	177,04
25-29	90,32	89,90	180,22
30-34	90,83	91,12	181,94
35-39	90,43	91,08	181,51
40-44	85,46	84,59	170,05
45-49	78,47	75,95	154,42
50-54	64,32	60,43	124,75
55-59	48,74	44,07	92,81
60-64	34,53	31,27	65,79
65-69	21,45	19,69	41,14
70-74	12,93	12,24	25,16
75 +	11,02	11,78	22,80
Kepulauan Riau	1.095,09	1.057,54	2.152,63

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024

Pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau tergolong cukup tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Badan Pusat Statistik wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2024 sebesar 2.220.043 jiwa, terutama kontribusi pertumbuhan penduduk dari Kota Batam menyumbang sebesar 1.294.548 jiwa. Dilihat dari data yang disajikan di atas penduduk Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh kelompok umur pada usia produktif dan usia siap kerja dan juga dapat dikatakan bahwa Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan bonus demografi pada angka kelahiran, hal tersebut dapat dilihat dominasi jumlah jiwa pada kelompok umur 0-4 tahun.

I.4 Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat delapan isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :



1) Pembangunan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkualitas dan ramah lingkungan

Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan, potensi maritimnya memiliki dampak besar pada pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya alam maritim dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki beragam potensi sumber daya maritim, termasuk perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut, dan energi laut. Selain itu, provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang dan berbagai lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alam yang eksotis.

Kemudian Potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumber daya laut-dalam, pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, dan potensi mangrove serta terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan adalah komoditas unggulan, seperti rumput laut (*seaweed*), ikan, dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan.

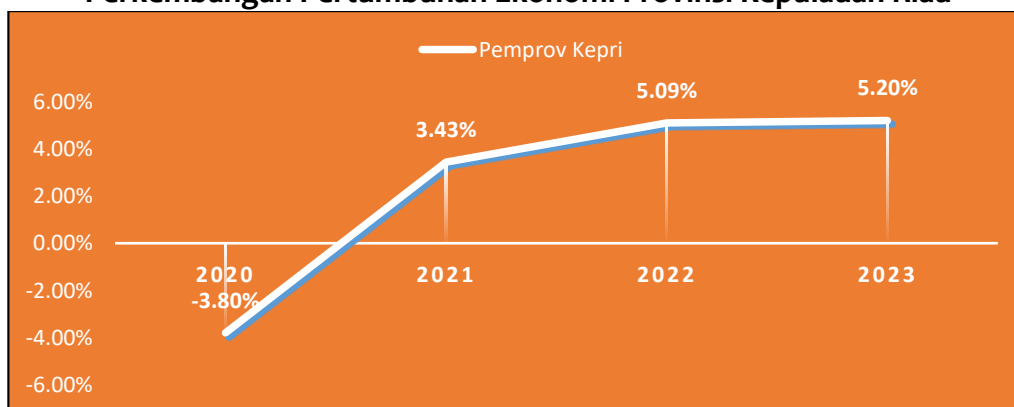
Keuntungan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau adalah potensi kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan komitmen dalam memanfaatkan potensi ini. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam, pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari, serta potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan adalah komoditas unggulan, termasuk rumput laut (*seaweed*), ikan, dan biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Dengan kekayaan alam yang melimpah, Kepulauan Riau perlu menerapkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) untuk menjaga kelestarian rantai ekosistem alam. Hal ini penting untuk meminimalisir ancaman degradasi lingkungan hidup. Selain itu, pembangunan harus memiliki dampak positif tidak hanya pada perekonomian saat ini, tetapi juga harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

2) Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai penggerak perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Upaya ini menjadi hal yang penting agar kunjungan wisatawan yang tinggi dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal dapat tumbuh serta mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal. Pembangunan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yang mana ekonomi kerakyatan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat Kepulauan Riau akan memiliki produktivitas yang tinggi, yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan ekonomi kerakyatan adalah aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil dan UMKM.

Grafik 1.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau 2024

Keaktifan koperasi dan UMKM ini perlu berkolaborasi secara sinergis untuk menjadi bagian integral dalam optimalisasi sektor kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, konstruksi, perdagangan, dan sektor lainnya. Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang sinergis antara Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Identifikasi dan kompetensi Birokrasi secara profesional dan proposional

Reformasi birokrasi merupakan usaha untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan dapat mengatur ulang struktur birokrasi sehingga menciptakan kualitas kinerja yang efektif, efisien, dan optimal. Reformasi birokrasi menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terkait dengan penyelenggaraan dan pemenuhan fasilitasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.



Road Map Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu factor yang perlu diperhatikan dalam Reformasi Birokrasi adalah kualitas Sumber Daya Aparatur. Dalam penyelenggaraan birokrasi yang efektif dan professional diperlukan “*the right man in the right place*”, dapat dikatakan posisi menentukan prestasi. Dengan ini berarti perlu adanya identifikasi terhadap kompetensi ASN dan peningkatan kapasitas ASN untuk memaksimalkan kinerja birokrasi. Sehingga kapasitas sumber daya aparatur yang mumpuni dan penempatannya sesuai bidang kompetensi, maka akan menciptakan ekosistem kinerja pemerintah daerah yang terpadu, harmonis, dan akuntabel.



4) Penataan Kawasan Kumuh Pesisir dan Pengentasan Kemiskinan

Memahami dengan kondisi geografis Kepulauan Riau adalah berupa kepulauan yang cenderung memiliki wilayah kelautan dan pesisir pantai. Pada kondisi saat ini terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, dengan kondisi permukiman di Kawasan pesisir belum layak yang menyebabkan adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan kelompok rumah tidak layak huni dengan keterbatasan/minimnya layanan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan kondisi tempat tinggal di pesisir, yang mana masyarakat tinggal di daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, sehingga masyarakat sangat terbatas untuk membangun rumah dengan standar rumah sehat seperti di darat. Hal ini berdampak pada penyediaan prasarana penunjang kawasan permukiman yang tidak optimal seperti penyediaan air bersih, akses

sanitasi dan persampahan. Kurang optimalnya penyediaan prasarana permukiman ini menimbulkan titik-titik kawasan kumuh di wilayah pesisir, yang berimbas pada rendahnya kualitas hidup masyarakat Kepulauan Riau, sehingga berpotensi menjadikan kehidupan masyarakat tidak sejahtera (miskin).

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin per bulan September pada tahun 2018 adalah sebesar 125,36 ribu, meningkat pada tahun 2019 sebesar 127,76 ribu, pada tahun 2020 sebesar 142,61 ribu, tahun 2021 menurun hingga 137,75 ribu, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali hingga 148,89 ribu. Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

5) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Pelayanan kesehatan yang Berkualitas

Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat dicerminkan dari capaian nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Secara umum, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2018-2022), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai IPM adalah sebesar 74,84 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 76,46. Dengan kondisi saat ini walaupun perkembangan IPM menunjukkan agregat yang positif namun masih perlu ditingkatkan kualitas daya saingnya. Peningkatan kualitas Pendidikan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang mumpuni diharapkan akan mampu memberikan fasilitas dalam menunjang kegiatan belajar di sekolah dengan lebih optimal. Terlebih, saat ini perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga sarana dan prasarana pembelajaran harus adaptif dalam penggunaan IT. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan serta pemetaan sarana prasarana pendidikan diharapkan mendukung kegiatan belajar dan mengajar dengan maksimal.

Selain pendidikan, kesehatan juga salah satu faktor penting dalam pembangunan SDM. Kemudahan masyarakat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang merata akan memberikan dampak yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Memahami hal tersebut, perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mumpuni, sehingga masyarakat mendapat kemudahan akses dalam pelayanan Pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pemerataan kualitas sumber daya manusia Kepulauan Riau dapat ditingkatkan secara optimal.

6) Peningkatan dan Optimalisasi SDM yang Berdaya Saing dan Profesional

Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam pembangunan manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pada hakikatnya kedua unsur ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam meningkatkan kualitas daya saing dan produktivitas masyarakat. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset yang krusial dalam pembangunan dan memiliki dampak signifikan pada kemajuan serta pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu perhatian yang serius dari Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau terhadap pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dalam kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk membentuk generasi SDM yang unggul dan profesional sehingga diharapkan mampu mendukung kemajuan dalam pembangunan daerah.

7) Peningkatan dan Pengembangan Budaya Melayu dalam Implementasi Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

Kebudayaan merupakan segala hal yang terkait dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) yang mampu membentuk peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan dalam warisan budaya, baik yang bersifat nyata (aset budaya yang dapat dilihat) maupun abstrak (aset budaya yang tidak terlihat). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah dan adat istiadat Melayu yang unik dan memukau. Keberagaman budaya Melayu di Kepulauan Riau adalah harta berharga dan identitas bangsa yang sangat penting untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah perubahan dunia yang dinamis. Ekspresi Budaya Melayu mencakup semua aktivitas yang mendukung proses pembuatan karya budaya Melayu yang dihasilkan oleh masyarakat. Ini dapat dilihat dari partisipasi penduduk dalam pertunjukan seni Melayu sebagai pelaku atau pendukung. Selanjutnya, Budaya Literasi merupakan aktivitas dan infrastruktur pendukung dalam memperoleh, menguji keabsahan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan melestarikan dan menjaga budaya Melayu, diharapkan dapat mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya yang relevan, yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai dengan konteks ketahanan sosial budaya di Provinsi Kepulauan Riau.

8) Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan untuk Meminimalisir Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah

Disparitas atau ketimpangan/kesenjangan wilayah merupakan salah satu fokus pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara berbagai wilayah. Sasaran utama dalam tujuan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dalam hal ini adalah peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penurunan koefisien Gini, dan penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 hingga bulan September tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu sebesar 0,325. Apabila melihat tren Indeks Gini untuk setiap Kabupaten/Kota, Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi pada tahun 2022, mencapai 0,347, sementara yang terendah terdapat di Kabupaten Lingga dengan nilai 0,277.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis di Provinsi Kepulauan Riau menjadi sebuah tantangan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

I.5 Tugas dan Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dengan mensejahterakan masyarakat melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dengan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia dan ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan tugas tersebut ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

I.6 Susunan Organisasi Pemerintah Provinsi

Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1 Sekretariat

1.1 Sekretariat Daerah

- 1.1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 1.1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 1.1.3 Asisten Administrasi Umum

1.2 Staf Ahli

- 1.2.1 Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 1.2.2 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 1.2.3 Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.3 Biro

- 1.3.1 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 1.3.2 Biro Hukum
- 1.3.3 Biro Kesejahteraan Rakyat
- 1.3.4 Biro Perekonomian dan Pembangunan
- 1.3.5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- 1.3.6 Biro Organisasi
- 1.3.7 Biro Umum
- 1.3.8 Biro Administrasi Pimpinan

1.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2 Inspektorat Daerah

3 Dinas Daerah

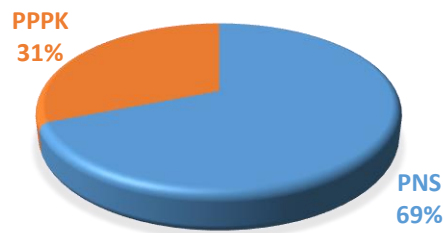
- 3.1 Dinas Pendidikan
- 3.2 Dinas Kesehatan
- 3.3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
- 3.4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 3.5 Dinas Sosial
- 3.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3.8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3.9 Dinas Perhubungan
- 3.10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3.11 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 3.13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 3.14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 3.15 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- 3.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.17 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 3.18 Dinas Pariwisata
- 3.19 Dinas Kebudayaan
- 3.20 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
- 3.21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3.22 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
- 4 Badan Daerah**
 - 4.1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 - 4.2 Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4.3 Badan Pendapatan Daerah
 - 4.4 Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
 - 4.5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 4.6 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
 - 4.7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 4.9 Badan Penghubung Daerah

I.7 Kondisi Pegawai

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, Aparatur Sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 6.956 orang. Dengan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.799 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2.157 orang. Adapun kondisi ASN Provinsi Kepulauan Riau per 6 Januari 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 1.3
Perbandingan PNS dan PPPK Provinsi Kepulauan Riau



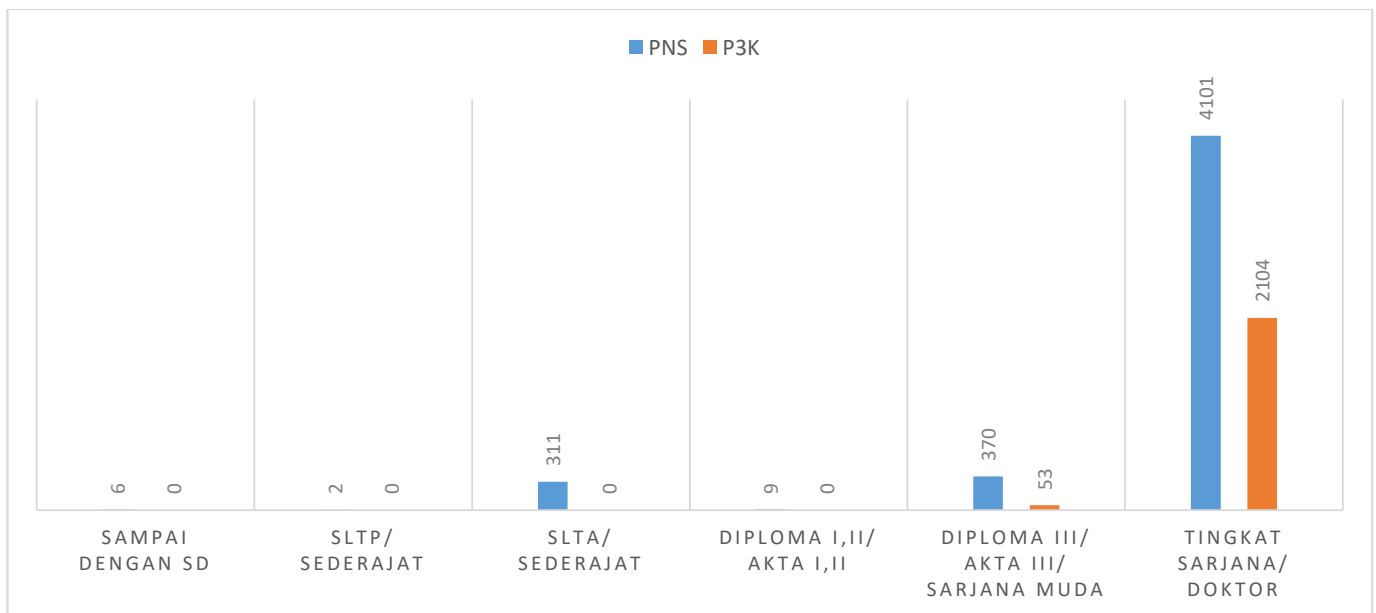
Sumber : BKD & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 1.5
Jumlah PNS dan PPPK Provinsi Kepulauan Riau

PNS				PPPK			
Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.343	1940	3.283	Guru	803	1.245	2.048
Fungsional Umum	543	479	1.022	Kesehatan	19	65	84
Eselon V	-	-	-	Teknis	12	13	25
Eselon IV	157	84	241				
Eselon III	148	59	207				
Eselon II	39	6	45				
Eselon I	1	-	1				
Jumlah	2.231	2.568	4.799	Jumlah	834	1.323	2.157

Sumber : BKD & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 1.4
Perbandingan Pendidikan PNS dan P3K Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : BKD & KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

I.8 Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini mengungkapkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi, profil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sekilas pengantar lainnya.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini dijelaskan pencapaian sasaran-sasaran organisasi serta pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Lampiran :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA



II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Perencanaan Strategis Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode 2021 – 2026. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan.

II.1.1 Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

**TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR,
BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA**

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ❖ Kepulauan Riau yang makmur : mengandung arti bahwa kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera
- ❖ Kepulauan Riau berdaya saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional
- ❖ Kepulauan Riau berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

II.1.2 Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Misi merupakan penjabaran dari visi, untuk mengarahkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Misi juga menggambarkan tugas-tugas yang diemban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian misi dan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

9) Misi Pertama

“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”

10) Misi Kedua

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”

11) Misi Ketiga

“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan taqwa”

12) Misi Keempat

“Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”

13) Misi Kelima

“Mempercepat konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan”

II.1.3 Tujuan & Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah.

Dalam menetapkan tujuan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*), menggambarkan hasil yang ingin dicapai, mengakomodasi isu strategis yang dihadapi, mencerminkan core area dimana organisasi berperan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

1) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai “MISI PERTAMA”

Tujuan : Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3289	3330
Sasaran / Indikator Sasaran :				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Optimalisasi Kualitas Perekonomian Sektor Perikanan			
	- Nilai Tukar Nelayan/NTN	%	0	116,30
2	Peningkatan pembangunan sektor pariwisata			
	- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2170	5486,71
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup			
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,47	70,38
4	Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari			
	- Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27	27,50

Tujuan : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan				
No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	PDRB perkapita ADHK	Juta Rupiah	78,96	88,27
2	PDRB perkapita ADHB	Juta Rupiah	0	145,00
3	Indeks Gini	%	0,332	0,318
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,8 – 5,6	5,2 – 6,3

Sasaran / Indikator Sasaran :				
No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, industri, Pengolahan, dan Sektor Perdagangan			
	- Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	52,493	67909,7
	- Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	38,5	41,45
	- Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,52	8,62
	- Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	5,6	6,60
	- Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	2,4	8,00
	- Persentase Koperasi yang berkualitas	%	51,04	50,55
	- Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	29,87	31,23
	- Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Miliar Rupiah	22500	21000
2	Pertumbuhan PAD			
	- Persentase Pertumbuhan PAD	%	-1,22	2,65
3	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)			
	- Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2173	4.010,84
	- Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,75	63,29

2) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai “MISI KEDUA”

Tujuan : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,17	72,17

Sasaran / Indikator Sasaran :				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Transparan dan Akurat			
	- Indeks SPBE	Indeks	2,8	2,80
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			
	- Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB	BB
	- Indeks Manajemen Risiko	Indeks	0	3
	- Level Maturitas SPIP	Level	0	3
	- Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	A-
	- Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
3	Optimalisasi Manajemen ASN yang Profesional dan Proporsional			
	- Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (283)	325
4	Peningkatan Kapabilitas Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana			
	- Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,25	0,54
5	Optimalisasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	- Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	1,09	88,82

3) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai “MISI KETIGA”

Tujuan : Penguatan Jaring Pengaman Sosial				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Angka Kemiskinan	%	6,07	5,57

Sasaran / Indikator Sasaran :				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran			



	- Pengeluaran Perkapita	Rupiah	0	2.161.791,29
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,22	6,91
2	Meningkatnya Masyarakat Desa yang Tangguh, Partisipatif dan Mandiri dalam Pengelolaan Potensi Desa			
	- Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6697 (Desa Membangun)	00,7661 (Desa Maju)

Tujuan : Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,26	77,74

Sasaran / Indikator Sasaran :

No	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	70,13	71,23
	- Prevalensi Stunting	%	16,3	12,8
2	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan			
	- Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,9	13,19
	- Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,13	10,88
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,72	100
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak			
	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,60
	- Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	74,3	68,1
4	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda			
	- IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	0,315	60,05



	-SDI (Sport Development Index)	Indeks	12,5	0,426
--	--------------------------------	--------	------	-------

4) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai “MISI KEEMPAT”

Tujuan : Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	61,9	57,60

Sasaran / Indikator Sasaran :				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Peningkatan Implementasi Pelestarian Budaya Melayu			
	- Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,09	28,27
	- Nilai Warisan Budaya	Nilai	48,24	52,04
	- Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,46	1,81
	- Nilai Budaya Literasi	Nilai	72,13	64,93
2	Peningkatan Harmonisasi masyarakat dan pembinaan kerukunan Umat Beragama			
	- Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	73	87,00
	- Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2,79	2,97

5) Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai “MISI KELIMA”

Tujuan : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Rasio Konektivitas	Rasio	38,42	0,65

Sasaran / Indikator Sasaran :				
NO	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar			



	- Rasio Elektrifikasi	Rasio	94,50	96,80
	- Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93,76	92,12
	- Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	87,06	99,20
	- Cakupan Pelayanan Drainase	%	45,1	60,30
	- Persentase Penanganan Sampah	%	0	70,00
	- Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	170,54	259,68
2	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir			
	- Persentase jalan kondisi mantap	%	0	81,26
	- Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18	0,3
	- Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	Rasio	0	0,35
	- Persentase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan Dalam Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	%	0	65

II.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Tujuan penetapan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan *reward* and *punishment*.

Sebagaimana RPJMD yang mengalami perubahan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024 sebagai tolok ukur evaluasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2024. Dengan 13 Sasaran dan 15 Indikator, dapat dilihat rincian Perjanjian Kinerja Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,9 %
		PDRB Per Kapita a. PDRB Per Kapita ADHK b. PDRB PerKapita ADHB	87,76 Juta Rupiah 143,34 Juta Rupiah
		Indeks Gini	0,323 Indeks
2	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18 Indeks
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,97 Indeks
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,04 Indeks
6	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100%
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55 Indeks
8	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	5,69 %
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,00 %
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	0,55 Rasio
11	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,60 Indeks
12	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	98,10 Rasio
13	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Presentase Jalan Kondisi Mantap	80,94 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercermin dari 13 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan



Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai.

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan *e-performance* adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi atas capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah setiap triwulan secara transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengukuran kinerja mencakup seluruh

kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang ditargetkan untuk dicapai.



Apabila semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Sedangkan semakin tinggi realisasi indikator menunjukkan penacapaian kinerja yang semakin rendah diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*).Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	> 100 %	Sangat Baik
3	75 % s.d. 100 %	Baik
2	55 % s.d. 75 %	Cukup
1	< 55 %	Kurang

Berikut sasaran dan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dilakukan evaluasi kinerjanya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,9 %	5,02 %	100,4 %
		PDRB Per Kapita			
		A. PDRB Per Kapita ADHK	87,76 Juta Rupiah	96,16 Juta Rupiah	109 %
		B. PDRB Per Kapita ADHB	143,34 Juta RUpiah	161,42 Juta Rupiah	112 %
		Indeks Gini	0,323 Indeks	0,357 Indeks	89 %
2	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54 %	6,39 %	115,25 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18 Indeks	75,05 Indeks	106 %
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,97 Indeks	82,47 Indeks	116 %
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,04 Indeks	79,89 Indeks	104 %
6	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	85,56 %	85,56 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55 Indeks	93,96 Indeks	100,49 %
8	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	5,69 %	4,78%	115,99%
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,00 %	16,8 %	80 %
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	0,55 Rasio	0,59 Rasio	107%
11	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,60 Indeks	59,80 Indeks	108 %
12	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastuktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	98,10 Rasio	98,19 Rasio	100,09%
13	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94 %	80,87 %	99,91 %

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan target kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas pencapaian sasaran pada bagian ini dilakukan dengan melihat realisasi pelaksanaan program untuk setiap bidang kewenangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gaps*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Analisis dalam laporan ini dilakukan per indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan yang ditetapkan pada bulan Januari tahun 2024. Dengan ini disampaikan analisa capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

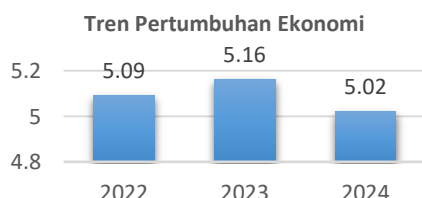
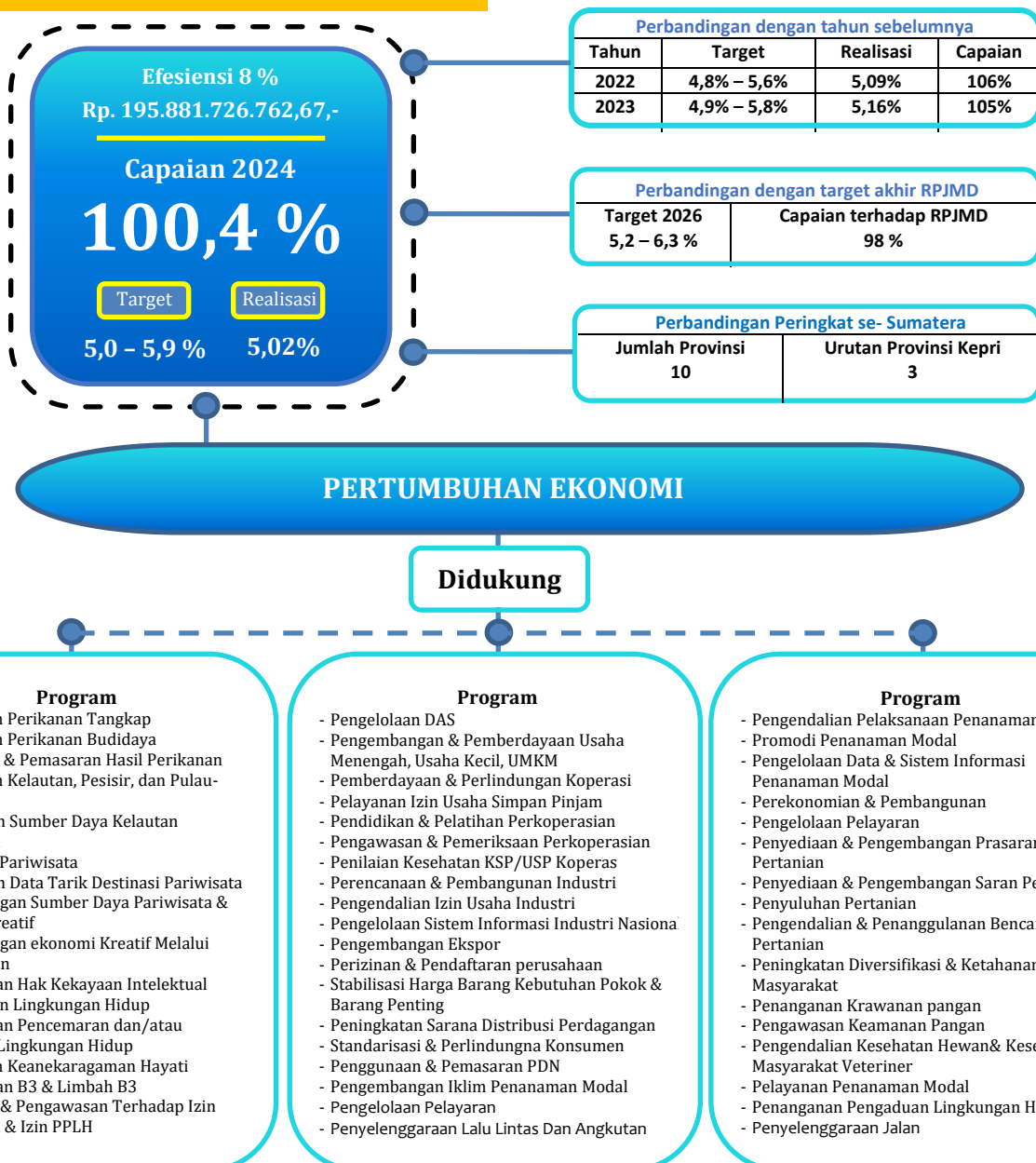
SASARAN :

Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan Indikator : Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **5,02 %** dari target sebesar **5,0 – 5,9 %** sehingga capaian kinerja mencapai **104 %**.



Formulasi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi diperoleh dari hasil penghitungan PDRB atas harga konstan tahun ke-n (nominal) dikali 100 dibagi dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-n-1 (nominal) kemudian dikurangi 100 maka akan mendapatkan persentase laju pertumbuhan ekonomi



Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier.

Tema RKP Tahun 2024 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

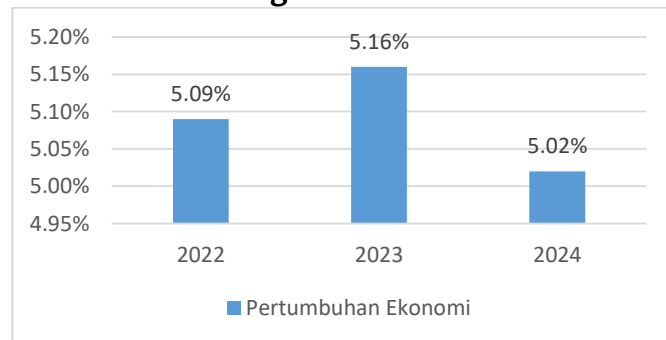
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan maksimal. Realisasi

indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **5,02 %** dengan target indikator yang telah ditetapkan sebesar **5,0 – 5,9 %** sehingga capaian kinerja sebesar **100,4 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Grafik 3.1

Tren Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi



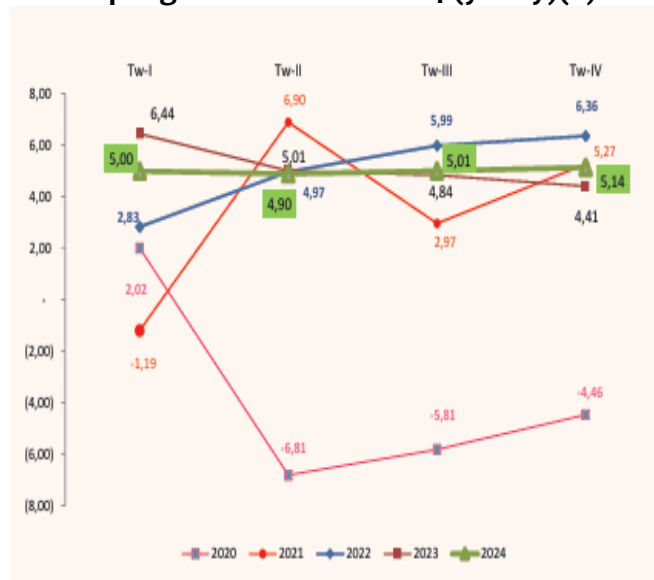
Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) dan atas harga konstan (ADHK).

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Grafik 3.2

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (y-on-y)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

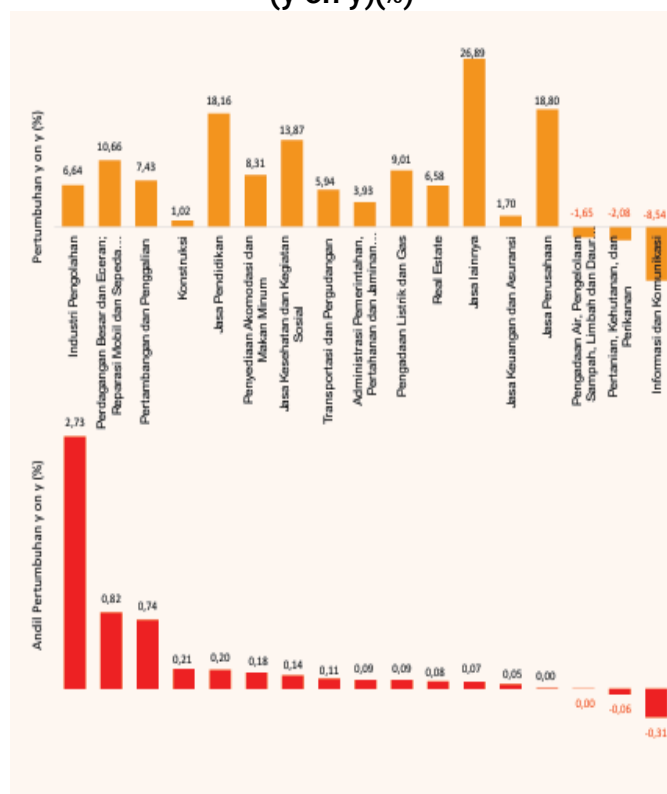
Perekonomian Kepulauan Riau triwulan IV-2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 5,14 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan IV-

2023 (y-on-y) yang tumbuh sebesar 4,41 persen. Pertumbuhan tertinggi year on year pada triwulan IV-2024 dicapai oleh Jasa Lainnya sebesar 26,89 persen; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 18,80 persen; dan kategori Jasa Pendidikan sebesar 18,16 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,73 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen; dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,74 persen.

Grafik 3.3

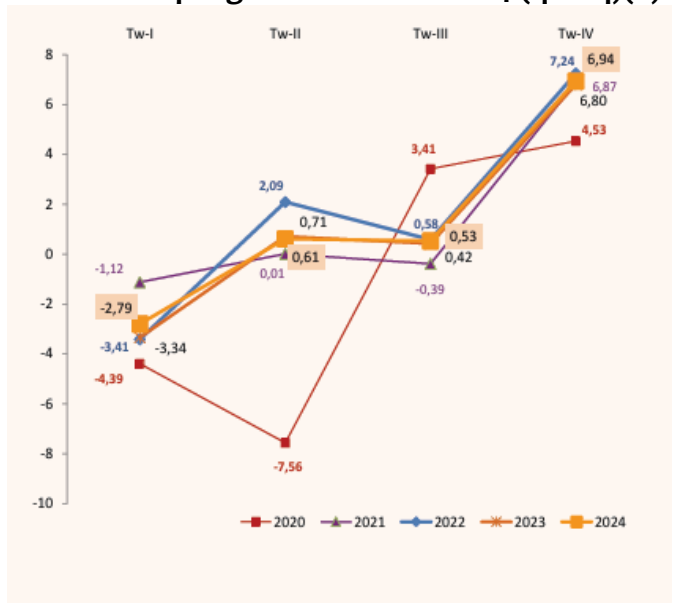
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2024 (y-on-y)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Grafik 3.4

Pertumbuhan PDRB Triwulanan Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (q-to-q)(%)



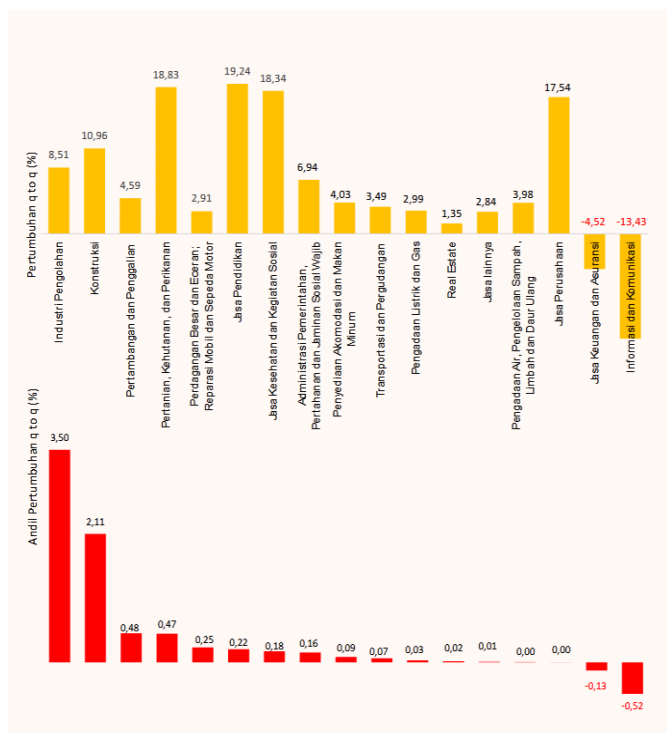
Sumber : BPS Provinsi Kepri

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 6,94 persen bila dibandingkan dengan triwulan III-2024 (q-to-q). Kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah kategori Jasa Pendidikan sebesar 19,24 persen; disusul kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,83 persen; diikuti kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,34 persen.

Andil pertumbuhan terbesar disumbangkan oleh kategori Industri Pengolahan dengan andil pertumbuhan sebesar 3,50 persen; diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 2,11 persen; dan Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 0,48 persen.

Struktur Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2024 masih didominasi oleh Industri Pengolahan (41,07%); Konstruksi (20,82%); dan Pertambangan dan Penggalian (9,87%).

Grafik 3.5
Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Lapangan Usaha 2024 (q-to-q)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Grafik 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif TW IV Menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c)(%)



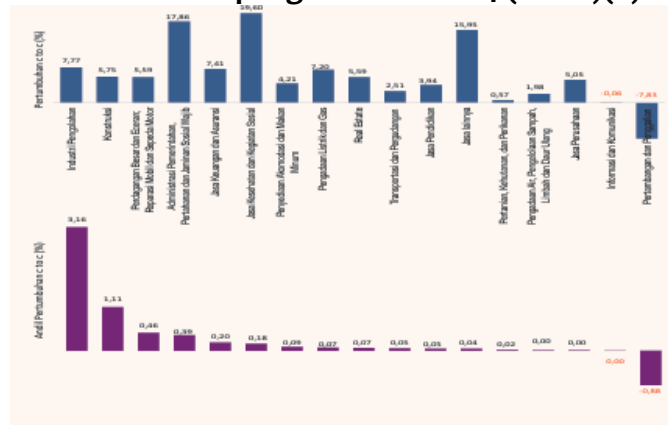
Sumber : BPS Provinsi Kepri

Perekonomian Kepulauan Riau kumulatif triwulan IV-2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,02 persen, tumbuh lebih lambat dibanding pertumbuhan kumulatif triwulan IV-2023 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 5,16 persen. Pertumbuhan tertinggi c-to-c pada triwulan IV-2024 dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,60 persen; diikuti kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,86 persen; dan kategori Jasa Lainnya sebesar 15,95 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau triwulan IV- 2024 secara c-to-c, Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 3,36 persen.

Jika dibandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 sebesar 5,03 persen dengan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 sebesar 5,02 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau lebih rendah dari pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 0,01 persen.

Grafik 3.7
Pertumbuhan dan Andil Ekonomi Kumulatif TW IV Menurut Lapangan Usaha 2024 (c-to-c)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Tabel 3.2
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q)(y-on-y)(c-to-c) Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (%)

Lapangan Usaha	Triw IV-2024 Terhadap Triw III-2024 (q-to-q)**	Triw IV-2024 Terhadap Triw IV-2023 (y-on-y)**	Kumulatif Triw IV-2024 Terhadap Kumulatif Triw IV-2023 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,83	-2,08	0,57	0,47	-0,06	0,02
B. Pertambangan dan Pengalihan	4,59	7,43	-7,83	0,48	0,74	-0,88
C. Industri Pengolahan	8,51	6,64	7,77	3,50	2,73	3,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	9,01	7,20	0,03	0,09	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,98	-1,65	1,98	0,00	0,00	0,00
F. Konstruksi	10,96	1,02	5,75	2,11	0,21	1,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	10,66	5,59	0,25	0,82	0,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,49	5,94	2,51	0,07	0,11	0,05
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,03	8,31	4,21	0,09	0,18	0,09
J. Informasi dan Komunikasi	-13,43	-8,54	-0,06	-0,52	-0,31	0,00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-4,52	1,70	7,41	-0,13	0,05	0,20
L. Real Estat	1,35	6,58	5,59	0,02	0,08	0,07
M.N. Jasa Perusahaan	17,54	18,80	5,05	0,00	0,00	0,00
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,94	3,93	17,86	0,16	0,09	0,39
P. Jasa Pendidikan	19,24	18,16	3,94	0,22	0,20	0,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,34	13,87	19,60	0,18	0,14	0,18
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,84	26,89	15,95	0,01	0,07	0,04
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,94	5,14	5,02	6,94	5,14	5,02

Sumber : BPS Provinsi Kepri



Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

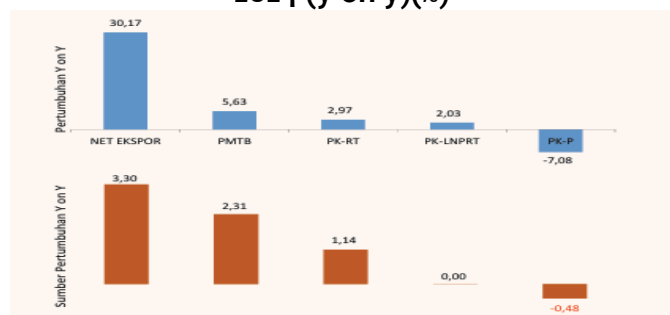
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024 tumbuh pada hampir semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu komponen Net Ekspor sebesar 30,17 persen;

diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,63 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,97 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,03 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 7,08 persen.

Bila ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV-2024 (y-on-y), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah komponen Net Ekspor dengan andil sebesar 3,30 persen; diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 2,31 persen.

Grafik 3.8

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (y-on-y)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi di triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 6,94 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-P sebesar 59,72 persen dengan andil 2,39 persen;

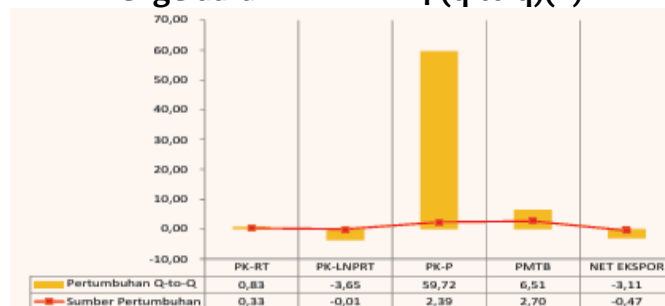
diikuti oleh komponen PMTB yang tumbuh sebesar 6,51 persen dengan andil sebesar 2,70

persen; komponen PK-RT tumbuh sebesar 0,83 persen dengan andil sebesar 0,33 persen. Komponen yang mengalami kontraksi yaitu komponen PK-LNPRT yang mengalami kontraksi sebesar 3,65 persen dengan andil kontraksi -0,01 persen dan komponen Net Ekspor yang mengalami kontraksi sebesar 3,11 persen dengan andil kontraksi -0,47 persen.

Secara umum, struktur ekonomi di triwulan IV 2024 tidak jauh berbeda dibandingkan triwulan lain di tahun sebelumnya. Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh komponen PMTB sebesar 44,42 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,23 persen; diikuti oleh Komponen Net Ekspor sebesar 7,06 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 6,59 persen; dan komponen Perubahan Inventori sebesar 1,45 persen. Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT kurang dari 1 persen.

Grafik 3.9

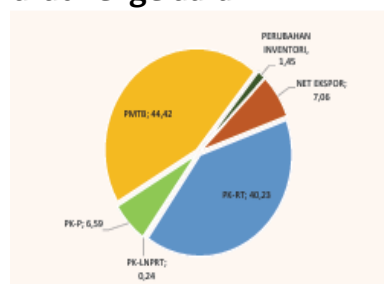
Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (q-to-q)(%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Grafik 3.10

Distribusi Komponen PDRB Kepulauan Riau Menurut Pengeluaran TW IV 2024 (%)

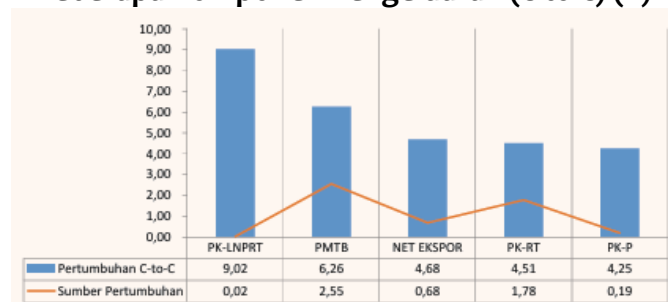


Sumber : BPS Provinsi Kepri

Perekonomian Kepulauan Riau selama kumulatif sampai dengan triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,02 persen (c-to-c) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen PK-LNPRT mencapai 9,02 persen; diikuti komponen PMTB sebesar 6,26 persen; komponen Net Ekspor sebesar 4,68 persen; komponen PK-RT sebesar 4,51 persen; dan komponen PK-P sebesar 4,25 persen. Jika ditinjau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau kumulatif triwulan IV-2024 (c-to-c), komponen PMTB memiliki andil pertumbuhan tertinggi sebesar 2,55 persen; diikuti komponen PK-RT memiliki andil sebesar 1,78 persen; komponen Net Ekspor dengan andil 0,68 persen; PK-P dengan andil 0,19 persen dan komponen PK-LNPRT dengan andil sebesar 0,02 persen.

Grafik 3.11

Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau Menurut Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (%)



Sumber : BPS Provinsi Kepri

Tabel 3.3

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepri (q-to-q)(y-on-y)(c-to-c) Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010 (%)

Komponen	Triw IV-2024 Terhadap Triw III- 2024 (q-to-q)**	Triw IV-2024 Terhadap Triw IV- 2023 (y-on-y)**	Kumulatif Triw IV- 2024 Terhadap Kumulatif Triw IV- 2023 (c-to-c)**	Sumber Pertumbuhan (q-to-q)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,83	2,97	4,51	0,33	1,14	1,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,65	2,03	9,02	-0,01	0,00	0,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	59,72	-7,08	4,25	2,39	-0,48	0,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,51	5,63	6,26	2,70	2,31	2,55
5. Ekspor Barang dan Jasa	9,26	14,85	3,77	14,75	22,12	5,97
6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,55	13,63	3,68	15,22	18,82	5,29
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	6,94	5,14	5,02	6,94	5,14	5,02

Sumber : BPS Provinsi Kepri

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,02 % dengan target sebesar 5,2 – 6,3 % sehingga capaian kinerja sebesar 98 %.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV-2024 mencatat pertumbuhan sebesar 5,14 persen (year-on-year) berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berada di urutan 13 Nasional, sedangkan ekonomi Q to Q (Quarter-to-Quarter) mencatat pertumbuhan sebesar 6,94 persen, menempatkan Kepulauan Riau pada urutan 3 Nasional dan terbaik se-Sumatera.

Tabel 3.4

Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera TW IV-2024 Tahun Dasar 2010

Wilayah	PDRB (miliar rupiah)		Pertumbuhan (%)			Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
	ADHB	ADHK	q to q	y on y	c to c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	65.360,45	40.854,65	6,11	4,15	4,66	5,19
2. Sumatra Utara	295.718,16	161.551,59	0,44	5,10	5,03	23,48
3. Sumatra Barat	85.428,79	50.983,94	2,03	4,04	4,36	6,78
4. Riau	289.246,64	145.758,17	0,16	3,52	3,52	22,97
5. Jambi	84.362,14	45.596,12	0,89	6,00	4,51	6,70
6. Sumatra Selatan	168.922,19	95.612,10	-1,85	5,07	5,03	13,42
7. Bengkulu	26.992,94	13.971,84	3,11	4,55	4,62	2,14
8. Lampung	121.548,78	70.338,39	-3,52	5,32	4,57	9,65
9. Kep. Bangka Belitung	28.153,44	15.751,49	3,48	0,94	0,77	2,24
10. Kepulauan Riau	93.446,15	55.394,49	6,94	5,14	5,02	7,42
Sumatera	1.259.179,68	695.812,77	0,70	4,60	4,45	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kepri

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan IV-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,60 persen. Pertumbuhan q-to-q triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 0,70 persen. Dan secara c-to-c tumbuh sebesar 4,45 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera secara regional didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,48 persen, sementara Kepulauan Riau berada pada urutan kelima dengan share sebesar 7,42 persen.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Kontribusi besar dari sektor minyak dan gas (migas);
2. Realisasi APBD dan APBD pada TW IV 2024 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri;
3. Realisasi investasi Triwulan III capaian realisasi investasi sebesar Rp. 30,82 triliun. Capaian ini tidak terlepas dari capaian realisasi investasi di Kota Batam dan Kabupaten Bintan yang melampaui target yang diberikan. Untuk kabupaten Bintan, capaian realisasi investasi didorong dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, dimana salah satu perusahaan yang merealisasikan investasi dengan angka yang cukup tinggi adalah PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI). Sedangkan capaian realisasi investasi Kota Batam salah satunya ditopang oleh Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa yang bergerak di Ekonomi digital, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata.
4. Penyerapan tenaga kerja akibat semakin meningkatnya kesempatan kerja di Kota Batam yang merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau;
5. Sektor pariwisata, semakin membaiknya infrastruktur, aksesibilitas, amenities, dan atraksi yang menyebabkan naiknya angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau baik mancanegara maupun Nusantara yang pada akhirnya menyebabkan kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum yang cenderung bertambah.
6. Dari sektor peningkatan pendapatan daerah melalui kegiatan ekspor dibidang pertanian, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis, sehingga berfungsi sebagai salah satu dari 17 pintu ekspor komoditas. Komoditas ekspor unggulan sektor pertanian , diantaranya :

- Ternak Babi : Kepulauan Riau dikenal sebagai penghasil ternak babi terbesar di Indonesia, dengan sebagian besar ekspor ditujukan ke Singapura. Ini menunjukkan bahwa sektor peternakan memiliki potensi yang besar dalam kontribusi ekspor.
- Karet : Karet yang diolah di Kabupaten Bintan juga diekspor ke berbagai negara, menambah nilai ekspor dari sektor pertanian.
- Produk Olahan Kelapa : Santan kelapa dan kelapa parut kering merupakan produk olahan yang rutin diekspor, memperkuat posisi sektor pertanian dalam perdagangan internasional.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :
 - Mengontrol laju inflasi;
 - Meningkatkan pendapatan daerah;
 - Menjaga stabilitas perekonomian daerah;
 - Membantu pemerataan distribusi pendapatan daerah;
 - Membantu meningkatkan kapasitas produksi daerah;
 - Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan;
 - Membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah;
3. Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Energi Kepri.
4. Menyusun Usulan Kuota, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun

- 2024 dalam rangka pengendalian distribusi jenis BBM Tertentu/Solar;
5. Kebijakan penerapan bebas visa kunjungan (BVK) bagi pemegang residen permanen dari negara tetangga, Singapura efektif berlaku mulai 8 Oktober 2024 dan kebijakan berupa visa kunjungan singkat atau selama tujuh hari dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp250 ribu, yang berlaku khusus di pintu-pintu masuk kedatangan wisman di wilayah Kepri efektif berlaku mulai 17 Desember 2024;
 6. Pengawasan pelaporan Kegiatan Penanaman Modal dan Bimbingan dan Pelatihan penggunaan aplikasi OSS (Online Single Submission) kepada para pelaku usaha;
 7. Melaksanakan pengawasan produksi dan penjualan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dan Penerbitan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin pertambangan rakyat, usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan pertambangan batuan, pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan izin pertambangan rakyat
 8. Mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) untuk membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini di Lembaga keuangan formal bagi peserta didik sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau ke Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/500/28/B.EKBANG-SET/2024 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar
 9. Melaksanakan promosi pariwisata dengan menggelar maupun mendukung beberapa pelaksanaan even baik skala nasional maupun internasional dan Publikasi pariwisata di berbagai *chanel* media
 10. Meningkatkan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya
 11. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM Provinsi dan Kabupaten/Kota dan memfasilitasi penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum
 12. Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta perluasan lintasan trayek angkutan laut sebagai sarana kemudahan konektivitas distribusi barang
- Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau antara lain :
1. Ketergantungan pada Sumber Eksternal: Beberapa barang konsumsi yang mempengaruhi inflasi, seperti bahan bakar dan bahan pokok, sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang di luar kendali daerah
 2. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti migas dan perikanan, yang membuat ekonomi daerah rentan terhadap guncangan eksternal
 3. Pendanaan dan Investasi: Keterbatasan anggaran dan tantangan dalam menarik investasi menjadi hambatan utama. Meskipun telah ada persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi pendanaan yang memadai masih menjadi tantangan
 4. Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan : koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan dunia usaha belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi keuangan
 5. Belum adanya dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
 6. Sinergi kemitraan dan promosi pemasaran wisata masih belum optimal

Upaya kedepan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi di Sektor Energi: Melalui Peraturan Daerah yang telah disahkan, pemerintah daerah harus dapat menarik investasi swasta dan nasional di sektor energi. Penyiapan regulasi yang jelas dan insentif yang menarik akan membantu mendorong investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian daerah.
2. Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah provinsi perlu menggali potensi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk menciptakan keberlanjutan energi. Diversifikasi sumber energi akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi jangka panjang.
3. Penguatan Sektor Energi Lokal: Peningkatan kapasitas dan dukungan kepada BUMD Energi Kepri dalam mengelola sumber daya alam yang ada akan memperkuat ekonomi daerah. Biro Perekonomian harus memfokuskan pengelolaan BUMD agar lebih efektif dalam memanfaatkan potensi energi lokal untuk kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga keuangan : Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama yang lebih erat dengan perusahaan swasta untuk mendorong pengembangan proyek-proyek energi yang dapat mempercepat transformasi ekonomi serta menggandeng perbankan, koperasi, dan fintech untuk menciptakan model bisnis yang inklusif dan berkelanjutan, Memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.
5. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi : Meningkatkan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor,

Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi.

6. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur : Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan laut, Optimalisasi rantai pasok dan distribusi barang.
7. Optimalisasi Investasi dan Insentif Ekonomi : Meningkatkan kemudahan berusaha melalui deregulasi dan insentif pajak, Mempromosikan potensi daerah kepada investor melalui event investasi dan kerja sama internasional.

Tabel 3.5

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

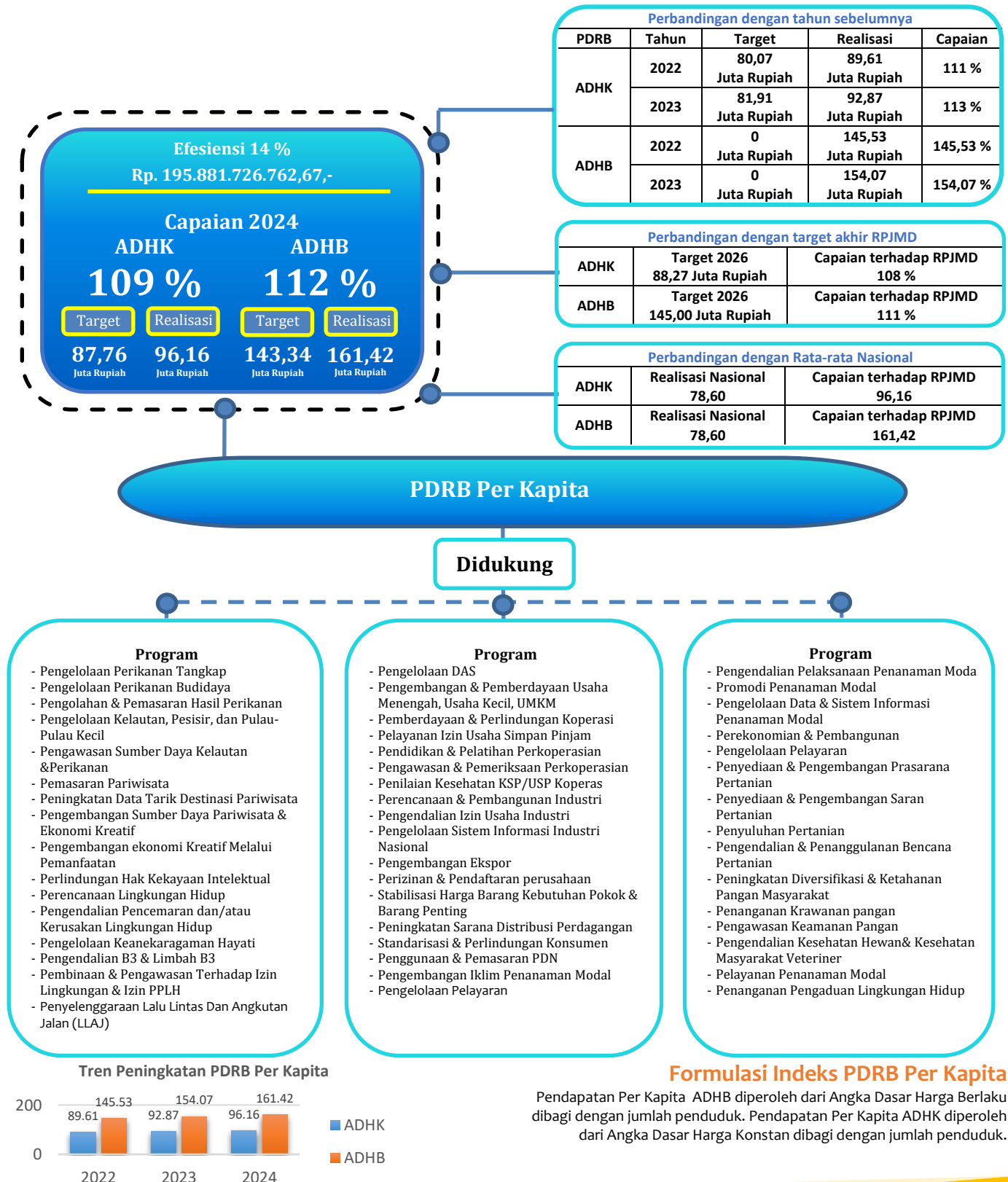
No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	23,674,205,828.93	23,351,032,332.83
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,950,650,657.01	4,763,757,011.00
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981,660,035.00	966,518,908.00
4	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432,682,670.00	397,662,602.00
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,667,398,387.00	1,550,334,546.00
6	Pemasaran Pariwisata	12,822,617,814.00	12,060,439,550.00
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	455,110,618.00	229,625,417.00
8	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119,267,600.00	119,267,600.00
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3,778,106,462.00	23,315,043,796.00
10	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9,564,150,999.00	9,138,455,605.00
11	Perencanaan Lingkungan Hidup	366,213,910.00	355,188,472.00
12	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,386,207,000.00	1,186,900,126.00
13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16,408,038,762.00	15,228,168,888.00
14	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	214,235,911.00	151,298,245.00
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
16	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4,411,453,370.00	3,989,608,754.00
17	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,743,695,649.00	1,175,578,823.00
18	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
19	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196,242,000.00	191,940,500.00
20	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50,119,600.00	49,819,800.00
21	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483,133,500.00	472,596,105.00
22	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,456,130.00	65,289,460.00
23	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23,851,200.00	23,773,500.00
24	Pengendalian Izin Usaha Industri	76,103,700.00	76,103,700.00
25	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8,000,000.00	7,867,530.00
26	Pengembangan Ekspor	113,424,868.00	113,424,868.00
27	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4,995,864.00	4,772,000.00
28	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143,073,937.00	142,224,537.00
29	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453,597,402.00	453,597,402.00
30	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846,730,482.00	844,197,779.00
31	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	476,982,600.00	475,172,180.00
32	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	280,132,740.00	256,499,680.00
33	Pelayanan Penanaman Modal	552,250,623.00	546,445,525.00
34	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,386,207,000.00	1,186,900,126.00
35	Promosi Penanaman Modal	56,159,600.00	56,029,292.00
36	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32,162,703.00	32,162,703.00
37	Perekonomian dan Pembangunan	742,550,321.00	722,392,814.00
38	Pengelolaan Pelayaran	27,025,122,466.13	24,183,989,715.49
39	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,134,223,785.50	3,638,866,702.00
40	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7,161,044,012.00	2,001,882,170.00
41	Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050.00	714,134,914.00
42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132,228,531.00	127,021,801.00
43	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070.10	1,173,800,426.00
44	Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210.00	43,616,700.00
45	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47,169,787.00	25,901,500.00
46	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321,779,968.00	60,655,085.00
47	Penyelenggaraan Jalan	48,539,486,540.00	42,059,465,086.00
48	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
49	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		195,881,726,762,67	189,067,450,970,32

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 195,881,726,762,67,- terealisasi sebesar Rp. 189,067,450,970,32,- atau 96%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.6,814,275,792,35 (4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Pertumbuhan ekonomi (104%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96%) dengan efisiensi 8%.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya.

Nilai Pendapatan Per Kapita pada Tahun 2024 dengan capaian kinerja PDRB Per Kapita ADHK sebesar **51,66** Juta Rupiah dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar **86,88** Juta Rupiah dari target PDRB Per Kapita ADHK sebesar **87,76** Juta Rupiah dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar **143,34** Juta Rupiah dan terealisasi PDRB Per Kapita ADHK sebesar **58,75%** dan PDRB Per Kapita ADHB sebesar **60,61%**.



PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

PDRB per kapita tidak semata-mata mengindikasikan kemakmuran wilayah karena pada kenyataannya distribusi pendapatan suatu wilayah masih belum merata. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, tetapi ada pula yang pendapatannya masih rendah. Meskipun PDRB per kapita suatu wilayah tinggi, tetapi bila tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk juga masih tinggi maka wilayah tersebut belum dapat dikatakan mengalami makmur atau sejahtera. Sehingga, untuk memaknai data PDRB per kapita tidak terlepas dari data dasarnya. Oleh karena itu angka PDRB per kapita dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan data total PDRB. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara :

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap

lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

4. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

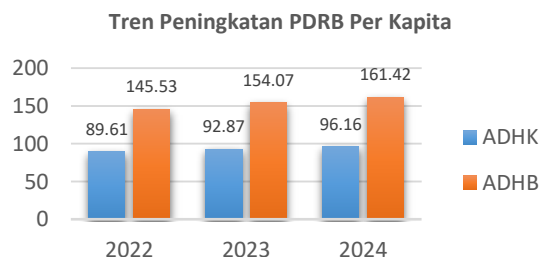
Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat kinerja PDRB perkapita atas Harga Konstan berdasarkan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 meningkat melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar **87,76** Juta Rupiah pada tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar **96,16** Juta Rupiah sehingga capaian kinerja sebesar **109%** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Sedangkan realisasi PDRB Perkapita atas Harga Berlaku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar **161,42** Juta Rupiah, melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar **143,34** Juta Rupiah pada tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar **112%** Juta rupiah atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Riau PDRB Perkapita (PDRB atas Harga Konstan) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp96,16 Juta rupiah, dibandingkan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp92,87 Juta Rupiah meningkat 3,29 Juta Rupiah dari realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2023. Kemudian PDRB PerKapita atas Harga Berlaku sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 161,42 Juta rupiah dibandingkan Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 154,07 Juta Rupiah juga meningkat 7,35 Juta rupiah dari tahun 2023.

Berikut disampaikan perbandingan capaian indikator Pendapatan perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024:

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator PDRB Per Kapita Tahun 2022-2024



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan capaian ADHK sebesar 96,16 Juta Rupiah dengan target sebesar 88,27 Juta Rupiah dengan capaian kinerja sebesar 108% dan capaian ADHB 161,42 Juta Rupiah dengan target sebesar 145,00 Juta Rupiah dengan capaian kinerja sebesar 111 %.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan PDRB per kapita ADHB dan ADHK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan formal yang disiapkan bagi Masyarakat diantaranya bagi peserta didik, juga mendukung salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kepulauan Riau dan mendukung Gerakan Nasional Menabung (GNM). Sehubungan tersebut Gubernur Kepulauan Riau telah menerbitkan Surat Edaran Nomor

B/500/28/B.EKBANG-SET/2024 tentang Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

2. Meningkatkan akses listrik kepada masyarakat
3. Mengadakan pembinaan langsung kepada pelaku ekonomi kreatif di seluruh kabupaten/kota.
4. Memberikan stimulus/ bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya
5. Mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
6. Penerbitan rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin pertambangan rakyat, usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dan pertambangan batuan, pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan dan izin pertambangan rakyat
7. Meningkatkan produksi perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana pada sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan dan pemasaran
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, terutama dalam komoditas unggulan seperti Tanaman Pangan, hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian lokal.

Beberapa kendala dalam peningkatan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau diantaranya

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur : Sumber daya manusia yang terbatas serta infrastruktur yang belum memadai dalam sektor energi, sektor pariwisata, sektor perikanan

2. Kurangnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan : koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan dunia usaha belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi keuangan
3. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri

Upaya kedepan dalam peningkatan PDRB Perkapita di Provinsi Kepulauan Riau

1. Meningkatkan produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dengan Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis teknologi.
2. Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur : Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat dan laut, Optimalisasi rantai pasok dan distribusi barang.
3. Mendorong hilirisasi industri dan investasi di sektor manufaktur.
4. Diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
6. Fasilitasi akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan, Digitalisasi UMKM untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
7. Pengembangan akses pemasaran dan promosi produk IKM
8. Meningkatkan kemudahan berusaha melalui deregulasi dan insentif pajak
9. Mempromosikan potensi daerah kepada investor melalui event investasi dan kerja sama internasional

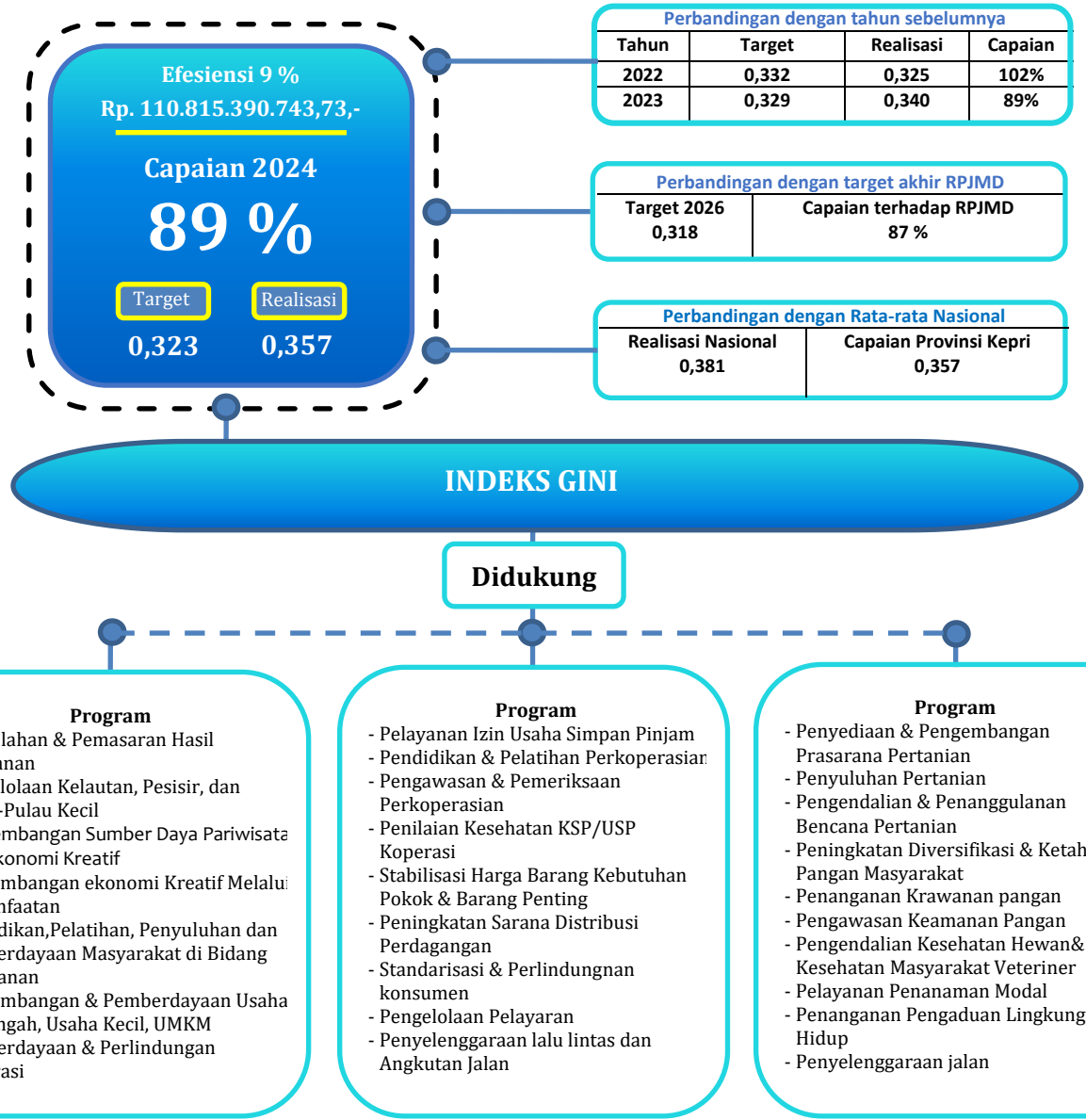
Tabel 3.6
Program Dan Realisasi Anggaran yang mendukung PDRB Per Kapita Kepulauan Riau

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	23,674,205,828.93	23,351,032,332.83
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4,950,650,657.01	4,763,757,011.00
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981,660,035.00	966,518,908.00
4	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432,682,670.00	397,662,602.00
5	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,667,398,387.00	1,550,334,546.00
6	Pemasaran Pariwisata	12,822,617,814.00	12,060,439,550.00
7	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	455,110,618.00	229,625,417.00
8	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119,267,600.00	119,267,600.00
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3,778,106,462.00	23,315,043,796.00
10	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9,564,150,999.00	9,138,455,605.00
11	Perencanaan Lingkungan Hidup	366,213,910.00	355,188,472.00
12	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,386,207,000.00	1,186,900,126.00
13	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	16,408,038,762.00	15,228,168,888.00
14	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	214,235,911.00	151,298,245.00
15	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
16	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	4,411,453,370.00	3,989,608,754.00
17	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,743,695,649.00	1,175,578,823.00
18	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
19	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196,242,000.00	191,940,500.00
20	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50,119,600.00	49,819,800.00
21	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483,133,500.00	472,596,105.00
22	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,456,130.00	65,289,460.00
23	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23,851,200.00	23,773,500.00
24	Pengendalian Izin Usaha Industri	76,103,700.00	76,103,700.00
25	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8,000,000.00	7,867,530.00
26	Pengembangan Ekspor	113,424,868.00	113,424,868.00
27	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	4,995,864.00	4,772,000.00
28	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143,073,937.00	142,224,537.00
29	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453,597,402.00	453,597,402.00
30	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846,730,482.00	844,197,779.00
31	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	476,982,600.00	475,172,180.00
32	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	280,132,740.00	256,499,680.00
33	Pelayanan Penanaman Modal	552,250,623.00	546,445,525.00
34	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,386,207,000.00	1,186,900,126.00
35	Promosi Penanaman Modal	56,159,600.00	56,029,292.00
36	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	32,162,703.00	32,162,703.00
37	Perekonomian dan Pembangunan	742,550,321.00	722,392,814.00
38	Pengelolaan Pelayaran	27,025,122,466.13	24,183,989,715.49
39	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,134,223,785.50	3,638,866,702.00
40	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7,161,044,012.00	2,001,882,170.00
41	Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050.00	714,134,914.00
42	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	132,228,531.00	127,021,801.00
43	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070.10	1,173,800,426.00
44	Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210.00	43,616,700.00
45	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47,169,787.00	25,901,500.00
46	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321,779,968.00	60,655,085.00
47	Penyelenggaraan Jalan	48,539,486,540.00	42,059,465,086.00
48	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
49	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		195,881,726,762,67	189,067,450,970,32

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 195,881,726,762,67 terealisasi sebesar Rp. 189,067,450,970,32,- atau 96%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.6,814,275,792,35 (4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja PDRB Perkapita ADHK (109%) PDRB Perkapita ADHK (112%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96) sehingga tercapai efisiensi 14%.

Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan di antara penduduk suatu wilayah. Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditentukan. Indeks Gini pada September Tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar **0,357** Indeks dari target sebesar **0,323** Indeks dan capaian kinerja sebesar **89 %**.



Formulasi Indeks Gini

Indeks Gini merupakan Salah satu alat ukur yang digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan melalui hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Semakin mendekati 1 maka nilai ketimpangan semakin besar, sebaliknya semakin mendekati 0 maka nilai ketimpangan semakin kecil.



Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari indikator penurunan indeks gini Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan hasil yang belum maksimal. Indeks gini Provinsi Kepulauan Riau pada september Tahun 2024 terealisasi sebesar **0,357** Indeks dengan target dari yang telah ditetapkan sebesar **0,323** Indeks sehingga capaian kinerja sebesar **89 %** atau dalam kategori **Baik**.

Pada September 2024 Indeks Gini Ratio tercatat sebesar 0,357, meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2024 yang sebesar 0,349. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran di Kepulauan Riau selama periode Maret 2024 - September 2024.

Ketimpangan antar kelompok Pengeluaran dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 0,357 September 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,340. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024 Gini Ratio di daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,009 poin yaitu dari 0,351 pada Maret 2024 menjadi 0,360 pada September 2024. Berbeda dengan daerah perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode Maret 2024–September 2024, yaitu sebesar 0,004 poin dari 0,240 pada Maret 2024 menjadi 0,236 pada September 2024.

Capaian kinerja penurunan indeks gini tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10,8 Indeks. Dimana pada tahun 2023 indeks gini sebesar 0,340 Indeks menurun menjadi 0,357 indeks pada tahun 2024.

Analisisnya hal ini menunjukkan nilai realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya ketimpangan yang lebih besar dari yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa pendapatan atau kekayaan lebih terkonsentrasi pada sebagian kecil populasi dibandingkan dengan yang direncanakan. Penyebab dan dampaknya ketimpangan yang lebih tinggi bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti kebijakan ekonomi yang kurang merata, perubahan dalam pasar struktur tenaga kerja, atau perbedaan akses terhadap sumber daya. Hal ini berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi jika ketimpangan terus meningkat.

Grafik 3.13
Perkembangan Gini Ratio Kepulauan Riau S.D. September 2024



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 3.14
Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Kepulauan Riau per September 2024

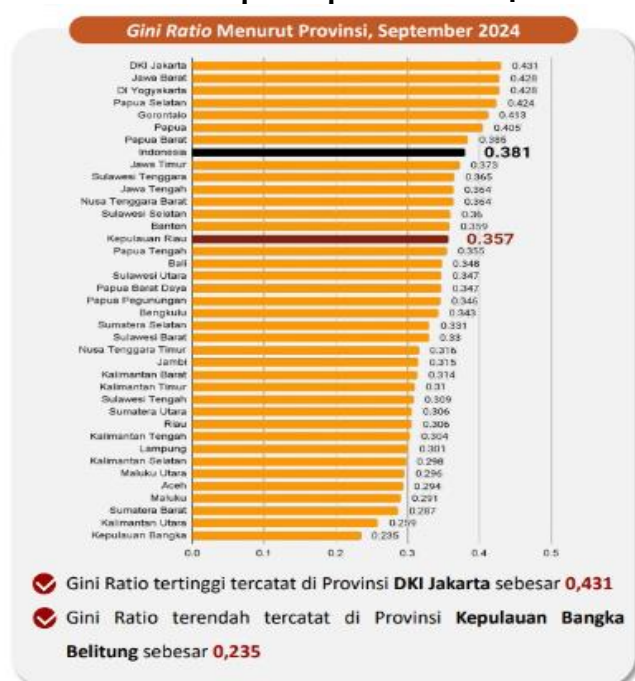


Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 Indeks dengan target sebesar 0,318 % dengan capaian kinerja sebesar 87 %.

Pada Tahun 2024, capaian Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian nasional berada dibawah capaian nasional. Dibandingkan provinsi se - Indonesia tahun 2024, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 pada September 2024 berada pada posisi keempat belas setelah Provinsi Banten, jika dibandingkan Provinsi se Wilayah Sumatera, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,357 pada September 2024 berada pada posisi pertama.

Gambar 3.1
Perbandingan Indeks Gini Tingkat Provinsi se-Indonesia per September 2024



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Upaya yang dilakukan dalam mendukung indikator indeks gini di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan kemiskinan melalui stabilitasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin dan bantuan sosial;
2. Layanan kesehatan yang terjangkau melalui program jaminan kesehatan
3. Penurunan pengangguran melalui program sertifikasi dan magang serta kemitraan dengan industri;
4. Penurunan ketimpangan kekayaan melalui kredit UMKM dibidang pertanian dan perikanan;
5. Penguatan modal bagi Kelompok Tani Hutan
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal
7. Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
8. memberikan stimulus/ bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya dan selanjutnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya serta melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
9. Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Provinsi Kepulauan Riau sesuai Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2024.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penurunan indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan yang Rendah : Masih banyak masyarakat yang belum memahami produk dan layanan keuangan yang tersedia, sehingga akses terhadap permodalan masih terbatas
2. Kesenjangan Infrastruktur Keuangan : terutama di daerah terpencil, keterbatasan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan fintech menjadi kendala utama dalam menyalurkan pembiayaan;

3. Infrastruktur yang belum memadai dalam sektor energi, sektor pariwisata, sektor perikanan dan transportasi menjadi tantangan besar
4. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah

Upaya-upaya kedepan dalam pencapaian kinerja penurunan indeks Gini di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Menyediakan Sarana Usaha Perikanan Tangkap berupa Armada Perikanan Tangkap dan alat tangkap perikanan bagi nelayan berpenghasilan rendah,
2. Melaksanakan pemberian bantuan bibit dan benih dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
3. Penyempurnaan Data Kuota dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk memonitor distribusi LPG secara lebih efektif dan akurat.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal
5. Peningkatan akses pendidikan melalui pemberian beasiswa dan program dukungan bagi keluarga berpenghasilan rendah
6. Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan : Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat, UMKM, dan pelaku usaha terkait akses pembiayaan
7. Penguatan Infrastruktur Keuangan Daerah dengan Mendorong pendirian dan ekspansi layanan keuangan di daerah terpencil melalui sinergi dengan perbankan dan fintech, Mempermudah regulasi terkait pembukaan layanan keuangan berbasis digital serta mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan karakteristik daerah, seperti asuransi pertanian dan kredit mikro berbasis komunitas
8. Optimalisasi Peran TPAKD dalam Mendorong Pembiayaan Sektor Produktif : Meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan

skema pembiayaan lainnya bagi UMKM dan petani,

Tabel 3.7
Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Indikator Indeks Gini Kepulauan Riau

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	981,660,035.00	966,518,908.00
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	432,682,670.00	397,662,602.00
3	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	119,267,600.00	119,267,600.00
4	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	3,778,106,462.00	3,315,043,796.00
5	Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,743,695,649.00	1,175,578,823.00
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	6,703,797,700.00	5,669,013,347.00
7	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	196,242,000.00	191,940,500.00
8	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50,119,600.00	49,819,800.00
9	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	483,133,500.00	472,596,105.00
10	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67,456,130.00	65,289,460.00
11	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	23,851,200.00	23,773,500.00
12	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	143,073,937.00	142,224,537.00
13	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	453,597,402.00	453,597,402.00
14	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	846,730,482.00	844,197,779.00
15	Perekonomian dan Pembangunan	742,550,321.00	722,392,814.00
16	Pengelolaan Pelayaran	27,025,122,466.13	24,183,989,715.49
18	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,134,223,785.50	3,638,866,702.00
19	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7,161,044,012.00	2,001,882,170.00
20	Penyuluhan Pertanian	1,207,128,050.00	714,134,914.00
21	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,803,507,070.10	1,173,800,426.00
22	Penanganan Kerawanan Pangan	133,571,210.00	43,616,700.00
23	Pengawasan Keamanan Pangan dan	47,169,787.00	25,901,500.00
24	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	321,779,968.00	60,655,085.00
25	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	676,393,167.00	615,510,878.00
26	Pendidikan	377.526.999.967	357.186.005.919
27	Penyelenggaraan Jalan	48,539,486,540.00	42,059,465,086.00
28	Pengelolaan Pelayaran	27.025.122.466	24.183.989.715
29	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00
Total		110,815,390,743,73	89,126,740,149,49

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 110,815,390,743,73,- terealisasi sebesar Rp 89,126,740,149,49,- atau 80%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.21,688,650,549,24,- (20%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Gini (89%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (80%) dengan efisiensi 9%.

SASARAN :

Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran sering kali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Tingkat Pengangguran pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar **115,25 %** dari target sebesar **7,54 %** dan terealisasi sebesar **6,39 %**.



Formulasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT diperoleh dengan cara Jumlah Pengangguran (orang) dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja (orang) dikali 100 %.

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak yang pada akhirnya menjadi cermin kemajuan pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan Komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar permasalahan ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan usaha untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi titik sentral dari pembangunan secara keseluruhan. Selain itu juga diperlukan upaya Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten dan berkelanjutan sehingga provinsi dapat mencapai target dalam menurunkan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran terbuka dikenal sebagai angka pengangguran adalah Angka yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, sehingga perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Untuk mencapai sasaran Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran ditetapkan indikator kinerja yaitu angka pengangguran/ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran Percepatan penurunan angka kemiskinan dan Pengangguran dilihat dari indikator penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 terealisasi sebesar **6,39 %** dapat melebihi target dari yang telah ditetapkan sebesar **7,54 %** sehingga capaian kinerja sebesar **115,25 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Angkatan kerja yang merupakan bagian yang mempengaruhi nilai Tingkat Pengangguran terbuka adalah bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang

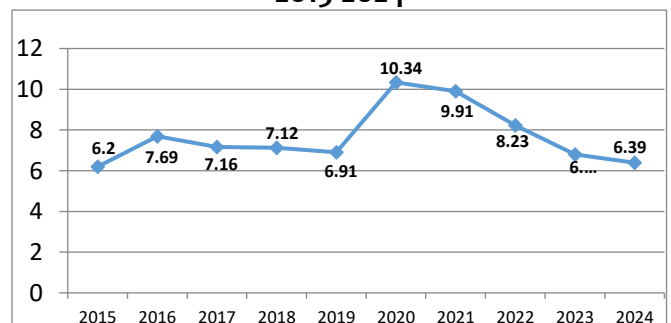
masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.120.660 orang turun sebesar 26.974 orang dibanding Agustus 2023 sebesar 1.093.686 orang. Sejalan dengan penurunan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,49 persen point dari 68,68 persen tahun 2023 menjadi 69,17 persen tahun 2024.

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kriteria Penganggur Terbuka terdiri dari :

1. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan pekerjaan
3. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Analisis indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka merupakan rasio dari jumlah penganggur terbuka yakni 71.570 orang dengan jumlah angkatan kerja yakni 1.120.660 sehingga Tingkat Pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,39%. Adapun evaluasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau mulai Tahun 2015-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.15
Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015-2024



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Dua Belas tahun terakhir, TPT di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari periode tahun 2016 ke 2024 mengalami Penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 1,3 poin persen, dari tahun 2020 ke 2022 terjadi penurunan sebesar 2,11 poin persen, dari tahun 2021 sampai 2022 TPT Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan sebesar 1,68 poin. Pada tahun 2018 tercatat TPT Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,12 %. Dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,21. Pengaruh Covid -19 menyebabkan angka TPT Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seiring dengan peningkatan perekonomian TPT tahun 2023 mengalami penurunan sampai diangka 6.8 atau turun 1,43 poin dibandingkan tahun 2022 dan 3,11 pada Tahun 2021. Tingkat pengangguran Provinsi Kepulauan Riau terus mengalami penurunan sampai akhir tahun 2024 menjadi 3,39 %.

Tabel 3.8

Karakteristik Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal 2019-2024

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2022-Ags 2024 persen poin	Perubahan Ags 2023-Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,23	6,80	6,39	-1,84	-0,41
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-Laki	7,78	5,95	6,02	-1,76	0,08
- Perempuan	9,03	8,23	7,00	-2,03	-1,22
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	8,52	6,77	6,74	-1,78	-0,02
- Pedesaan	5,88	7,00	2,50	-3,38	-4,50

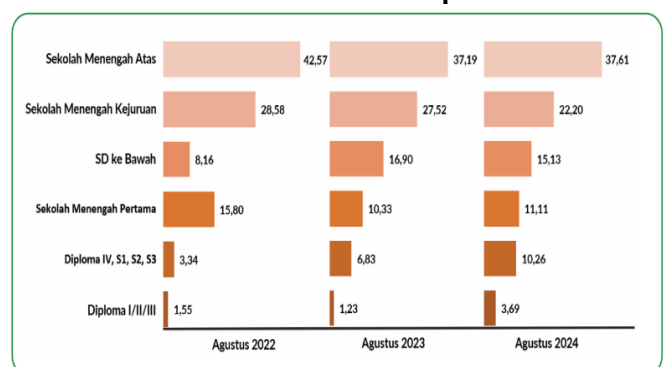
Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Jika dilihat Berdasarkan tipe daerah/daerah tempat tinggal, TPT perkotaan Tahun 2023 sebesar 6,77 %, TPT wilayah perkotaan Lebih rendah dibandingkan TPT di daerah Pedesaan yang sebesar 7,00 %. Berbeda dengan TPT perkotaan, TPT Pedesaan mencapai angka

tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan Agustus 2022 TPT di daerah Perkotaan menurun sebesar 1,75 persen poin, sementara itu TPT di daerah pedesaan meningkat sebesar 1,12 persen poin. Pada Tahun 2024 adanya perubahan TPT Menurut tempat tinggal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar -1,78 poin dan -0,02 persen point dari tahun 2023 (6,77 %). Ditahun 2024 di Pedesaan juga mengalami perubahan angka pengangguran yaitu penurunan sebesar - 4,5 pont dari tahun 2023 (5,88) Menjadi 2,50 tahun 2024.

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 6,02 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 7,00 %. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022, yaitu masing-masing sebesar 1,83 persen poin dan 0,81 persen poin. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 TPT laki-laki menurun sebesar 2,02 persen poin, sedangkan TPT perempuan meningkat 1,63 persen poin. Dan tahun 2024 pengangguran laki-laki mengalami sedikit kenaikan dan angka pengangguran perempuan (7,00 %) mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar -1,22 point dari tahun 2023 (8,23 %).

Grafik 3.16
TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022-2024



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penganggur, pada Agustus 2024 mempunyai pola yang sama dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT dari

tamatan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah menengah kejuruan masih yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 37,61 persen dan 22,20. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada tamatan pendidikan diploma, yaitu sebesar 3,69 persen. Dibandingkan Agustus 2022, penurunan TPT terjadi pada hampir semua kategori tamatan pendidikan kecuali tamatan SD ke bawah dan tamatan universitas. Penurunan TPT terbesar terjadi pada kategori tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP/ sederajat) yaitu sebesar 4,51 persen poin. Sementara peningkatan TPT terjadi pada kategori tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 2,13 persen poin dan kategori tamatan universitas yaitu sebesar 1,03 persen poin. Tamatan Sekolah menengah Kejuruan Pada Tahun 2024 menurun secara signifikan dari 27,52 persen pada tahun 2023 menjadi 22,22 persen pada akhir tahun 2024 atau turun sebesar 5,3 persen point.

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT pada Tahun 2024 terjadi pada dua kategori Pendidikan yaitu pada kategori pendidikan SMK dan SD ke bawah. Sementara peningkatan TPT terjadi pada hampir semua kategori pendidikan seperti tamatan SMA, SMP, Diploma dan Tamatan Universitas. TPT tertinggi terdapat pada Sekolah menengah Atas (SMA) sebesar 37,61 %. Untuk kategori tamatan SMP sebesar 11,11 %. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang masih belum optimal terserap terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, SD dan SMP. Namun begitu, berdasarkan tren karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja khususnya tamatan berpendidikan SD Pada tahun 2024. Berdasarkan data karakteristik penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, dimana tingkat pendidikan kategori Diploma/universitas jauh mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 6,83 menjadi

10,26, atau turun sebesar 3,43 persen poin dari tahun 2024.

Tabel 3.9
TPT Menurut Kab/Kota Provinsi Kepri
Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022– Ags 2024	Perubahan Ags 2023– Ags 2024
	persen	persen	persen	persen poin	persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Karimun	6,87	6,02	5,52	-1,35	-0,50
Kabupaten Bintan	6,91	5,43	4,53	-2,38	-0,90
Kabupaten Natuna	4,15	4,05	3,89	-0,26	-0,16
Kabupaten Lingga	3,09	3,52	3,38	0,29	-0,14
Kab. Kep. Anambas	2,15	2,55	2,38	0,23	-0,17
Kota Batam	9,56	8,14	7,68	-1,88	-0,46
Kota Tanjungpinang	5,27	4,76	4,69	-0,58	-0,07
Kepulauan Riau	8,23	6,80	6,39	-1,84	-0,41

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa TPT tertinggi pada Tahun 2024 terjadi di Kota Batam sebesar 7,68% dan yang paling rendah adalah Kabupaten Anambas sebesar 2,38%.

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan kabupaten/kota berbagai kebijakan pemerintah dan usaha terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya masih perlu dioptimalkan. Secara absolut, jumlah pengangguran di Kota Batam turun sekitar 52.203 orang. Sehingga, angka TPT Kota Batam menurun sebesar 0,46 dari Agustus 2023 (8,14 %) menjadi 7,68 % pada Agustus 2024. Dari Tabel diatas tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah di Kota Batam sebesar 7,68 % dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yakni 2,38 %. Namun secara keseluruhan dapat tergambar bahwa terjadi penurunan TPT di kerseluruhan kabupaten/kota. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup Signifikan sebesar 0,91 yaitu pada kabupaten Bintan yang pada tahun 2023 sebesar 5,43 % menjadi 4,53 %.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan

Riau sebesar sebesar 6,39 % dengan target 6,91 % dengan capaian kinerja sebesar 107,52 %.

Secara Nasional Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibanding Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara nasional naik sebesar 1,15 persen point atau sebesar 4,97 juta orang dari Agustus 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 6,39 persen, turun sebesar 0,41 persen poin dibanding Agustus 2023. Perbandingan dengan TPT Provinsi Kepulauan Riau berada di atas TPT Nasional sebesar 1,48 Point. Perbandingan TPT Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dengan TPT Nasional dan TPT Provinsi Lain di Indonesia Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
TPT Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan TPT se-Indonesia Tahun 2024

NO	PROVINSI	TPT	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	ACEH	6,03	5,75
2	SUMATERA UTARA	5,89	5,66
3	SUMATERA BARAT	5,94	5,75
4	RIAU	4,23	3,70
5	JAMBI	4,53	4,48
6	SUMATERA SELATAN	4,11	3,86
7	BENGKULU	3,42	3,11
8	LAMPUNG	4,23	4,19
9	KEP. BANGKA BELITUNG	4,56	4,63
10	KEP. RIAU	6,8	6,39
Dst.			
38	PAPUA PEGUNUNGAN	1,02	1,32
	INDONESIA	5,32	4,91

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Karakteristik kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 Penduduk bekerja Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan menjadi sebanyak 1.049.000 dari 1.019.360 orang tahun 2023 dan pengangguran turun sebanyak 2.760 orang. Meskipun Jumlah Angkatan Kerja beserta komponennya secara absolut mengalami Penurunan, namun secara kualitas indikator ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau justru menunjukkan perbaikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2024 sebesar 69,17 persen mengalami Kenaikan 0,49 persen point dibanding Agustus 2023. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi Penurunan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja maupun sebagai penganggur. Dapat juga dikatakan telah terjadi perpindahan penduduk dari kategori Angkatan kerja ke kategori bukan Angkatan kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga dan lainnya).

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,73 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 52,15 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami Kenaikan sebesar 0,81 persen poin, Demikian TPAK perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, pada Agustus 2023, TPAK Perkotaan sebesar 69,21 persen, lebih Tinggi dibanding TPAK Perdesaan yang sebesar 68,70. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK Perkotaan mengalami Peningkatan sebesar 1,10 persen poin, sedangkan TPAK Perdesaan mengalami Penurunan sebesar 4,34 persen poin.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dipengaruhi penurunan TPT yang cukup signifikan yaitu:

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2024 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum sebanyak 318,170 orang (30,33 persen) dan sekolah Menengah kejuruan sebesar 216.690 (20,66 persen). Kemudian disusul tamatan Sekolah Dasar sebanyak 186,880 orang (17,81 persen) Dalam satu tahun terakhir, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.049.090 orang, mengalami penurunan sebanyak 29,730 orang dari Agustus 2023. Adanya perubahan kondisi tenaga kerja selama Tahun 2024 tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 23,65 persen; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,59 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,82 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2023, dimana sektor konstruksi menempati posisi keempat terbesar.
 - b. Dibandingkan Agustus 2023 Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja, peningkatan terbesar pada sektor Pertambangan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Pengadaan Air sebesar 0,04 persen poin. Sementara itu, lapangan pekerjaan mengalami penurunan persentase penyerapan tenaga kerja, dengan penurunan terbesar pada sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri Pengolahan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, informasi dan komunikasi dan real estate dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 3.11

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Agustus 2023 dan 2024 (%)

NO	Pendidikan	Tahun 2023	Tahun 2024	Selisih
1	SD Ke bawah	21,44	17,81	-3,63
2	Sekolah Menengah Pertama	12,07	11,36	-0,71
3	Sekolah Menengah Atas	31,83	30,33	-1,5
4	Sekolah Menengah kejuruan	18,07	20,66	2,59
5	Diploma I/II/II	2,97	4,48	1,51
6	Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3)	13,67	15,36	1,69

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

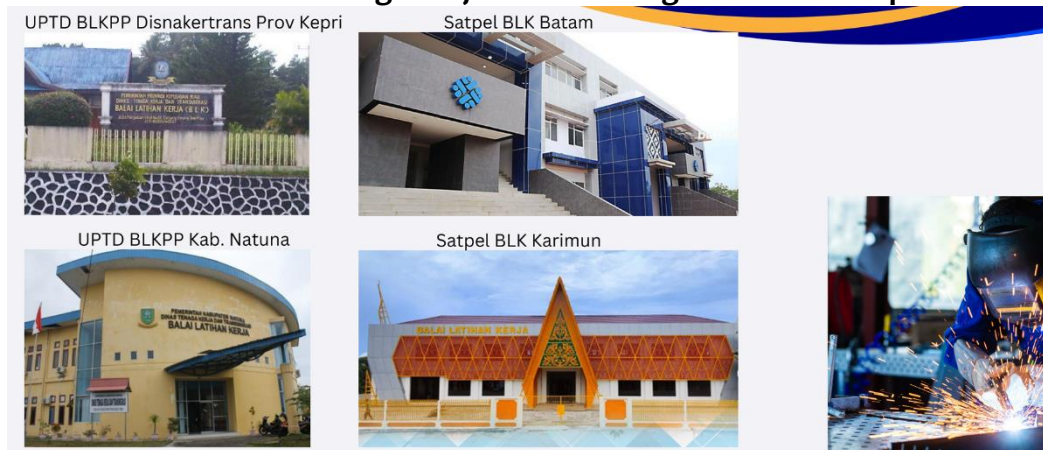
- c. Kondisi ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota pada tahun 2024 menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja akibat semakin meningkatnya kesempatan kerja. Seperti Kota Batam pada Tahun 2024 masih merupakan pusat aktifitas perekonomian di Kepulauan Riau. Dimana menunjukan penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan sebesar 0,46 persen dari tahun 2024. Kondisi ini disebabkan beberapa peningkatan produktifitas disektor formal dan informal. Pada Agustus 2024, penduduk Kota Kepulauan Riau yang bekerja di sektor informal mengalami penurunan 2,12 poin dari 33,67 persen menjadi 31,55 sedangkan yang bekerja di sektor formal sebanyak 68,45 persen. Persentase penduduk bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 naik sebesar 2,12 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023 (66,33). Peningkatan penduduk bekerja pada kegiatan formal ini seiring dengan peningkatan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap.
- d. Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, hal ini diindikasikan dari jam kerja rendah. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2024 jumlahnya mencapai 863.130 (82,27 persen). Dibandingkan dengan Agustus 2023 mengalami Kenaikan sebesar 1,28 persen poin. Sementara itu dalam setahun terakhir, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) berkurang sebanyak 7.860 orang (4,05 persen) yaitu dari 193.808 orang pada Agustus 2022 menjadi 185.950 orang pada Agustus 2024. dapat dilihat table berikut:

Tabel 3.12
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerjaan Penuh/Tidak Penuh Tahun 2023-2024

NO	Karakteristik	2023 (org)	2024 (org)	Perubahan 2023-2024	persen
1	Pekerja Penuh > 35 Jam	825.550	863.13	37,580	9,61
2	Pekerja Tidak Penuh (1-34 Jam)	185.950	193.810	- 7.860	18,94

Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 3.2
Lokasi Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Data BPS Provinsi Kepulauan Riau

Untuk mengatasi TPT Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan Program pelatihan dalam rangka Mengoptimalkan kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Melalui Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, Perluasan Balai Latihan Kerja Melalui satuan Pelayanan, Pelaksanaan Pelatihan dengan berbagai Metode seperti Pelatihan Di Balai Latihan Kerja, Pelatihan di LPK Swasta dan Pelatihan Industri/pemagangan. Upaya Penempatan Paska Pelatihan, Penguatan Kelambagaan Bursa Kerja khusus di SMK serta Sinergi Stakeholder Melalui Tim koordinasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
2. Peningkatan Pelayanan ketenagakerjaan melalui mengoptimalkan pelayanan penggunaan aplikasi SIAP kerja yang dapat digunakan dalam layanan pendaftaran pelatihan di Lembaga pelatihan kerja BLK dan LPK Swasta, Pendaftaran pemagangan Ke luar negeri, sertifikasi BNSP, Pendaftaran pencari kerja di karirhub atau portal Pemda dan Portal Swasta dan layanan ketenagakerjaan lainnya seperti job fair.
3. Beberapa Kegiatan 2024 dilaksanakan dengan konsep *tailor made training* dengan pendekatan penempatan di perusahaan, seperti Untuk AK3 umum sinkronisasi program dengan praktek di perusahaan. Program ini mendapatkan materi langsung di tempat kerja, magang di departemen safety. Demikian juga Training bidang perhotelan yang fokus pada housekeeping, praktek dilakukan di hotel dengan melibatkan supervisor maupun HRD di hotel. Demikian juga Pelaksanaan Pelatihan las tahun 2024, training dilakukan dengan melibatkan praktisi dengan adopsi welding prosedur dari perusahaan sehingga akhir training dilibatkan dengan melakukan welding tes.
4. Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan perusahaan atas kebutuhan komposisi kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, sehingga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui program pemagangan. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Pelatihan Industri Melalui Pemagangan Tahun 2024

Perusahaan	Jumlah Peserta	Bekerja	%
BIIE	11	8	72,73
Grand Lagoi	9	7	77,78
CCI	3	3	100
Sanchaya	29	26	89,66
Doulos Pos	5	5	100
BRC	5	4	80
Aston Inn Batam	9	8	88,89
Santika Batam	10	10	100
Citra Tubindo	70	68	97,14
Louis Alain	25	21	84
DSAW	20	18	90
Ramayana Batam	10	8	80

Sumber : Disnaker dan Transmigrasi Prov Kepri

5. Penumbuhan wira usaha baru (WUB) industri kecil sebanyak 230 WUB dan Fasilitas industri kecil dalam bentuk pelatihan, Fasilitas HKI, Merk, desain dan sertifikat halal sebanyak 808 industri kecil serta melakukan inkubasi industri kecil sebanyak 40 diharapkan dapat membantu memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (Ruang Kelas, Laboratorium, Perpustakaan), peningkatan kuantitas, kualitas, serta distribusi guru, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa.
7. Peningkatan jumlah satuan pendidikan Vokasi.

Pembangunan bidang tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kondisi perekonomian makro, dimana pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai persoalan utama di bidang ketenagakerjaan baik menyangkut optimalisasi pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Masalah pokok penyelenggaraan bidang tenaga kerja adalah:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih cukup tinggi khususnya di Kota Batam.
2. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri. Kualifikasi yang di butuhkan beberapa perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi, tidak dapat di penuhi oleh pencari kerja dengan pengalaman dan kompetensi kerja yang terbatas.
3. Belum maksimalnya pelayanan informasi pasar kerja mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja.
5. Minimnya Kualitas dan Kuantitas SDM fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal.
7. Minimnya kualitas dan kuantitas instruktur dan sumber daya manusia (SDM) pengelola pelatihan sehingga berdampak terhadap pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industri dan dunia pendidikan.

8. Sistem, mekanisme, dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif berjalan.
9. Masih terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja dan pelatihan kewirausahaan.
10. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang sehingga kebutuhan dunia usaha terhadap lulusan BLK belum optimal terpenuhi.
11. Lulusan pendidikan vokasi belum mampu mengimbangi kebutuhan DUDI yang berkaitan perkembangan jenis, mutu dan teknologi.
12. Masih terbatasnya program *teaching factory* dan jumlah guru produktif

Dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya, yaitu :

1. Penguatan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang melibatkan Bappeda, disnaker, Dinas Pendidikan, disperindag, Lembaga Pendidikan vokasi, Konsersium Politeknik, Kadin, asosiasi Perusahaan dan LSP.
2. Penyusunan Strategi daerah untuk revitalisasi Pelatihan Vokasi yang fokus pada Optimalisasi Sistem Informasi Pasar kerja, Penguatan Peran DUDI dalam Proses Pendidikan Vokasi, Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Meningkatkan relevansi dan aksesibilitas sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Terwujudnya kolaborasi rise inovasi dan Hilirisasi produk oleh akademisi, industri masyarakat dan Pemerintah daerah serta Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Pelatihan Vokasi.
3. Pelatihan industri dalam bentuk Pemagangan sangat efektif dalam bentuk penempatan tenaga kerja, sehingga aktifitas pemagangan

- di industri masih tetap akan dilaksanakan pada tahun 2025.
4. Pelatihan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubasi industri
 5. Peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya
 6. Pelatihan SDM dan pengembangan manajemen pelaku IKM.
 7. Memperkuat dan memperluas kemitraan magang siswa pada Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK melakukan magang pada dunia usaha sesuai dengan jurusan.
 8. Menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum Pendidikan dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 9. Menerapkan pembelajaran berbasis industri, atau yang dikenal dengan *teaching factory*. *Teaching factory* dapat meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
 10. Meningkatkan kemampuan lulusan peserta didik dengan penguasaan teknologi dan penguasaan Bahasa asing sebagai kemampuan dasar dalam memasuki pasar kerja.
 11. Pengembangan dan penguatan program *Link and Match* dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industri sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.

Program-program yang mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2024 diantaranya adalah program Pelatihan dan Produktivitas dan Program Penempatan Tenaga Kerja.

Tabel 3.14
Program-program yang Mendukung Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Nama Program	Anggaran (Rupiah)	
		Target	Realisasi
1	Pelatihan dan Produktivitas	Rp. 3.239.016.874,-	Rp. 3,084,224,287,-
2	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 74.818.500,-	Rp. 40.430.700
3	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 4.671.593.002,-	Rp. 4.324.879.949,-
4	Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK	Rp. 143.731.404.700,-	Rp. 113.325.764.165,-
Total		Rp.151.716.833.076,-	Rp.120.775.299.101,-

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.151.716.833.076,- terealisasi sebesar Rp.120.775.299.101,- atau 79%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.30.941.533.975 (21%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (115,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (79%) sehingga efisiensi mencapai 36,25%.

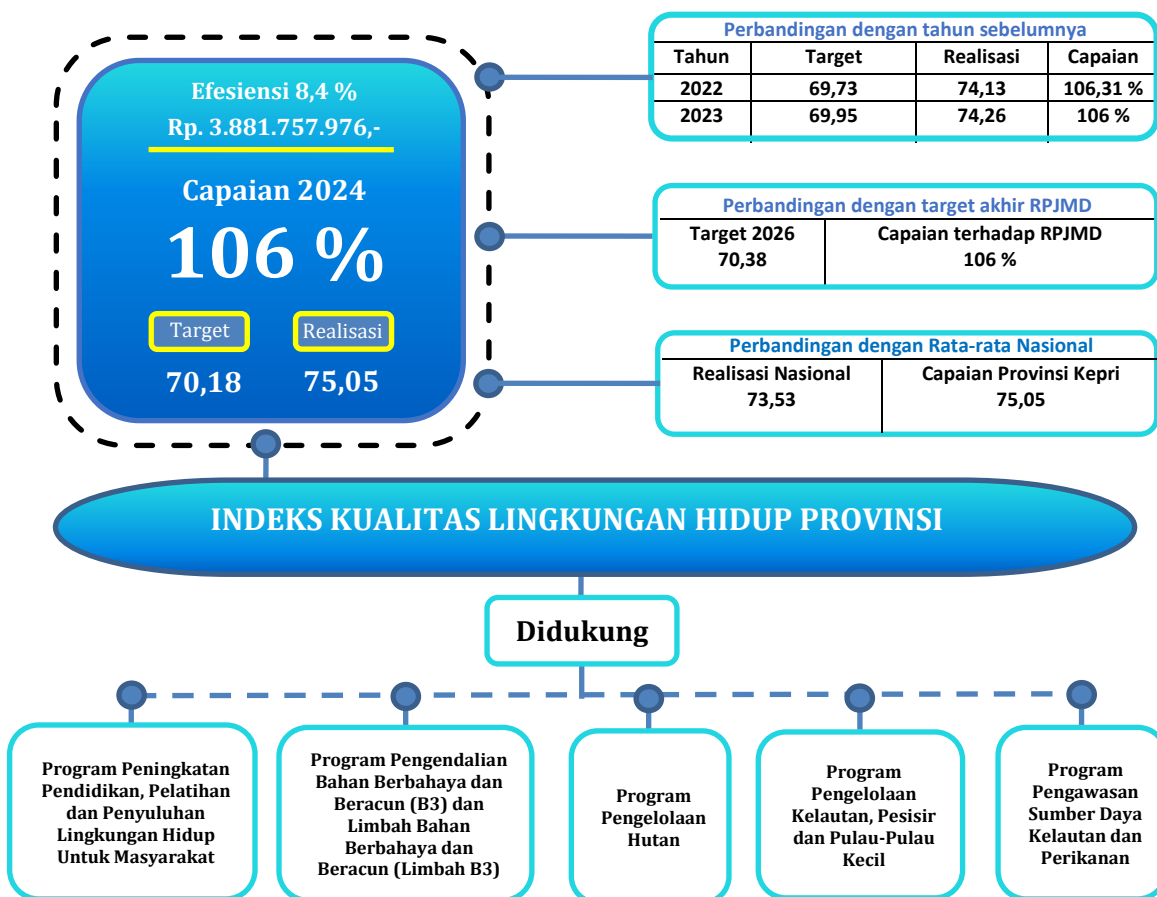
SASARAN :

Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks IKLH di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Realisasi indeks IKLH pada Tahun 2024 sudah baik sebesar **75,05** (Indeks) dari target sebesar **70,18** (Indeks) dengan capaian kinerja sebesar **106 %**.



Formulasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

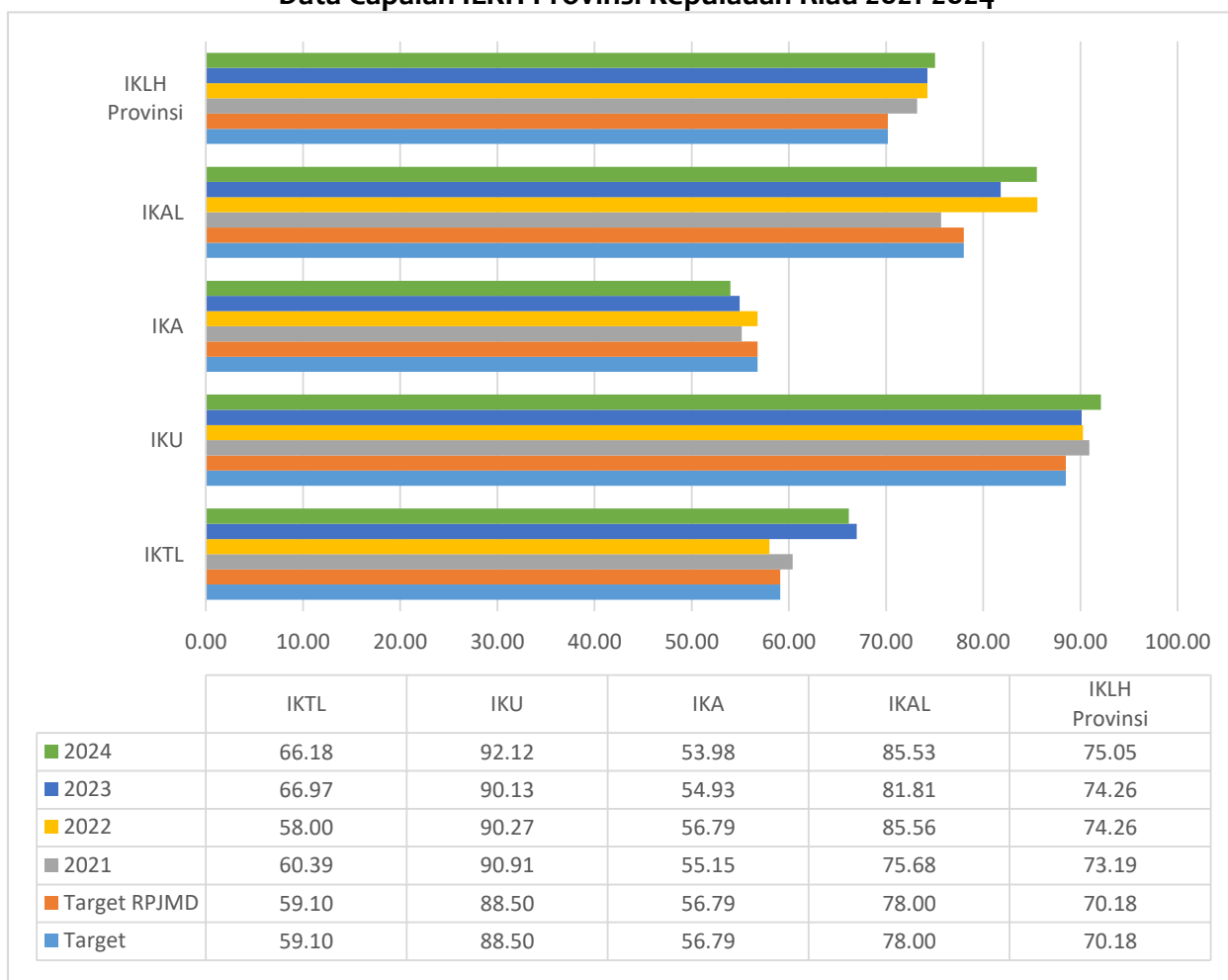
IKLH merupakan indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup di seluruh Provinsi. IKLH Provinsi Kepulauan Riau merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter :
 - TSS - Total Fosfat - DO - Fecal Coli
 - pH - NO₃ - BOD - COD
2. Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung;
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Grafik 3.17
Data Capaian ILKH Provinsi Kepulauan Riau 2021-2024

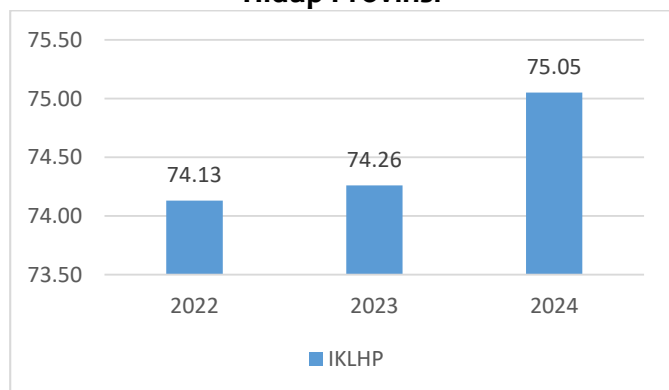


Sumber : DLHK Provinsi Kepri

Penurunan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi kinerja indikator peningkatan kualitas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **75,05** Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **70,18** Indeks sehingga capaian kinerja sebesar **106 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi dilihat dari beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.18
Tren Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi



Sumber : DLHK Prov Kepri

Realisasi kinerja peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,79 Indeks. Dimana pada tahun 2023 peningkatan kualitas lingkungan hidup Provinsi hanya sebesar 74,26 Indeks meningkat menjadi 75,05 Indeks pada tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,05 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 70,18 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 5,10. Sehingga

IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia.

Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53.98 dengan rating Sedang;

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air. Oleh karena itu Indeks Kualitas Air (IKA) tidak mencapai target RPJMD.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92.12 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU.

Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis adalah sistem untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

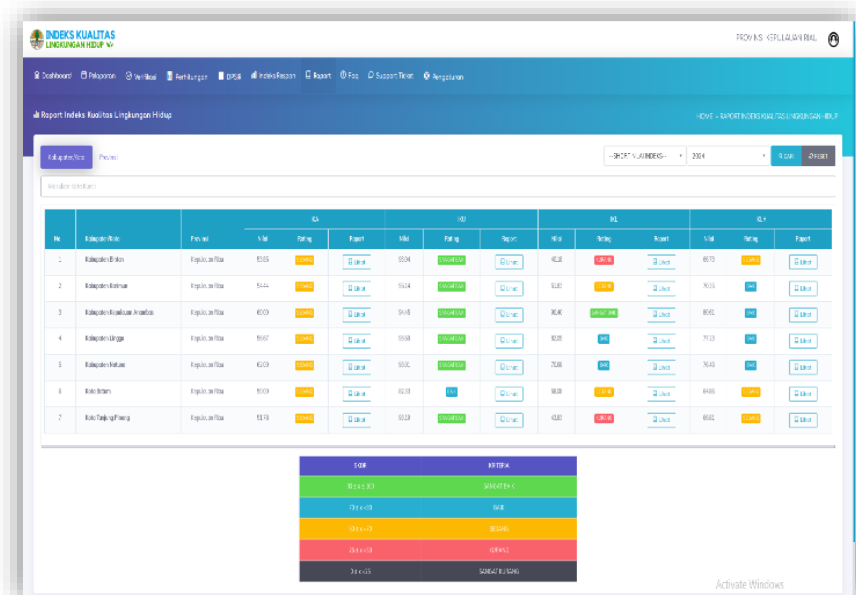
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66.18 dengan rating Sedang;

Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85.53 dengan rating Baik.

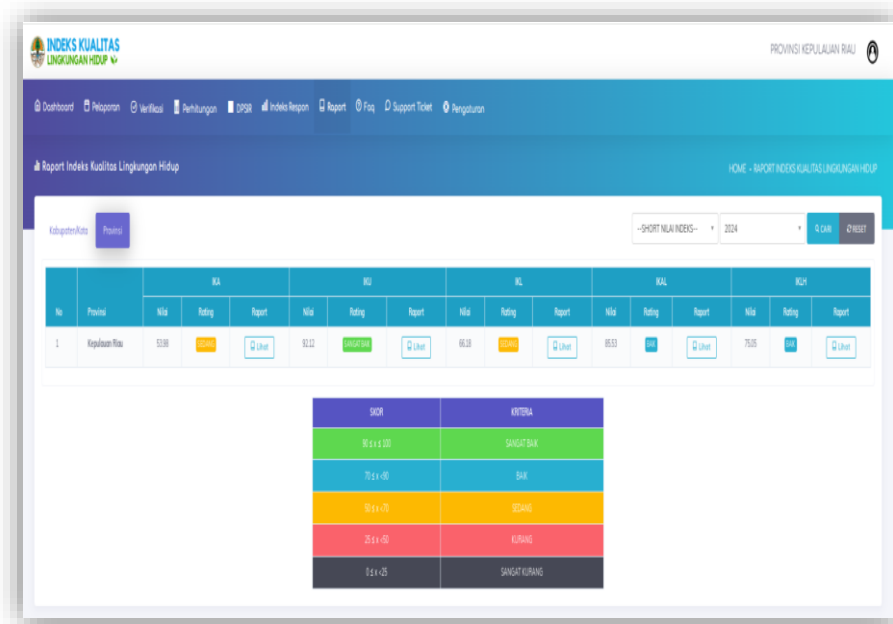
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat (*landbase pollution*).

Gambar 3.3
Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2024



Sumber : DLHK Prov Kepri

Gambar 3.4
Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : DLHK Prov Kepri

Gambar 3.5
Raport Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional Tahun 2024

Indeks	Target		Relisasi		Kriteria
	2023	2024	2023	2024	
IKA	55,4	55,5	54,59	54,78	Sedang
IKU	84,4	84,5	88,67	90,13	Sangat Baik
IKL	64,5	65,5	61,79	61,95	Sedang
IKAL	60	60,5	78,84	81,67	Baik
IKLH	69,48	69,74	72,54	73,53	Baik

Sumber : DLHK Prov Kepri

Dari gambar tersebut diatas, bahwa IKLH Nasional tahun 2024 sebesar 73,53 poin, meningkat 0,99 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2023 (72,54 poin). Nilai IKLH mencapai target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 69,74 poin, hal-hal yang menyebabkan meningkatnya IKLH Nasional antara lain :

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 poin, meningkat 1,46 poin dibandingkan dengan hasil perhitungan tahun 2023 (88,67 poin). Jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udaranya sebanyak 509 kabupaten/kota dan jumlah AQMS yang dibangun sebanyak 78 unit (termasuk *mobile reference* dan *portable*). Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi sebanyak 3.345 industri, meningkat sebanyak 490 industri dibandingkan tahun Sebelumnya.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,78 poin meningkat 0,19 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2023 (54,59 poin). Jumlah titik pantau untuk perhitungan IKA sebanyak 837 dan jumlah onlimo yang dibangun sebanyak 153 titik. Jumlah fasilitas IPAL dan biodigester yang dibangun sebanyak 225 unit dan yang berada di DAS Citarum sebanyak 42 unit, dengan persentase penurunan

beban pencemaran BOD sebesar 0,12% dan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah sebanyak 3.235 industri meningkat sebanyak 382 industri dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 61,95 poin meningkat 0,16 poin dibandingkan hasil perhitungan tahun 2023 (61,79 poin). Penghitungan nilai IKL dikembangkan dari penghitungan IKTL dengan mempertimbangkan dampak dari kanal dan kebakaran di lahan gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 61,96 poin meningkat 0,31 poin dibandingkan tahun sebelumnya (61,65 poin). Pemulihan lahan yang dilakukan seluas 150,43 Ha yang terdapat di 15 lokasi.
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,67 meningkat 2,83 poin dibandingkan tahun lalu (78,84 poin). Pemantauan kualitas air laut dilaksanakan di 386 titik sebanyak 2 kali pemantauan. Pemantauan sampah laut dilakukan di 24 provinsi dengan pemantauan jenis sampah mikroplastik. Pemulihan ekosistem terumbu karang dilaksanakan di 12 lokasi dengan adanya penambahan anggaran dari sumber PNBP.

Gambar 3.6
Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : DLHK Prov Kepri

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Provinsi yaitu penurunan kualitas air laut sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaran dan kerusakan di darat diantaranya disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Kendala juga dihadapi dalam mendukung Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Dalam rangka meningkatkan peningkatan indikator kualitas lingkungan hidup Provinsi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

3. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU) adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau.

Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program-program yang mendukung pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	181.589.541	177.987.091	98.02
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	181.589.541	177.987.091	98.02
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	214.235.911	151.298.245	70.62
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	214.235.911	151.298.245	70.62
3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.385.851.467	1.276.647.767	99.52
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	425.186.300	384.177.286	90.36
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	95.940.000	89.728.803	93.53
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	644.725.167	585.448.878	90.18
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	220.000.000	217.292.800	100
4	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	432.682.670	397.662.602	91,90
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.667.398.387	1.550.334.546	92.97
JUMLAH		3.881.757.976	3.553.930.251	8.4

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.3.881.757.976,- terealisasi sebesar Rp.3.553.930.251.- atau 92%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.327.827.725,- (8,4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (106%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92%) dengan efisiensi 14%.

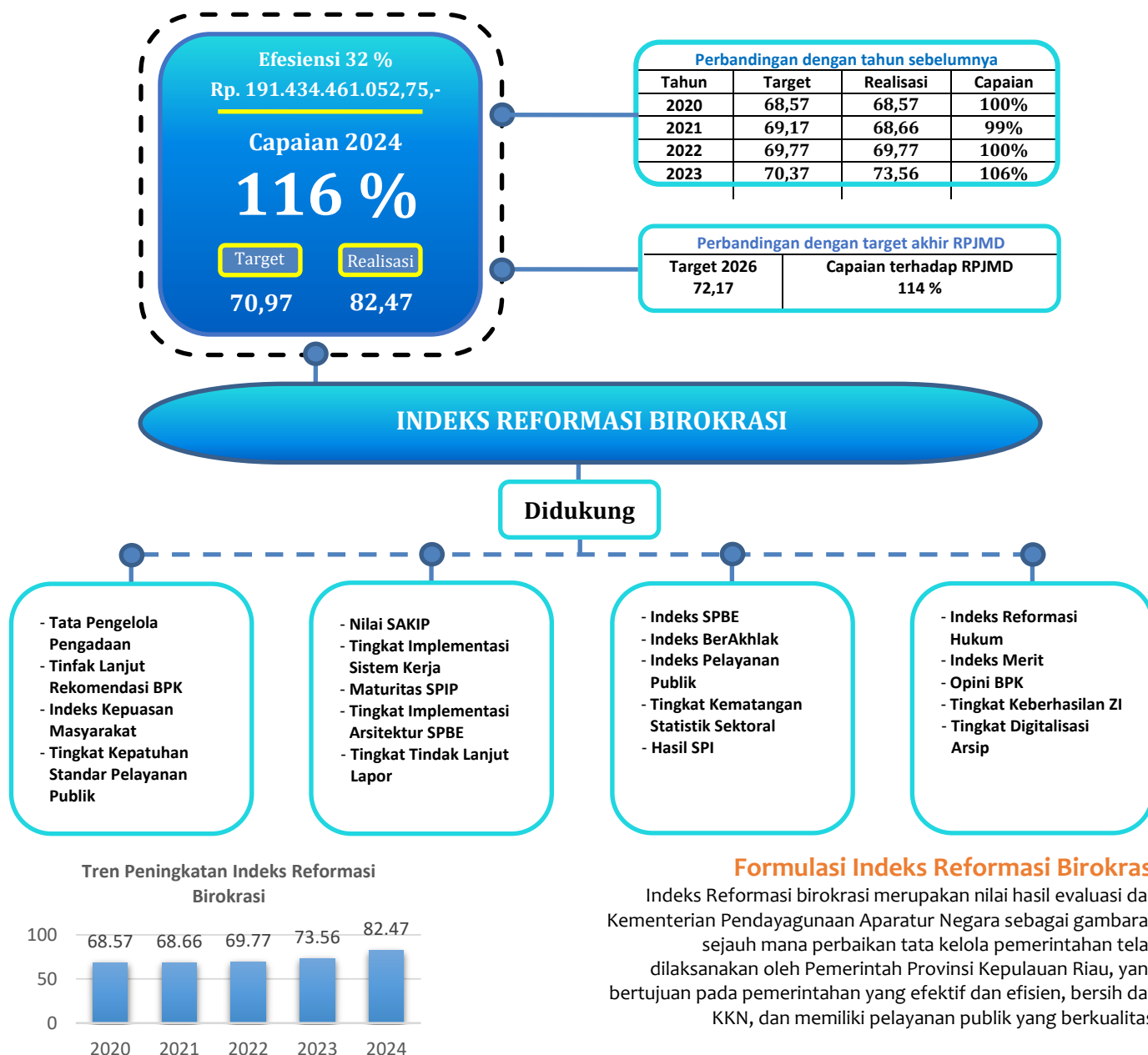
SASARAN :

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **82,47** indeks dari target sebesar **70,97** indeks dan dengan capaian kinerja sebesar **116 %**



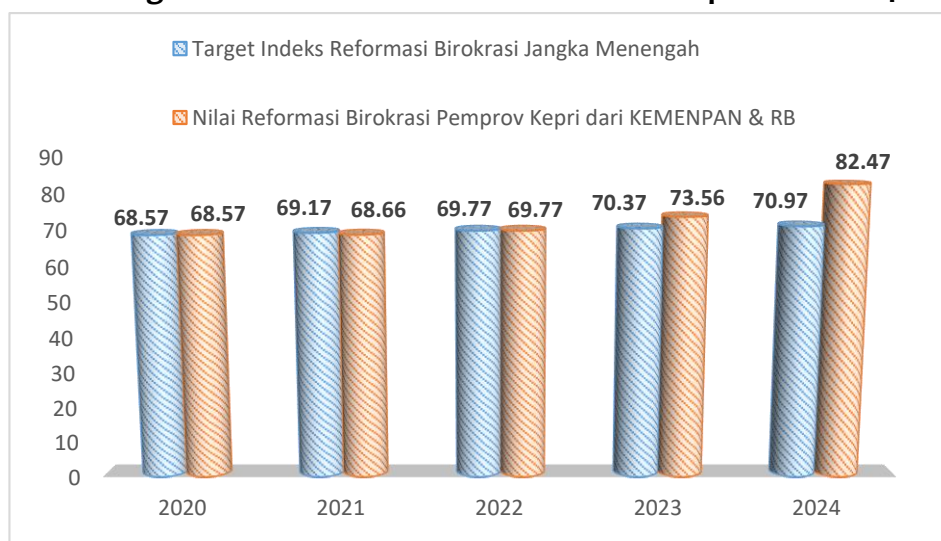
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah upaya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik guna mempercepat proses pembangunan nasional sampai ke daerah. Tata kelola pemerintahan berimplikasi erat pada bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin baik pula pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan dapat terwujud.

Dalam memenuhi Sasaran Strategis RPJMD bidang Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif telah ditetapkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **70,97** pada tahun 2024 dengan capaian realisasi sebesar **82,47** dan capaian kinerja sebesar **116 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Progres capaian RB Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas Capaian kinerja Indeks reformasi birokrasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan sebesar 8,91 indeks .Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 73,56 meningkat menjadi 82,47 pada tahun 2024.

Grafik 3.19
Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Prov. Kepri 2020 -2024



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 82,47 dengan target sebesar 72,17 dengan capaian kinerja sebesar 114 %.

Keberhasilan pencapaian indeks RB Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didukung Tim Pelaksana Reformasi Biorkrasi yang bertugas menyusun rencana aksi dan mengkoordinir ketercapaian sasaran Reformasi Birokrasi general dan Tematik yang terbagi pada beberapa perangkat daerah penanggungjawab.

Berikut disampaikan capaian sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	4	4
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0
	Indeks SPBE	2,74	3,05
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Perencanaan Pembangunan	83,3	91,24
	Nilai SAKIP	76,20	77,87
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	2,50	0,5
	Tingkat Maturitas SPIP	3,4	3,2
	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	3
	Hasil Survei Penilaian Integritas	71	71,66
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	70	96,42
	Indeks Kualitas Kebijakan	70	10
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	90	90,5
	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,7	2,61
Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	91	91,35
	Opini BPK	WTP	WTP
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	88	82,41
Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	330,5	330,5
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien			
Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja			
Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan efisien			
Terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN			
Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN			
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Indeks BerAkhlak	70	73,54
Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	86,11
	Indeks Pelayanan Publik	4.2	4,26
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	87	90,45

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Analisa Capaian Reformasi Birokrasi General

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010– 2025 diterbitkan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan berdasarkan hasil evaluasi Menpan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan perbaikan dokumen perencanaan pelaksanaan RB dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Nomor 485 Tahun 2024 Tentang Penajaman Roadmap Reformasi Birokrasi dengan mempertajam Sasaran, indikator dan target beserta rencana aksi Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2024.

Reformasi General mengarahkan pelaksanaan fokus penyelesaian isu hulu dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Merit Sistem

Upaya yang mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dari segi penataan manajemen kepegawaian dalam penerapan merit sistem dimana Prinsip Sistem Merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan berkomitmen melaksanakan manajemen talenta dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 507 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Manajemen Talenta dan Keputusan Gubernur Nomor 509 Tahun 2024 tentang Jabatan kritikal di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan berjalan manajemen talenta juga telah terlihat dengan dibangun aplikasi Manajemen Talenta yang akan membantu memetakan talenta ASN dalam posisi *Nine Box*.

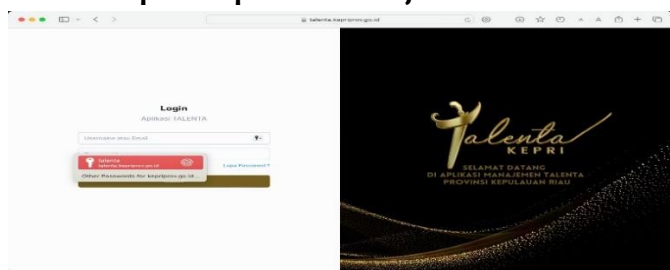
Dalam mewujudkan pelayanan dan pengelolaan informasi kepegawaian yang akurat, terintegrasi, real time dan berkualitas secara sistematis dan terpadu Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan integrasi data aplikasi SIMPEG dengan SI-ASN (Sistem informasi Aparatur Sipil Negara) merupakan Aplikasi Badan Kepegawaian Negara dan sudah sampai pada progres capaian integrasi secara 2 (dua) arah.

Dalam peningkatan kapasitas ASN, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi ASN tahun 2024-2029 telah mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan Coaching bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, memberikan dampak positif baik bagi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya terutama dalam memahami kewajiban pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun dan Implementasi nilai-nilai budaya berakhlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih Peringkat V Lembaga Pelatihan Berprestasi, Kategori Kelompok Lembaga Pelatihan

Gambar 3.7

Tampilan Aplikasi Manajemen Talenta



Sumber : BKD & KORPRI Prov Kepri

Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Kompetisi Penghargaan Lembaga Pelatihan Berprestasi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh LAN.

Gambar 3.8
Daftar Provinsi Pelatihan Berprestasi Tahun 2024

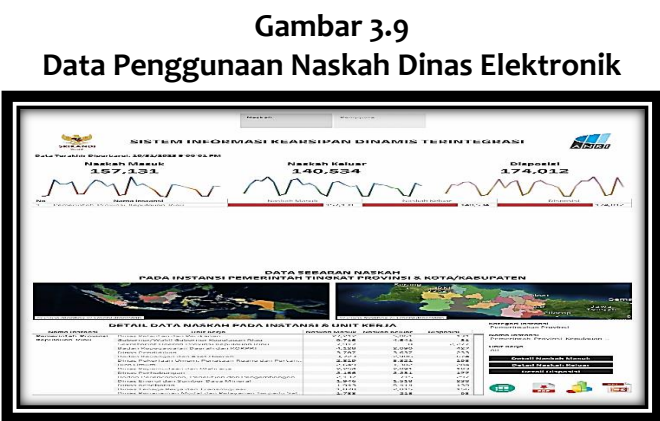


Sumber : LAN Republik Indonesia

2. Digitalisasi Arsip

Upaya penataan digitalisasi arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan seluruh proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip dan pemeliharaan arsip.

100% perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas pada aplikasi bidang kearsipan dinamis dan telah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN RI.



Sumber : Dinas Perpustakaan & Arsip Prov Kepri

3. Statistik Sektoral

Upaya lain dalam penerapan Reformasi Birokrasi dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 476 Tahun 2024 tentang Daftar Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau serta penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Tahun 2024 Koordinator Satu Data Indonesia (SDI) Provinsi Kepulauan Riau (BAPELITBANG) bersama Walidata (Diskominfo) dan Pembina Data (BPS) menyusun Daftar Data Prioritas Provinsi Kepulauan Riau dan telah terbit Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 400 Tahun 2024 Tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sesuai Keputusan Kepala Badan Statistik RI Nomor 605 Tahun 2024.

Tabel 3.17
Hasil Penyelenggaraan Statistitk Sektoral

Domain	Bobot	Tahun 2024	
		Nilai nasional	Hasil
Prinsip Satu Data	28 %	2,43	2,75
Kualitas Data	24 %	2,27	2,51
Proses Bisnis Statistik	19 %	2,47	2,79
Kelembagaan	17 %	2,32	2,48
Statistik Sektoral	12 %	2,20	2,44
Indeks Pembangunan Statistik	100 %	2,35	2,61

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri



4. Pelayanan Publik

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Provinsi Kepri Tahun 2024 melaksanakan Sosialisasi PEKPPP 2024 bagi lokus evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten /Kota yang disejalankan dengan kegiatan Sosialisasi Bersama Kebijakan Bidang Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta pendampingan terhadap unit kerja yang masih memiliki kelemahan terhadap 6 aspek dan 30 indikator yang akan dievaluasi.

Grafik 3.20

Tren Capaian Indeks Pelayanan Publik Prov Kepri Tahun 2020-2024

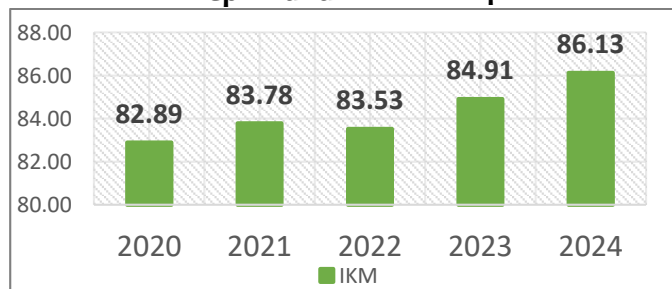


Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah. Hasil pelaksanaan SKM pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai rata-rata IKM mencapai 86,13.

Grafik 3.21

Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Prov Kepri Tahun 2020-2024



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan mal administrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, penyediaan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi pelaksana layanan, serta pengelolaan pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik pusat maupun daerah.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan hasil yang diperoleh adalah Nilai 90,45 (Zona Hijau), Kategori A (Kualitas Tertinggi).

Gambar 3.10

Piagam Penghargaan Ombudsman



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat nilai 90,45, Zona Hijau, Kualitas Tertinggi



Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 95,85, Zona Hijau, Opini Kepatuhan Tinggi



Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 92,67, Zona Hijau Opini Kepatuhan Tertinggi



Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 92.39, Zona Hijau, Opini Kepatuhan Tertinggi

5. Indeks BerAkhlak

Gambar 3.11
Penandatanganan Komitmen BerAkhlak



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Upaya yang dilakukan dalam penerapan Budaya Kerja Berakhlak Pimpinan dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak, salah satu upaya yang telah dilakukan :

- Penandatanganan Komitmen penerapan nilai-nilai Budaya kerja Berakhlak
- Membentuk memberdayakan Agen Perubahan sebagai pelopor dan penggerak perubahan pada perangkat daerah
- Melaksanakan internalisasi nilai-nilai budaya kerja melalui seminar dan coaching
- Publikasi dalam rangka pengenalan budaya kerja melalui beberapa media
- Melaksanakan *sharing knowledge*

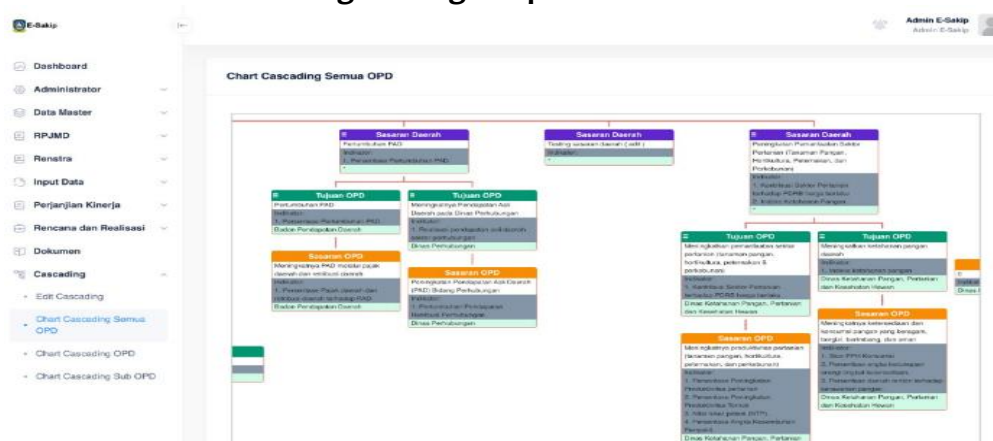
6. Nilai SAKIP

Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap penerapan SAKIP di lingkungan Provinsi sudah menunjukkan perkembangan yang baik dengan predikat BB. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan atas kerjasama Tim Sakip yang terdiri dari Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan, Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi merumuskan konsep Peraturan Gubernur tentang Pedoman Implementasi SAKIP dengan

harapan terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan kesinambungan mulai dari perencanaan strategis, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan evaluasi AKIP

Dalam rangka mendukung proses penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah telah dikembangkan Sistem Informasi Penyelenggaraan SAKIP yang selanjutnya disebut e-SAKIP.

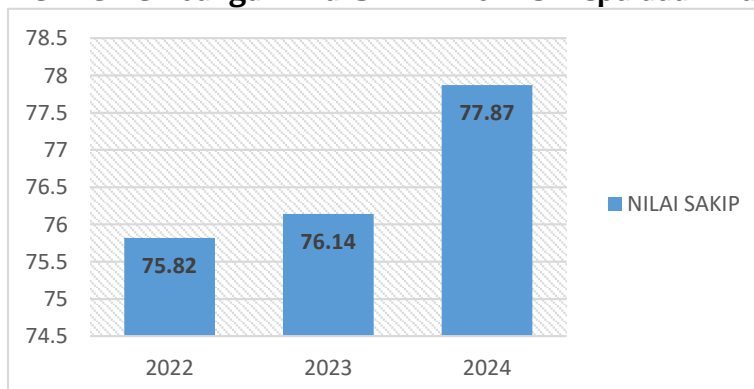
Gambar 3.12
Pengembangan Aplikasi E-SAKIP



Sumber : Diskominfo Prov Kepri

Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan dengan melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi secara konsisten, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.22
Tren Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

7. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) sebesar 91.35 poin dengan predikat ITKP sangat Baik. Perolehan nilai tersebut menempatkan Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke III Nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi. Poin ini meningkat sebesar 1.24 dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Pemenuhan Kebutuhan pengelola pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana aksi

2. Peningkatan Kompetensi SDM: Melalui pelatihan dan sertifikasi

3. Peningkatan Kematangan UKPBJ

4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan secara Elektronik

5. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

6. Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN):

8. Laporan Keuangan Predikat WTP

Dalam upaya pencapaian predikat WTP Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 190 ayat 3 menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa upaya yang telah dilakukan :

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu
- 2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
- 3) Penguatan Sistem Pengendalian Internal
- 4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dilakukan dengan cara membuka akses bagi masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran daerah melalui sistem informasi yang mudah diakses.
- 5) Penggunaan Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Keuangan.

Gambar 3.13
Penyerahaan Penghargaan Predikat WTP



Sumber : BKAD Prov Kepri

9. Indeks SPBE

Pencapaian sasaran “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis

teknologi informasi yang terintegrasi” dapat diukur dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau.

Pada tahun 2024 Indeks SPBE didapat dari hasil penilaian dengan menggunakan instrument SPBE. Struktur penilaian SPBE dibagi atas 4 domain, 8 aspek, dan 47 indikator penilaian yang masing-masing diberi bobot.

Evaluasi terhadap indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah penjumlahan bobot masing-masing domain. Dari hasil penjumlahan bobot masing-masing domain tersebut didapat indeks SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,05 (Kategori Baik).

10. Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur terhadap risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) dan sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik. Tujuan SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian SPI yang dilakukan oleh KPK-RI tahun 2024, diketahui bahwa nilai SPI Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 71,66 dan berada pada kategori “Rentan”.

Jika dibandingkan dengan capaian SPI tahun 2023 dengan capaian sebesar 70,58, terjadi peningkatan capaian sebesar 1,08. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan risiko korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

11. Zona Integritas

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan penancangan Zona Integritas pada 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan Rumah Sakit Engku Haji Daud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional terhadap 4 (empat) unit kerja yang diusulkan tersebut, belum ada unit kerja yang memenuhi persyaratan untuk mendapat predikat WBK/WBBM. Kelemahan yang dapat diidentifikasi dari implementasi pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja tersebut antara lain :

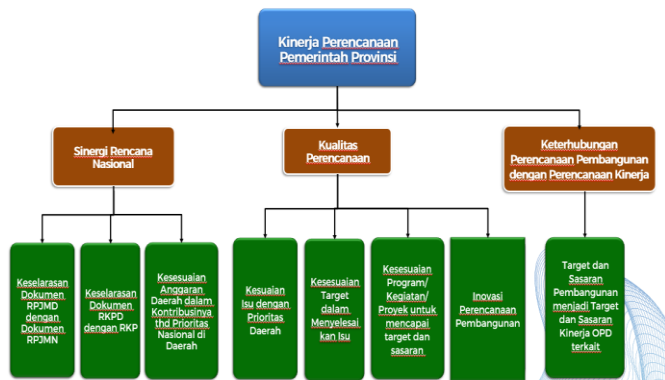
- Perbaiki SOP terutama terkait Pelayanan Publik dan dilakukan pemantauan secara berkala
- Identifikasi risiko terkait integritas sebagai dasar dalam pengembangan inovasi belum optimal
- Belum dilakukan identifikasi permasalahan dan harapan dari stakeholder.
- Belum optimalnya Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI pada unit kerja yang telah dicanangkan.

12. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan tools yang digunakan untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan money follow program yang

dilakukan secara tematis, holistik, integratif dan spasial (THIS). Hasil penilaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat total nilai sebesar 91,24 atau kategori Sangat Baik, namun masih terdapat catatan diantaranya belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan outcome inovasi dalam perencanaan pembangunan.

Gambar 3.14
Hierarki IPPN Pemerintah Provinsi



Sumber : Barenlitbang Prov Kepri

13. Indeks Reformasi Hukum

Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai alat untuk mengukur reformasi hukum di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan surat dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Nomor PPH-OT.03.03-276 Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan Nilai 96,42 dengan kategori AA (istimewa)

Penilaian Indeks Reformasi Hukum dinilai berdasarkan proses penyusunan produk hukum, penilaian ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam melakukan pengharmonisasian proses terbentuknya produk hukum

Data-data yang didapat berdasarkan data-data saat dilakukan pemahasan produk hukum dan hasil koordinasi bersama kementerian teknis terkait berupa hasil harmonisasi dan fasilitasi

Berdasarkan beberapa hal uraian ketercapaian reformasi general tersebut diatas,

masih terdapat Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general sebagai berikut :

1. Dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) belum terdapat unit kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) .
2. Pengelolaan Aset Daerah yang Belum Optimal Meski Perangkat yang menangani pengelolaan aset telah melakukan upaya untuk memperbaiki pengelolaan dan inventarisasi aset daerah, masih ada tantangan dalam mencocokkan data aset yang tercatat di sistem dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan aset yang belum sepenuhnya optimal, seperti aset yang tidak terdaftar dengan jelas, hilang, atau tidak tercatat dengan baik dalam laporan keuangan, dapat menimbulkan temuan yang merugikan dan menghambat pencapaian opini WTP.
3. Belum adanya Rencana Induk TIK dan arsitektur SPBE serta Belum memiliki Road Map SPBE;
4. Capaian Indeks Kualitas Kebijakan masih masih kurang;
5. Nilai SPIP masih dalam kategori rentan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RB General, Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan rencana tindak sebagai berikut :

1. Perbaikan mendasar pada area-area rawan korupsi untuk memperbaiki citra publik terhadap upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Penguatan pendampingan dalam pembangunan Zona Integritas, khususnya pada Unit Pelayanan Publik.
3. Peningkatan kompetensi SDM terkait manajemen risiko.

4. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
5. Mengidentifikasi kebijakan dan penguatan tim kerja penilaian IKK.
6. Penguatan peran Agen Perubahan dalam penerapan budaya kerja ASN BerAhklak.

Capaian kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91% . Dimana pada tahun 2023 penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 5,69% turun menjadi 4,78% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 114,18% dengan target sebesar 5,57 % dengan capaian 5,57% dengan capaian kinerja sebesar 4,78%.

Analisa Capaian Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan tema RB Tematik sebagaimana yang diamanatkan sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Penanganan Inflasi
4. Penurunan Stunting
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berikut informasi pencapaian Sasaran Reformasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target	Capaian
Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5.69	4,78
Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi	19.609 (Miliar Rupiah)	30.820 (Milyar Rupiah)
Penanganan Inflasi	Laju Inflasi	(2.25)±1	2.09
Penurunan stunting	Pravelensi Stunting	14	16,8
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Nilai P3DN	90	83,97

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Kepri

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja indikator angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 115,99% dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar 5,69% dengan capaian realisasi sebesar 4,78% atau dalam kategori SANGAT BAIK.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Namun jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di Pulau Sumatera, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada para urutan ke-4 dengan nilai sebesar 4,78% yang didominasi oleh Provinsi Bali sebesar 3,8%.

Tabel 3.19
Perbandingan Penduduk Miskin Se-Indonesia
Semester II Tahun 2024

NO URUT	PROVINSI	PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2 (%)
1	BALI	3,8
2	KALIMANTAN SELATAN	4,02
3	DKI JAKARTA	4,14
4	KEP. RIAU	4,78
...	...	...
38	PAPUA PEGUNUNGAN	29,66
	INDONESIA	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam penurunan angka kemiskinan sebagai berikut :

1. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, menghambat distribusi barang dan layanan, serta akses masyarakat terhadap program-program pengentasan kemiskinan.
2. Tantangan dalam Pendataan: Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat miskin dapat menghambat pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Program-program tersebut harus didasarkan pada data yang akurat agar efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024.

Bantuan sosial ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan adalah

peningkatan kesejahteraan melalui program ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk bantuan peralatan usaha, yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem.

2. Peningkatan Realisasi Investasi

Target capaian nilai realisasi investasi dan persentase peningkatan nilai realisasi investasi provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Target Capaian Nilai dan Presentase Realisasi
Investasi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024-2026

Indikator	Target		
	2024	2025	2026
Capaian Nilai Realisasi Investasi	3,68 %	3,55 %	3,42 %
Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi	19,6 Triliun	20,3 Triliun	21 Triliun

Sumber : Dokumen Renstra DPMPTSP Prov Kepri

Dalam rangka percepatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau, DPMPTSP didukung berbagai program dan kegiatan dengan dua bidang utama yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan berusaha. Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman
Modal Asing (PMA) per Kab/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	PMA (Rp.)
1	Batam	13,24 Triliun
2	Karimun	210,9 Miliar
3	Bintan	9,81 Triliun
4	Anambas	6,69 Miliar
5	Tanjungpinang	49,2 Miliar
6	Lingga	54,8 Miliar
7	Natuna	7,06 Miliar
TOTAL		23,39 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Prov Kepri

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau berfokus kepada sektor-sektor utama yang menjadi andalan. Adapun 5 (lima) sektor utama yang menjadi capaian nilai investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Sektor Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Sektor	Realisasi Investasi (Rp)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	5,44 Triliun
2	Industri Makanan	5,22 Triliun
3	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	2,39 Triliun
4	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2,15 Triliun
5	Industri Karet dan Plastik	947 Miliar
6	Sektor Lainnya	7,24 Triliun
TOTAL		23,39 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Prov Kepri

Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	PMDN (Rp.)
1	Batam	5,99 Triliun
2	Karimun	307,4 Miliar
3	Bintan	690,5 Miliar
4	Anambas	5,94 Miliar
5	Tanjungpinang	377,3 Miliar
6	Lingga	8,01 Miliar
7	Natuna	46,9 Miliar
TOTAL		7,42 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Prov Kepri

Capaian Nilai Realisasi Investasi terdiri dari Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 mengalami kontraksi positif dibanding tahun 2023.

Tabel 3.24
Capaian Nilai Realisasi Investasi per Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (TW III Tahun 2024)

No	Kabupaten/Kota	Nilai Realisasi Investasi (Rp.)
1	Batam	19,23 Triliun
2	Karimun	518,3 Miliar
3	Bintan	10,5 Triliun
4	Anambas	12,63 Miliar
5	Tanjungpinang	426,5 Miliar
6	Lingga	62,81 Miliar
7	Natuna	53,96 Miliar
TOTAL		30,82 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Prov Kepri

Capaian realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang cukup unik, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Target dan Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025

Thn	Target Provinsi / RPJMD (Rp)	Target Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM (Rp)	Nilai Realisasi Investasi (Rp)
2020	23,7 Triliun	46 Triliun	38 Triliun
2021	25 Triliun	44,1 Triliun	25 Triliun
2022	18,2 Triliun	50,3 Triliun	18,22 Triliun
2023	20,1 Triliun	26,4 Triliun	20,16 Triliun
2024	19,6 Triliun	35,3 Triliun	30,82 Triliun

Sumber : Bidang Data DPMPTSP Prov Kepri

Dalam rangka peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Peraturan Daerah Pemberian Fasilitas Insentif/Kemudahan Berusaha bagi para pelaku usaha

2. Pengawasan pelaporan LKPM kepada para pelaku usaha
3. Bimbingan dan Pelatihan penggunaan aplikasi OSS (Online Single Submission) kepada para pelaku usaha.
4. Penyelesaian permasalahan dan perselisihan penanaman modal antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, dan pelaku usaha dengan masyarakat.

3. Penanganan Inflasi

Pada bulan Desember 2024, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 0,68% (mtm). Secara spasial, Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Batam sebesar 2,24 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,71 dan terendah terjadi di Kota Tanjungpinang sebesar 1,53 % dengan IHK sebesar 105,73. Sedangkan Kabupaten Karimun inflasi y-on-y sebesar 1,57 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,42.

Dengan demikian, secara tahunan, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2,09% (yoy) atau secara tahun kalender tercatat sebesar 2,09% (ytd).

Adapun komoditas utama penyebab Inflasi Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,46 %; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,11 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,65 %; kelompok kesehatan naik sebesar 4,24 %; kelompok transportasi naik sebesar 2,13 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,38 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,42 %; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 7,53 %.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sebesar 0,22 %; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,10 %; serta kelompok pendidikan turun sebesar 1,84 %.

Tabel 3.26

IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

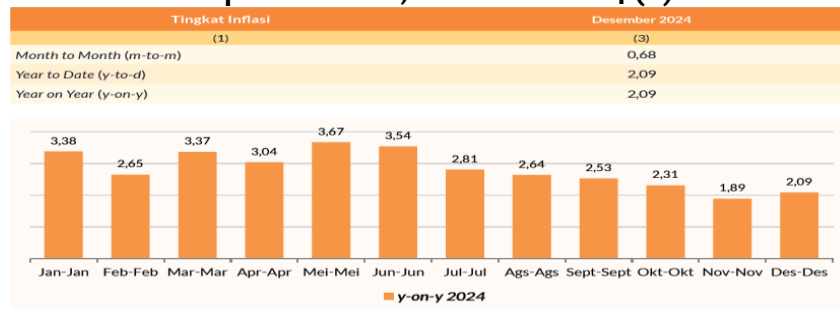
Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Desember 2024 ¹ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Desember 2024 ² (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Desember 2024 ³ (%)	Andil Inflasi m-to-m Desember 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	105,15	107,35	0,68	2,09	2,09	0,68	2,09
Makanan, Minuman, dan Tembakau	107,66	110,31	2,05	2,46	2,46	0,61	0,72
Pakaian dan Alas Kaki	104,12	106,32	-0,14	2,11	2,11	-0,01	0,10
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,51	105,23	0,03	2,65	2,65	-0	0,42
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,82	101,60	-0,05	-0,22	-0,22	-0	-0,01
Kesehatan	99,88	104,11	0,12	4,24	4,24	-0	0,10
Transportasi	110,51	112,86	0,53	2,13	2,13	0,07	0,30
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,07	99,97	-0	-0,10	-0,10	-0	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,69	102,08	-0	0,38	0,38	-0	0,01
Pendidikan	104,15	102,23	-0	-1,84	-1,84	-0	-0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	101,58	103,02	0,02	1,42	1,42	-0	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,83	114,87	0,11	7,53	7,53	0,01	0,46

Catatan: ¹Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK November 2024, ²Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023, ³Persentase perubahan IHK Desember 2024 terhadap IHK Desember 2023
~0: Data sangat kecil/mendekati 0

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024



Tabel 3.27
IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Provinsi Kepulauan Riau, Desember 2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain:

1. Meningkatnya harga sejumlah komoditas makanan didorong oleh peningkatan permintaan pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru);
2. Meningkatnya curah hujan di tengah kondisi pasokan makanan yang relative terbatas;
3. Kenaikan tarif angkutan udara seiring peningkatan permintaan terhadap jasa angkutan udara menjelang liburan akhir tahun;
4. Kenaikan harga emas perhiasan yang masih berlanjut sejalan dengan perkembangan harga komoditas secara global;
5. Kenaikan Harga Ikan di Provinsi Kepulauan Riau lantaran nelayan tidak melaut karena angin kuat, sehingga membuat stok ikan berkurang;
6. Kenaikan Harga Komoditas mengalami peningkatan terutama kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,72 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,42 %; kelompok

kesehatan sebesar 0,10 %; kelompok transportasi sebesar 0,30 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 %; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,46 %. Sedangkan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on- y, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 %; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 %; dan kelompok pendidikan sebesar 0,13 %

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinergi program melalui rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau;
2. Bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif);

3. Pemantauan ketersediaan dan harga bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru);
4. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi Kepulauan Riau
5. Dukungan bantuan sarana dan prasarana untuk Toko Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau dan Kedai Pangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Karimun dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan;
6. Pelaksanaan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Provinsi Kepulauan Riau;
7. Melanjutkan panen Gerakan Sekolah Menanam (GSM) secara mandiri oleh setiap sekolah peserta GSM 2024;
8. Penyaluran bantuan sarana prasarana pendukung pertanian kepada Kelompok Tani

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Koordinasi dan sinergi program melalui Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kepulauan Riau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan normalisasi harga komoditas emas secara global;

4. Normalisasi permintaan pasca periode liburan akhir tahun;
5. Diskon tarif listrik untuk wilayah di luar Kota Batam sebesar 50% kepada konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil dengan daya hingga 2.200 VA selama bulan Januari - Februari 2025;

4. Penanganan Stunting

Stunting adalah Keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya (-2 SD Median) di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat.

Indikator keberhasilan Penanganan Stunting adalah Prevalensi stunting dengan definisi jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U -3 SD < -2 SD).

Evaluasi capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prevalensi Stunting	15,3	16,8*	85%

Sumber : Dinkes Kepri

Tabel 3.29
Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	BALI	10,9	8	7,2	7,2
2.	JAMBI	22,4	18	13,5	13,5
3.	RIAU	22,3	17	13,6	13,6
6.	LAMPUNG	18,5	15,2	14,9	14,9
5.	KEP RIAU	17,6	15,4	16,8	16,8
	INDONESIA	24,4	21,6	21,5	21,5

Sumber : Dinkes Prov Kepri 2024

Analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi spesifik, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target :

1. Pemantauan pertumbuhan, Cakupan penimbangan balita di Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong rendah. Capaian penimbangan pada tahun 2023 79,57% sedangkan target yang ditetapkan yaitu 85%.
2. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif tahun 2023 adalah 68,9%, prevalensi ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 75%
3. Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting tahun 2023 adalah 85,6%.
4. ANC (*Ante Natal Care*) yang belum berkualitas

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penurunan angka Stunting sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
2. Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
3. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB
4. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
5. Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan.

6. Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
7. Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Penggunaan Produk Dalam Negeri, ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. Penggunaan produk dalam negeri pada PBJ diwajibkan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, difasilitasi oleh Vitka Learning Center (VLC) melakukan pelatihan “Pengolahan Pangan”, Pelatihan Diversifikasi Produk One Village One Product (OVOP).

Upaya lain dalam mendukung peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelatihan perhitungan TKDN bagi ASN di lingkup 43 Perangkat Daerah.

Ketercapaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dilihat dari realisasi atas komitmen penggunaan produk dalam negeri mencapai 83,97 %.

Provinsi Kepulauan Riau berhasil mendapatkan menjadi Pemerintah Daerah terbaik keempat se-Indonesia dalam penggunaan produk dalam negeri.

Tabel 3.30
Rekapitulasi Realisasi Belanja Barang & Jasa PDN
Periode 01 JAN s.d. DES 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TOTAL PERENCANAAN PDN	TOTAL PELAKSANAAN PDN	TOTAL PEMBAYARAN PDN (REALISASI)	KET
1	Dinas Pendidikan	51,834,567,117.36	371,271,853,649.37	371,271,853,649.37	82.17%
2	Dinas Kesehatan	186,306,865,531.00	170,307,843,683.00	170,307,843,683.00	91.41%
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	140,308,553,534.71	139,054,554,872.50	139,054,554,872.50	99.11%
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	245,821,706,745.03	147,533,788,300.00	147,533,788,300.00	60.02%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,774,362,112.00	4,678,707,382.36	4,678,707,382.36	98.00%
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	12,376,559,612.00	10,040,028,340.00	10,040,028,340.00	81.12%
7	Dinas Sosial	16,945,881,860.00	15,934,940,712.40	15,934,940,712.40	94.03%
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6,432,605,732.00	5,834,615,454.00	5,834,615,454.00	90.70%
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,914,640,943.00	10,845,439,304.00	10,845,439,304.00	72.72%
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan	21,886,040,685.00	11,949,436,341.00	11,949,436,341.00	54.60%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10,225,325,040.00	8,039,991,861.00	8,039,991,861.00	78.63%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,736,406,299.00	6,321,194,237.00	6,321,194,237.00	93.84%
13	Dinas Perhubungan	33,080,101,759.73	31,339,518,980.49	31,339,518,980.49	94.74%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,540,694,365.80	19,208,215,624.00	19,208,215,624.00	98.30%
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,887,545,619.00	7,945,439,666.00	7,945,439,666.00	89.40%
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,466,801,664.00	4,219,799,387.00	4,219,799,387.00	94.47%
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12,972,098,630.00	12,267,399,495.00	12,267,399,495.00	94.57%
18	Dinas Kebudayaan	6,496,988,800.00	6,533,868,902.00	6,533,868,902.00	100.57%
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,941,732,936.00	7,634,435,097.00	7,634,435,097.00	96.13%
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	44,089,442,909.00	42,464,926,999.83	42,464,926,999.83	96.32%
21	Dinas Pariwisata	16,378,821,906.75	16,074,790,618.00	16,074,790,618.00	98.14%
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	21,714,181,511.00	11,815,169,673.41	11,815,169,673.41	54.41%
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,081,880,726.65	11,194,568,672.00	11,194,568,672.00	101.02%
24	Sekretariat Daerah	175,786,502,535.17	154,446,301,196.90	154,446,301,196.90	87.86%
25	Sekretariat DPRD	112,942,658,943.00	101,582,705,451.00	101,582,705,451.00	89.94%
26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12,830,065,929.00	12,742,740,094.00	12,742,740,094.00	99.32%
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	37,248,068,033.10	35,306,203,288.31	35,306,203,288.31	94.79%
28	Badan Pendapatan Daerah	46,454,461,791.00	34,732,167,027.00	34,732,167,027.00	74.77%
29	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri	3,234,196,961.00	3,206,170,317.00	3,206,170,317.00	99.13%
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4,898,463,059.00	4,668,184,570.00	4,668,184,570.00	95.30%
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1,227,459,878.00	1,220,854,020.00	1,220,854,020.00	99.46%
32	Badan Penghubung Daerah	14,529,614,928.00	13,854,076,722.00	13,854,076,722.00	95.35%
33	Inspektorat Daerah	18,418,796,224.00	17,117,547,058.00	17,117,547,058.00	92.94%
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,463,857,456.25	17,471,804,685.00	17,471,804,685.00	106.12%
	JUMLAH	1,749,247,951,777	1,468,859,281,681	1,468,859,281,681	83.97%

Sumber : Biro PBJ Prov Kepri

Tabel 3.31

Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi General Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN TAHUN APBD-P TAHUN 2024	REALISASI ANGGARAN TW 4	CAPAIAN
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital Yang Lincah, Kolaboratif, Dan Akuntabel					
1	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	44,001,354.75	43,140,252	98.04
2	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE (%)	28,713,172	27,579,672	96.05
		Indeks SPBE			
3	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegritasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,311,515,018	2,295,687,748	99.32
		Nilai SAKIP	2,485,818,027	2,434,438,654	97.93
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	22,148,115	21,600,000	97.53
		Tingkat Maturitas SPIP	43,408,800	43,408,800	100.00
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	110,369,082	104,214,171	94.42
		Hasil Survei Penilaian Integritas	603,078,000	466,220,931	77.31
5	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi	Indeks Reformasi Hukum	336,829,104	333,855,120	99.12
		Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Tingkat Digitalisasi Arsip	3.345.000	3.345.000	100
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82,222,400	73,742,382	89.69
7	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Indeks Tata Kelola Pengadaan	15,428,600	15,270,000	98.97
		Opini BPK	2,842,414,447	2,076,918,859	73.07
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	1,746,723,700	866,102,045	49.58
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAkhlak Dengan ASN Yang Profesional					
1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Indeks Sistem Merit	39,406,500	38,805,911.00	98.48
2	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien		-	-	-
			-	-	-
3	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja		36,982,200	35,455,896	95.87

4	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan fisien		446,278,409	444,282,929	99.55
5	Terwujudnya percepatan tranformasi digital manajemen ASN		20,532,820	20,172,020	98.24
6	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN		2,600,737,258	2,287,377,738	87.95
7	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Sistem Merit Dan Sistem Manajemen ASN	Indeks BerAkhlak	607,527,764	598,149,455	98.46
8	Terwujudnya pelayanan publik secara prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	-	-	-
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-
			59,044,564	42,909,507	72.67
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	-	-	-
JUMLAH			14,896,425,134,75	12,678,905,347	85.11%

Sumber : Portal RB Tahun 2024

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Reformasi Birokrasi Tematik
Provinsi Kepulauan Riau

NO	Tema	Indikator	ANGGARAN TAHUN 2024 SESUAI APBD-P	REALISASI ANGGARAN TW IV	CAPAIAN
1	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	122,545,130,080	101,650,723,015	82.95
2	Pengendalian Inflasi	Laju Inflasi	40,942,172,965	35,424,555,185	86.52
3	Peningkatan Realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1,786,447,063	1,559,904,002	87.32
4	Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)	Prevalensi stunting	11,185,549,010	8,766,315,399	78.37
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Realisasi penggunaan produk dalam negeri	476,982,600	244,830,400	51.33
JUMLAH			176,936,281,718	147,646,328,001	83.45%

Sumber : Portal RB Tahun 2024

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.191.832.706.852,75,- terealisasi sebesar Rp.160.325.233.348,- atau 84%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.31.507.473.504,75 (16%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja indeks Reformasi Birokrasi (116%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (84%) dengan efesiensi 32%.

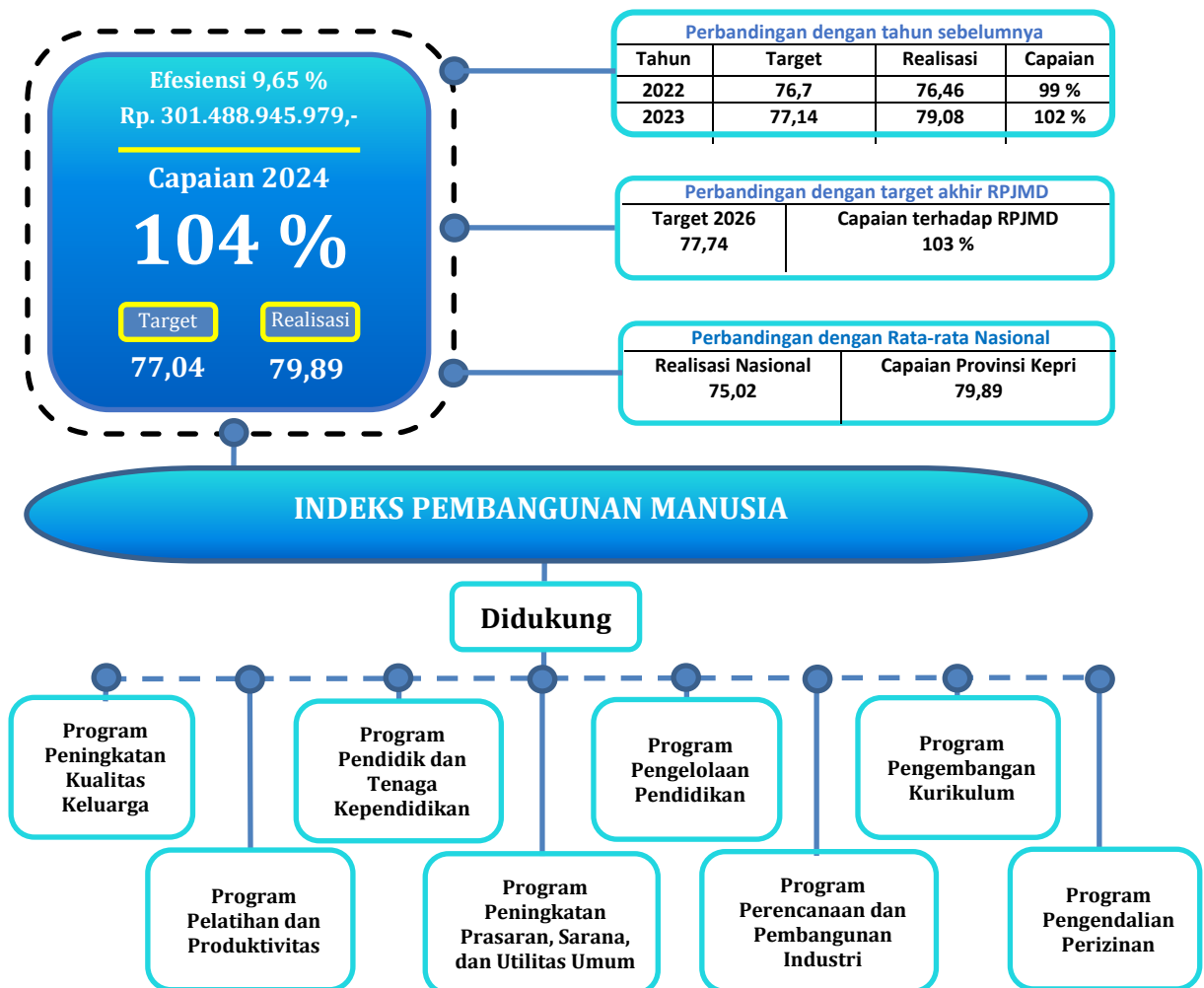
SASARAN :

Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter

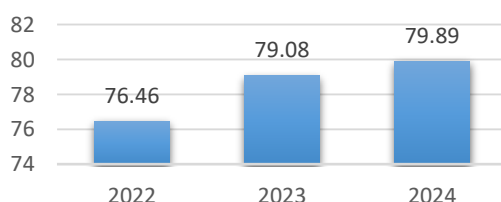
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Masyarakat Kepulauan Riau harus memiliki keunggulan agar mampu mengelola sumber daya pembangunan dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter SDM harus memperoleh pendidikan bermutu dan kualitas hidup yang sehat. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 sudah Sangat Baik dengan realisasi kinerja sebesar **79,89** dari target sebesar **77,04** dan sehingga capaian kinerja **104%**.



Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia



Formulasi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **79,89** Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **77,04** Indeks dengan capaian kinerja sebesar **104 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia diperoleh melalui hal-hal sebagai berikut:

a. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

c. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya. Adapun pengelompokan tersebut adalah:

1. sangat tinggi: $IPM \geq 80$
2. tinggi: $70 \leq IPM < 80$
3. sedang: $60 \leq IPM < 70$
4. rendah: $IPM < 60$

Peningkatan IPM Kepulauan Riau 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi

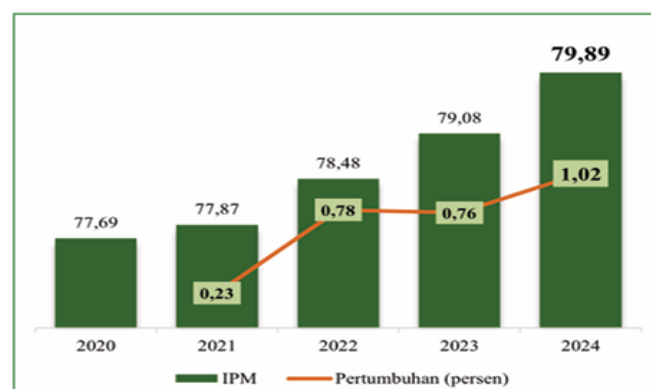
penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 3.33
Capaian Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator	Nilai
1	Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	75,12
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,27
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,50
4	Pengeluaran riil perkapita per tahun yang disesuaikan (ribu rupiah)	15.573
Indeks Pembangunan Manusia		79,89

Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Grafik 3.23
Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

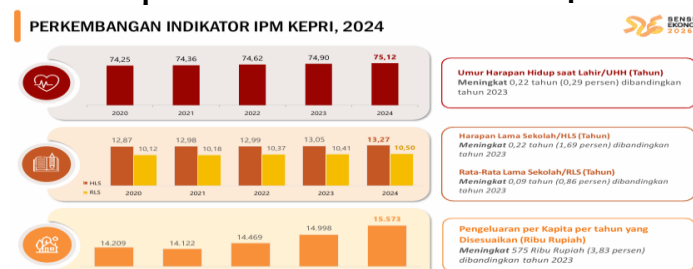


Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 77,69 pada tahun 2020 menjadi 79,89 pada tahun 2024. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM

“tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)” dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,70 persen per tahun.

Tabel 3.34
Perkembangan Indikator IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH saat Lahir di Kepulauan Riau sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun atau mengalami kenaikan 0,29 persen dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020).

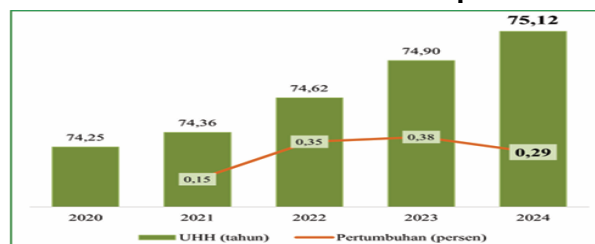
Pada dimensi pengetahuan, HLS Kepulauan Riau sebesar 13,27, artinya penduduk berusia 7 tahun ke atas pada tahun 2024 memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga kuliah tahun pertama. Angka ini meningkat 0,22 tahun atau tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun 2023.

Selain itu, RLS Kepulauan Riau sebesar 10,50, artinya jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal sebesar 10,50 tahun atau sebanding dengan SMA/ sederajat di kelas X sampai kelas XI. RLS ini meningkat 0,09 tahun atau tumbuh 0,86 persen dibandingkan tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang

disesuaikan per tahun yang disesuaikan di Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar Rp. 15.573.000, meningkat Rp. 575.000 atau tumbuh 3,83 persen dibandingkan tahun 2023. Sumber data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

Grafik 3.24
Perkembangan UHH IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024

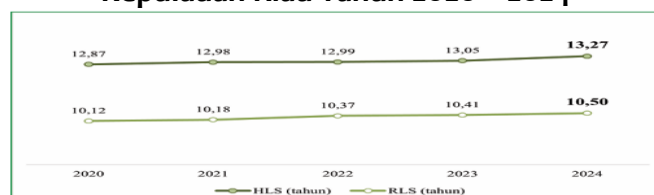


Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Untuk meningkatkan kualitas data, pada tahun 2023, BPS melakukan updating sumber data UHH hasil SP2010 dengan hasil LF SP2020 yang menyediakan data parameter kependudukan terbaru. Hal ini dengan mempertimbangkan perubahan karakteristik demografi dalam sepuluh tahun terakhir.

UHH saat lahir Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun. UHH Kepulauan Riau yang sebesar 74,25 pada tahun 2020, naik secara berturut-turut hingga mencapai 75,12 pada tahun 2024 yang artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun. Selama 5 tahun terakhir (2020–2024), UHH Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,87 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,29 persen per tahun.

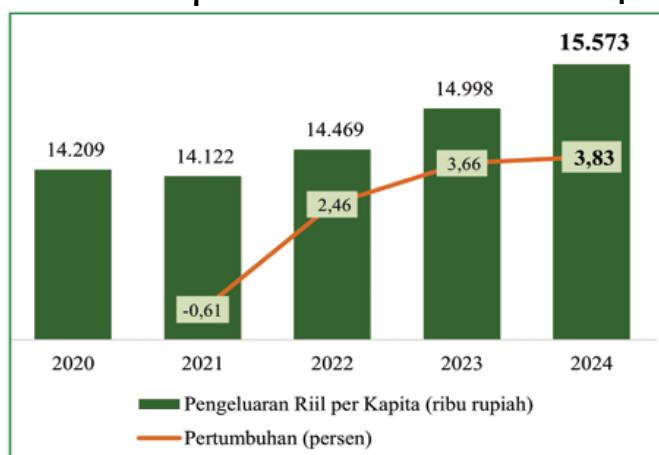
Grafik 3.25
Perkembangan HLS & RLS IPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Dimensi pengetahuan dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), HLS Kepulauan Riau rata-rata meningkat 0,77 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,93 persen per tahun. Jika dibandingkan tahun 2023, HLS Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,22 tahun (1,69 persen) dan RLS meningkat sebesar 0,09 tahun (0,86 persen).

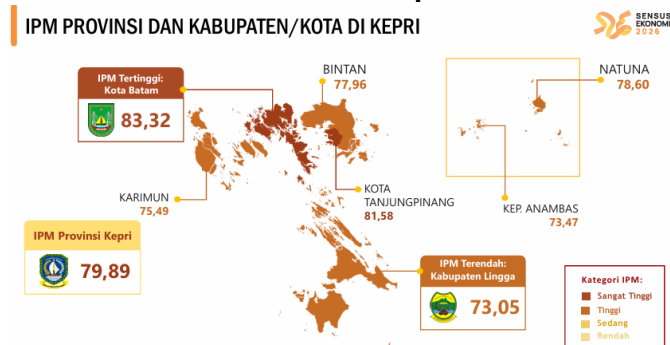
Grafik 3.26
Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kepulauan Riau mencapai Rp15.573.000 per tahun. Dimensi standar hidup layak tahun 2024 mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi Kepulauan Riau yang terus berlanjut. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kepulauan Riau telah meningkat sebesar Rp1.364.000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,33 persen per tahun.

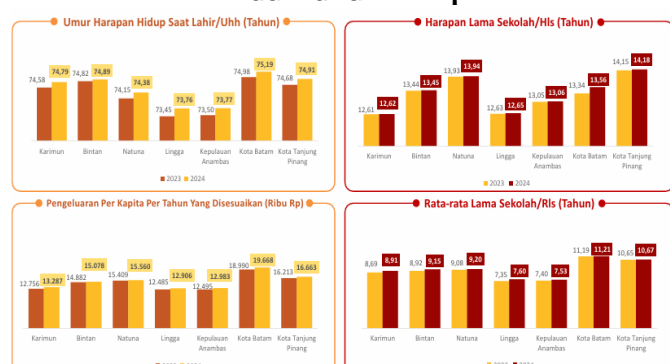
Gambar 3.15
IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Pada 2024, dua dari tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau mencapai status pembangunan manusia “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$), yaitu Kota Batam dengan capaian IPM 83,32 dan Kota Tanjungpinang dengan capaian IPM 81,58. Sementara lima diantaranya mencapai status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$), yaitu Kabupaten Natuna dengan capaian IPM 78,60, Kabupaten Bintan 77,96, Kabupaten Karimun 75,49, Kabupaten Kepulauan Anambas 73,47, dan Kabupaten Lingga dengan capaian IPM 73,05. Dalam kurun waktu 2020-2024, terjadi peningkatan status pembangunan manusia dari “tinggi” ke “sangat tinggi” yang dialami Kota Tanjungpinang, yaitu sejak 2022.

Gambar 3.16
Indikator IPM Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Biro Ekbang Prov Kepri

Pada tahun 2024, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lingga sebesar 1,14 persen, disusul Kabupaten Karimun sebesar

1,06 persen, dan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,92 persen.

Selama periode 2023 hingga 2024, disparitas IPM antar kabupaten/kota di Kepulauan Riau konsisten menunjukkan perbaikan. Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya gap antara IPM yang tertinggi dengan yang terendah, yaitu dari yang terendah di Kabupaten Lingga sebesar 72,23 di tahun 2023 menjadi 72,05 di tahun 2024. Dan IPM yang tertinggi di Kota Batam sebesar 82,64 di Tahun 2023 menjadi 83,32 di Tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,89 Indeks dengan target sebesar 77,74 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 103 %

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebesar 79,89 sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Nasional sebesar 75,02. Hal ini menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau diatas Indeks Pembangunan Manusia Nasional sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikategorikan memiliki Tingkat Pembangunan Manusia yang lebih baik dari rata-rata Nasional. Dampak Positifnya Provinsi Kepulauan Riau cenderung memiliki lebih banyak peluang investasi, lebih tinggi kualitas tenaga kerja, dan akses lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, ini bisa menjadi indikator bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lebih fokus pada Pembangunan manusia yang berdampak langsung kepada Kesejahteraan masyarakat, Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.17
Indikator Provinsi Kepulauan Riau dan IPM Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Prov Kepri

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024, IPM Kepri mencapai 79,89, meningkat 0,81 poin atau 1,02 persen dibandingkan tahun 2023;
2. Selama 2020-2024, IPM Kepri mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,70 persen.

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain adalah :

- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui :
 1. OJT Orientasi Dokter Dalam Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui Blended Learning;
 2. OJT Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita Untuk Penatalaksanaan Balita Sakit dan/ atau Masalah Gizi;
 3. Pertemuan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan AMPSR, Orientasi Sistem Informasi Matneo, MPDN, dan Ekohort;



4. Pembinaan Surveilans Kelainan Bawaan;
5. Monitoring Evaluasi Program KIA Dalam Rangka Penurunan AKI dan AKB;
6. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penurunan AKI dan AKB;
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui :
 1. Meningkatkan Akses Mutu Pendidikan
 2. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.
 3. Tetap meneruskan Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, kompensasi SPP dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang;
 4. Peningkatan kompetensi guru melalui Bimtek/Sosialisasi
- Meningkatkan daya saing masyarakat melalui
 1. peningkatan kualitas tenaga kerja dan melakukan program Link and match dengan dunia usaha dunia industri (DUDI)
 2. Penumbuhan wira usaha baru (WUB) industri kecil sebanyak 230 WUB dan Fasilitasi industri kecil dalam bentuk pelatihan, Fasilitasi HKI, Merk, desain dan sertifikat halal sebanyak 808 industri kecil serta melakukan inkubasi industri kecil sebanyak 40 diharapkan dapat membantu memberikan nilai
 3. Memberikan Pelatihan dan pengembangan usaha bagi Perempuan kelompok rentan seperti penduduk perempuan dibawah garis kemiskinan.
 4. Konsistensi IKM dalam menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas dan juga daya saing

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di non fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak masyarakat di wilayah pulau – pulau di kabupaten/ kota yang lebih memilih untuk bersalin di rumah karena berbagai macam alasan diantaranya faktor tradisi yang turun menurun, wilayah kepulauan yang membuat jarak antara rumah dengan fasilitas pelayanan kesehatan cukup jauh dan moda transportasi yang kurang memadai, fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai dalam pelayanan persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
2. Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta alat kesehatan di sebagian fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.
3. Masih belum meratanya distribusi tenaga kesehatan spesialis seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis lainnya. Dokter spesialis banyak terdistribusi di daerah perkotaan sedangkan di daerah DTPK seperti Kabupaten Kepulauan Anambas masih minim.
4. Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berupa pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, salah satunya karena adanya keterbatasan anggaran dan adanya efisiensi anggaran

Dekonsentrasi Program Pembinaan Kesehatan Keluarga.

5. Sistem manual rujukan maternal neonatal yang belum berjalan dengan baik;
6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di kabupaten/ kota belum optimal, efektif, dan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Program kesehatan reproduksi calon pengantin yang belum berjalan optimal.
8. Ketimpangan akses dan mutu pendidikan antar satuan Pendidikan dan antar wilayah
9. Pemenuhan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum berimbang antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
10. Kesenjangan transformasi digitalisasi dan teknologi pendidikan masih terbatas dan belum merata antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
11. Terbatasnya satuan pendidikan berbasis inklusi
12. Penggunaan kurikulum yang belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi
13. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan masih rendah
14. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
15. Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
16. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah .
17. sulitnya mendapatkan update data perempuan dibawah garis kemiskinan dan perempuan kepala keluarga dari pihak desa dan kelurahan serta masih rendahnya

keinginan peserta untuk mengembangkan usaha maupun pengetahuan.

18. Pelaksanaan pelatihan kerja yang belum berdasarkan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan indeks Pembangunan Manusia dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Secara konsisten menggiatkan dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat
2. Melakukan kegiatan AMP sebagai proses pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi agar tidak terulang lagi dengan kasus yang sama.
3. Membenahi sistem manual rujukan penanganan kasus komplikasi pada ibu dan bayi, melakukan penunjukan dokter spesialis kandungan dan anak sebagai penanggungjawab wilayah yang memberikan arahan kepada tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk stabilisasi pasien ibu dan bayi sebelum merujuk.
4. Melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi, penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi. Salah satunya yaitu alat USG, logistik pemeriksaan laboratorium bagi ibu, bayi, dan calon pengantin, alat stabilisasi ibu dan bayi dengan komplikasi, fasilitas dalam ambulans sebagai sarana rujukan kegawatdaruratan.
5. Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan normal dan dengan komplikasi,

penanganan bayi baru lahir normal dan dengan komplikasi, dan pelayanan kesehatan bayi.

Beberapa diantaranya yaitu pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan integrasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan gizi buruk, pelatihan penanganan asfiksia dan BBLR, pelatihan dokter dalam pelayanan KIA termasuk penggunaan USG, pelatihan bidan dalam pelayanan KIA, dan pelatihan lainnya.

6. Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi (POGI, IBI, IDI, dll) untuk pemerataan SDM dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Pelaksanaan refreshing deteksi risiko dini dan penapisan faktor risiko ibu dan bayi bagi bidan – bidan di wilayah kerja puskesmas.
8. Penguatan peran lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat dan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
9. Optimalisasi dan monitoring pemanfaatan JKN, DAK, Dekonsentrasi untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
10. Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
11. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan
12. Distribusi pendidik yang berimbang antar wilayah dan peningkatan persentase sertifikasi pendidik serta tingkat pendidikan tenaga pendidik
13. Peningkatan pendidikan berbasis media pembelajaran digital dan pemenuhan secara bertahap dan Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan
14. Meningkatkan pengamanan biaya pendidikan melalui skema beasiswa, peningkatan pengelolaan BLUD dan memperkuat

kerjasama dengan pihak lain termasuk orang tua siswa dalam pendanaan pendidikan

15. Pelatihan penumbuhan wirausaha baru melalui inkubasi industri dan peningkatan kemitraan antara industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya
16. Pelatihan SDM dan pengembangan manajemen pelaku IKM dan pengembangan akses pemasaran dan promosi produk IKM dan Peningkatan Diverifikasi produk IKM dan fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk
17. Peningkatan akses pembiayaan dan akses bahan baku
18. Memberikan Pelatihan dan pengembangan usaha bagi Perempuan kelompok rentan seperti penduduk perempuan dibawah garis kemiskinan
19. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data akurat terkait peningkatan ekonomi perempuan melalui pelatihan pengembangan usaha, serta bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam membantu pemasaran hasil produksi berupa packingan maupun lisensi pemasaran sesuai standar di pasar modern

Program-program yang mendukung pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Pengendalian Perizinan
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pelatihan dan Produktivitas
8. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum

Tabel 3.35
Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.086.542.944	4.049.956.331
2	Program Pengelolaan Pendidikan	377.526.999.967	357.186.005.919
3	Program Pengembangan Kurikulum	405.402.792	331.001.647
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	379.760.000	321.180.012
5	Program Pengendalian Perizinan	63.630.400	61.758.400
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	4.671.593.002	4.324.879.949
7	Pelatihan dan Produktivitas	3.239.016.874	3,084,224,287
8	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	1.116.000.000	1.105.491.000
JUMLAH		391.488.945.979	370.464.497.545

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.391.488.945,979,- terealisasi sebesar Rp.370.464.497.454,- atau 94,6%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.21.024.448.434 (5,37%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka (104,25%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94,6%) dengan efesiensi 9,65%.

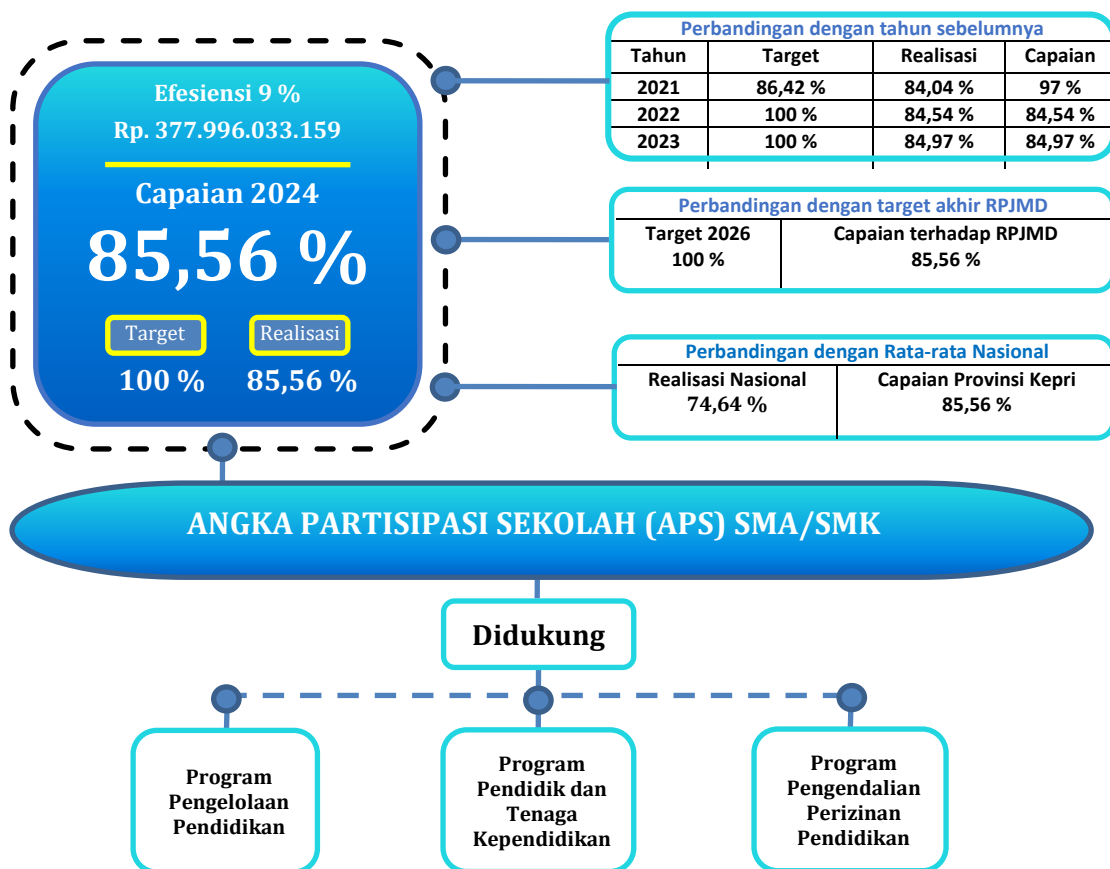
SASARAN :

Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan

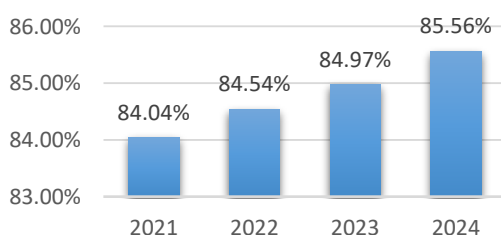
Indikator : Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar **85,56 %** dari target sebesar **100%** dan terealisasi sebesar **85,56%**.



Tren Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

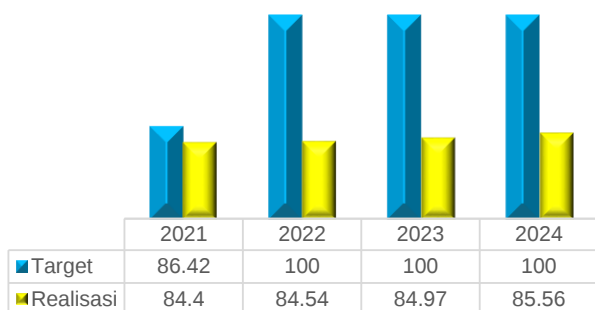


Formulasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mendapatkan pendidikan. APS diperoleh melalui jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikali dengan 100 %.

Meningkatnya pemerataan mutu dan akses layanan pendidikan dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **85,56 %** dengan target dari yang telah ditetapkan sebesar **100 %** sehingga capaian kinerja sebesar **85,56 %** atau dalam kategori **Baik**.

Grafik 3.27
Realisasi Kinerja APS Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri

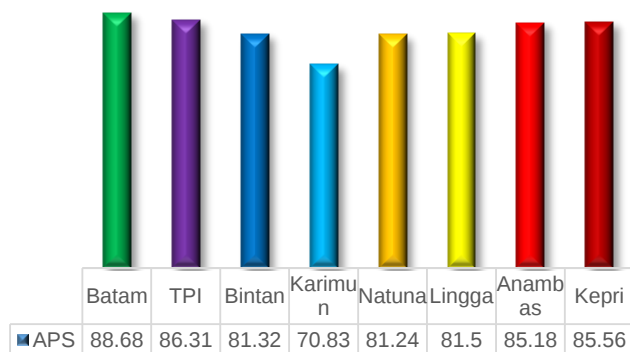
Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,59 %. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK hanya sebesar 84,97 % meningkat menjadi 85,56 % pada tahun 2024. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 85,56 atau 85,56% dari target yang di tetapkan sebesar 100% dengan Kategori Kinerja BAIK, Capaian 85,56 % merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang masih sekolah (81989) dibagi Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun (95826) dikali 100%. Ini berarti bahwa sekitar 85,56% Penduduk usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terdaftar dan masih aktif mengikuti pendidikan, baik di pendidikan formal maupun nonformal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemenuhan Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Menengah sebesar 100%. Dengan belum mencapai nya target APS 100% menandakan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau masih ada sekitar 14% belum atau tidak sedang sekolah pada usia 16-18 Tahun. Kondisi ini mesti dicarikan jalan keluar agar terjadi peningkatan sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat tercapai, meskipun saat ini Provinsi Kepulauan Riau masih mencanangkan wajib belajar 9 Tahun.

Capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,7%. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK hanya sebesar 84,97%. meningkat menjadi 85,56 pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh Peningkatan karena Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang sudah meningkat setiap tahunnya. Program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan Biaya Personil Peserta Didik pada tahun 2024 dan Pemberian Bantuan Seragam Sekolah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mengurangi beban orang tua dalam menyekolahkan anaknya, sehingga anak tetap dapat sekolah.

Meski belum mencapai target APS akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) di tahun 2024 mencapai angka 108,40% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai angka 87,94% pada jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK) di tahun 2024.

Grafik 3.28
Realisasi Kinerja APS Kab/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85,56 dengan target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 85,56%.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada diatas target nasional yaitu rata-rata nasional sebesar 74,64 % dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85,56 %. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke- 1 (satu) dengan nilai sebesar 85,56% yang disusul oleh Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,40%.

Tabel 3.36
APS Provinsi Wilayah Provinsi 2024

NO	PROVINSI WILAYAH SUMATERA	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur
		16-18 (umur)
1	KEP. RIAU	85,56
2	SUMATERA BARAT	84,4
3	ACEH	81,55
4	BENGKULU	79,07
5	SUMATERA UTARA	78,59
6	RIAU	78,49
7	KEP. BANGKA BELITUNG	72,69
8	LAMPUNG	72,35
9	JAMBI	71,97
10	SUMATERA SELATAN	70,8

Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri

Faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adanya beberapa faktor sebagai berikut :

1. Meningkatnya sebaran dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menengah yang semakin membaik di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta di dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan pendidikan yang lebih mendekatkan fasilitas pendidikan di tengah masyarakat bertempat tinggal.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta penyebaran pendidik yang lebih merata pada semua wilayah.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan bagi masa depan anak.

Upaya yang mendukung keberhasilan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK diantaranya adalah

1. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, Pembangunan Ruang kelas Baru sebanyak 10 SMA dan 11 SMK, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah.
2. Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Meningkatkan berbagai program untuk menekan permasalahan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah melalui berbagai skema seperti skema pendidikan paket A, B dan C serta pendampingan phycsologi bagi anak yang bermasalah social dengan melibatkan organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas

- Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi Kesehatan Ahli Jiwa dan berbagai organisasi lainnya.
4. Skema beasiswa disiapkan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 5. Penyusunan DED relokasi pembangunan SMA Negeri 3 Tanjungpinang
 6. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Tabel 3.37
Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan
Tahun 2024

KEGIATAN	JUMLAH	SATUAN
Pembangunan Ruang Kelas baru	21	
SMA	10	Ruang
SMK	11	Ruang
Rehabilitasi Berat/Sedang Ruang Kelas	71	
SMA	67	Ruang
SMK	4	Ruang

Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK sebagai berikut :

1. Faktor Geografis, yaitu jarak antar sekolah yang jauh, sehingga keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan terutama yang ada di Pulau Pulau; hal ini bisa di lihat dengan Angka Partisipasi yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
2. Pemerataan Sarana dan Prasarana yang belum seluruhnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
3. Tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah
4. Pemenuhan kualitas, kuantitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum berimbang antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
5. Kesenjangan transformasi digitalisasi dan teknologi pendidikan masih terbatas dan belum merata antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
6. Terbatasnya satuan pendidikan berbasis inklusi
7. Penggunaan kurikulum yang belum sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemajuan teknologi
8. Inovasi dalam Pendanaan Pendidikan masih rendah

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Pemerataan Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah,
2. Melanjutkan program Pembebasan SPP, Pemberian Bantuan bagi siswa tidak mampu melalui bantuan transportasi darat dan laut, dan juga bantuan bagi siswa yang melaksanakan magang.
3. Melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Dinas Pendidikan, maupun dengan Instansi/lembaga terkait, serta pemerintah pusat dalam rangka mendorong

pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

4. Meningkatkan fasilitas Pendidikan menengah hingga ke seluruh wilayah terutama pada daerah terluar, tertinggal dan wilayah perbatasan sehingga kesenjangan fasilitas Pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin membaik.
5. Peningkatan alokasi anggaran Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pendidikan sesuai kebutuhan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan bakat, minat dan percepatan proses pembelajaran berbasis konten-konten Pendidikan yang lebih menarik.
7. Memperkuat program teknologi informasi serta penguatan peran dan fungsi Lembaga/Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Lembaga yang mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi.
8. Distribusi pendidik yang berimbang antar wilayah dan peningkatan persentase sertifikasi pendidik serta tingkat pendidikan tenaga pendidik.
9. Peningkatan pendidikan berbasis media pembelajaran digital dan pemenuhan secara bertahap.
10. Meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang berkeadilan
11. Penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan
12. Meningkatkan pengamanan biaya pendidikan melalui skema beasiswa, peningkatan pengelolaan BLUD dan memperkuat kerjasama dengan pihak lain termasuk orang tua siswa dalam pendanaan pendidikan

Dukungan terhadap Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK Pada Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 3

(Tiga) Program pembangunan untuk urusan pendidikan yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan yang di tunjang oleh 3 Kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kujuruan
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program ini di tahun 2024 hanya menjalankan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang di tunjang dengan 2 Kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
 - 2) Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Tabel 3.38
Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pengelolaan Pendidikan	377.526.999.967	360.395.217.626
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	405.402.792	331.001.647
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	63.630.400	61.758.400
JUMLAH		377.996.033.159	360.787.977.673

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.377.966.033.159,- terealisasi sebesar Rp.360.787.977.673,- atau 95%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.17.208.055.486 (4,55%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK (85,56%) lebih rendah dari realisasi anggaran (95%) sehingga belum mencapai efesiensi sebesar 9%.

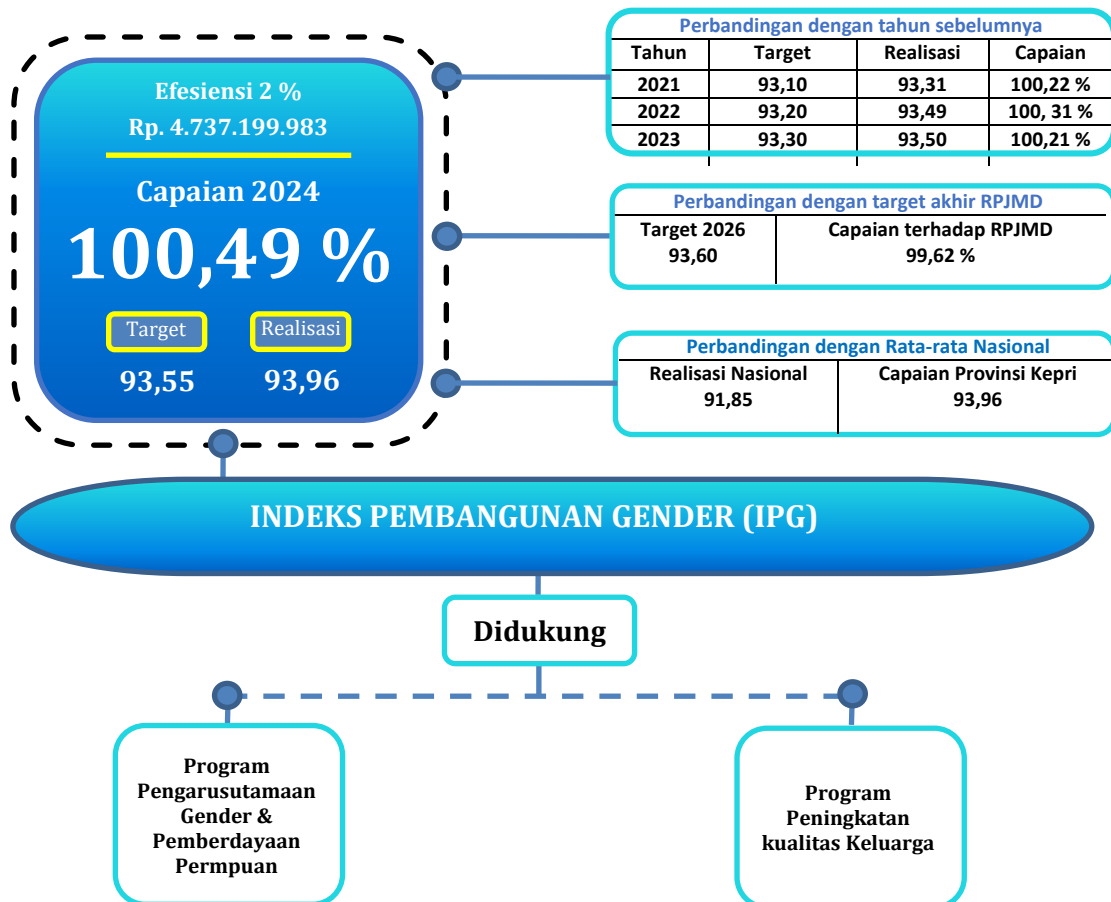
SASARAN :

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

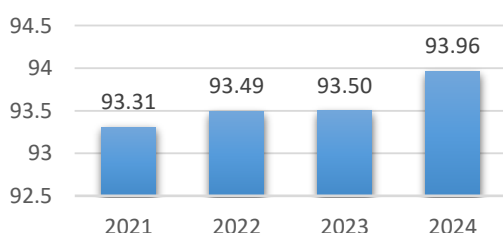
Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **93.96** Indeks dari target sebesar **93,55** Indeks dan capaian sebesar **100,49 %**



Tren Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)



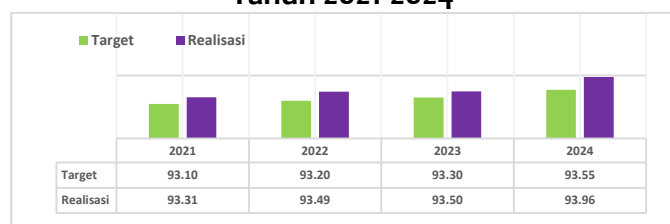
Formulasi Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan/pengeluaran dengan diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023, dikarenakan data IPG Tahun 2024 baru dikeluarkan oleh BPS Pada Agustus 2025. Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **93,96** Indeks dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **93,55** Indeks dengan capaian kinerja sebesar **100,49 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Grafik 3.29
Realisasi IPG Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS Prov Kepri

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 target IPG sebesar 93,30 dengan realisasi target sebesar 93,50 serta untuk capaian 100,21%, pada tahun 2024 target sebesar 93,55 dengan realisasi target 93,96 serta untuk capaian 100,49%.

Tabel 3.39
Realisasi IPG Kab/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2019-2023

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/K OTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				
		2023	2022	2021	2020	2019
1	KEPULAUAN RIAU	93.96	93.50	93.49	93.31	93.10
2	Karimun	91.33	91.12	91.00	91.25	90.91
3	Bintan	93.93	93.78	93.53	93.12	93.10
4	Natuna	92.07	91.86	91.95	91.67	91.72
5	Lingga	90.75	90.48	89.73	89.25	89.26
6	Kepulauan Anambas	91.25	91.14	90.30	90.27	90.16
7	Kota Batam	94.95	94.75	94.51	94.43	94.42
8	Kota Tanjung Pinang	96.96	97.14	97.14	96.79	96.77
9	INDONESIA	91.85	91.63	91.27	91.06	91.07

Sumber : BPS Prov Kepri

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya bahkan capaiannya melebihi capaian IPG Nasional Tahun 2024.

Untuk menghitung IPG, menggunakan dimensi yang sama dengan Pembangunan Manusia yaitu dimensi kesehatan (Angka Harapan Hidup), dimensi pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan dimensi ekonomi (Pengeluaran per Kapita).

Tabel 3.40
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kep Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
KEPULAUAN RIAU	12,92	12,93	13,16	13,30
Karimun	12,52	12,54	12,93	12,94
Bintan	13,14	13,32	14,03	14,18
Natuna	13,77	13,78	14,01	14,02
Lingga	12,89	12,90	12,57	12,61
Kepulauan Anambas	12,82	12,98	13,30	13,31
Kota Batam	13,21	13,23	13,34	13,35
Kota Tanjung Pinang	14,05	14,06	14,61	14,62

Sumber : BPS Prov Kepri

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang di harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pada tahun 2023 HLS penduduk laki-laki sebesar 12,93 tahun dan penduduk perempuan sebesar 13,30 tahun. Hal ini menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah di Provinsi Kepri antara perempuan dan laki-laki atau juga menunjukkan bahwa hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Indonesia

Selanjutnya dilihat dari Rata-rata Lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: (1) partisipasi sekolah (2) jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki (3) ijazah tertinggi yang dimiliki (4) tingkat/kelas

tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Selama periode 2022 - 2023 capaian RLS penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan.

Tabel 3.41
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
KEPULAUAN RIAU	10,50	10,51	10,23	10,38
Karimun	8,73	8,90	8,14	8,43
Bintan	8,97	9,05	8,68	8,92
Natuna	9,25	9,37	8,84	9,02
Lingga	7,44	7,59	6,93	7,16
Kepulauan Anambas	7,68	7,70	7,10	7,21
Kota Batam	11,36	11,37	11,05	11,07
Kota Tanjung Pinang	10,68	10,84	10,48	10,64

Sumber : BPS Prov Kepri

Tabel 3.42
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Provinsi Kepulauan Riau

	LAKI-LAKI		PEREMPUAN	
	2022	2023	2022	2023
Kepulauan Riau	20.614	21.223	12.651	13.019
Karimun	18.830	19.509	9.947	10.240
Bintan	21.839	22.036	12.600	12.707
Natuna	21.240	21.878	11.612	12.007
Lingga	17.971	18.428	9.957	10.233
Kepulauan Anambas	17.338	17.907	9.304	9.646
Kota Batam	27.027	27.715	17.748	18.193
Kota Tanjung Pinang	19.173	19.715	15.391	15.413

Sumber : BPS Prov Kepri

Pada indikator Pengeluaran Perkapita, penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan capaian penduduk perempuan. Pada tahun 2023 terjadi kesenjangan pengeluaran yang sangat tinggi untuk penduduk laki laki penduduk perempuan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah terkait dengan kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93,96 Indeks dengan target sebesar 93,60 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 100 %

Tabel 3.43
Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Indonesia Tahun 2023

RANGKING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023
	INDONESIA	91.85
1	DKI JAKARTA	95.24
2	SULAWESI UTARA	95.06
3	SUMATERA BARAT	94.93
4	D I YOGYAKARTA	94.99
5	BALI	94.59
6	KEPULAUAN RIAU	93.50
Dst		...
34	PAPUA	81.64

Sumber : BPS Prov Kepri

Capaian IPG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebesar 93,50 jauh diatas angka capaian Nasional yaitu sebesar 91,63, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Serta Jika di dilihat dari tabel diatas, untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) berdasarkan Provinsi Se-Sumatera, maka Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 berada pada urutan ke- 2. Berikut data lengkap dari seluruh Provinsi se-Sumatera:

Tabel 3.44
Capaian Kinerja IPG Berdasarkan Provinsi Se Sumatera Tahun 2023

RANG KING	PROVINSI	Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2023
1	SUMATERA BARAT	94.93
2	KEPULAUAN RIAU	93.50
3	SUMATERA SELATAN	93.25
4	ACEH	92.55
5	BENGKULU	91.57
6	SUMATERA UTARA	91.31
7	LAMPUNG	90.75

Sumber : BPS Prov Kepri

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Provinsi;



2. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan, pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Provinsi ;
3. Pelaksanaan penyedia layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kualitas keluarga dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

1. Rendahnya pendapatan ekonomi perempuan dilihat dari rendahnya angka rata-rata pengeluaran perkapita perempuan dimana hal ini dikarenakan kurangnya perempuan untuk bekerja pada sektor formal. Hal ini dikarenakan pengeluaran perkapita adalah proksi dari pendapatan atau tingkat kesejahteraan secara ekonomi.
2. Masih banyaknya perempuan yang enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas khususnya dibidang ekonomi
3. Pembinaan dan pendampingan lebih lanjut belum optimal dilakukan terhadap peserta peningkatan kapasitas baik ekonomi maupun sosial karena terkendala dengan lingkup jangkauan dinas.

Dalam rangka meningkatkan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya yaitu

1. Mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yakni melalui kegiatan pelaksanaan pendidikan paket C bagi perempuan putus sekolah
2. Mendorong peningkatan pendapatan Perkapita melalui kegiatan peningkatan

kapasitas Life Skill dan pengembangan usaha melalui pelatihan-pelatihan yang mendukung pendapatan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga.

3. Salah satu upaya dilakukan pemerintah selain meningkatkan life skill perempuan adalah mendorong perempuan terlibat dalam perekonomian dan membangun jejaring sosial. Tindak lanjut berupa dukungan sosial dan support system juga dari Pemerintah. Perlu peraturan-peraturan yang menguntungkan perempuan. Termasuk juga institusi atau kelembagaan-kelembagaan harus mendukung perempuan.

Adapun beberapa program pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Provinsi (IPG) antara lain:

Tabel 3.45
Program/Kegiatan yang Menunjang Peningkatan IPG di Provinsi Kepulauan Riau

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
						Rp	%
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat Peningkatan Kapasitas	34.401.300	34.391.500	100
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	616.175.739	577.800.614	94
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3.355.740.396	3.339.082.896	100
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	191.419.680	189.372.500	99
5.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	539.382.868	521.500.935	97
TOTAL					4.737.199.983	4.662.148.445	98

Realisasi anggaran dalam mendukung Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp.4.737.119.984,- dengan serapan anggaran sebesar Rp.4.662.148.445,- sehingga dapat dicapai efisiensi penggunaan sebesar 98,41 %. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender (100,49%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,41%) sehingga mencapai efisiensi sebesar 2%.

SASARAN :

Penguatan Jaring Pengaman Sosial

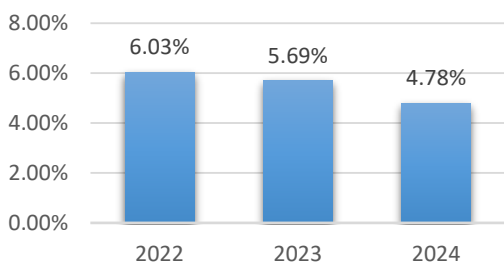
Indikator : Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menurun. Angka Kemiskinan pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **4,78 %** dari target sebesar **5,69 %** dengan capaian kinerja **114,99 %**.



Tren Penurunan Angka Kemiskinan



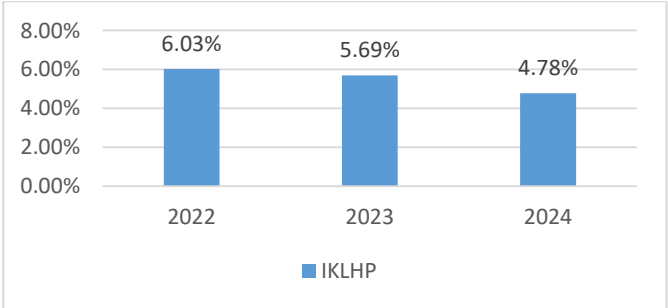
Formulasi Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan adalah Persentase penduduk miskin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk miskin provinsi dengan jumlah penduduk provinsi. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin provinsi dibagi dengan jumlah penduduk provinsi, dikali seratus. Angka Kemiskinan dikatakan menurun jika persentase penduduk miskin pada saat dievaluasi lebih rendah daripada persentase penduduk miskin pada tahun atau bulan yang dijadikan perbandingan.

Penguatan jaring pengaman sosial dilihat dari indikator angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Realisasi angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **4,78%** dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **5,69%** sehingga capaian kinerja sebesar **115,99%** atau dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Realisasi Kinerja Indikator Angka Kemiskinan dilihat dari beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.30
Tren Perkembangan Angka Kemiskinan



Sumber : Dinas Sosial Prov Kepri

Capaian kinerja penurunan angka kemiskinan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,91%. Dimana pada tahun 2023 penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 5,69% menjadi 4,78% pada tahun 2024.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) capaian kinerja penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dengan target sebesar 5,57% sehingga capaian kinerja sebesar 114,18%.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Namun jika dibandingkan dengan penurunan angka kemiskinan di Pulau Sumatera, sementara Provinsi Kepulauan Riau berada para urutan ke-4

dengan nilai sebesar 4,78% yang didominasi oleh Provinsi Bali sebesar 3,8%.

Tabel 3.46
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Se-Indonesia Semester II Tahun 2024

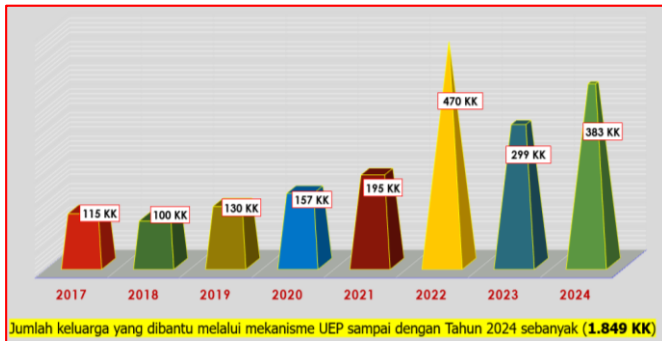
NO URUT	PROVINSI	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN SEMESTER 2
1	BALI	3,8
2	KALIMANTAN SELATAN	4,02
3	DKI JAKARTA	4,14
4	KEP. RIAU	4,78
5	KEP. BANGKA BELITUNG	5,08
...	...	...
37	PAPUA TENGAH	27,6
38	PAPUA PEGUNUNGAN	29,66
	INDONESIA	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah peningkatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Bantuan sosial ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga dapat mengurangi risiko kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepri antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan sembako.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan melalui program ekonomi kerakyatan dengan memberikan bantuan kesejahteraan sosial yang bersifat konsumtif, melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin yang sudah memiliki cikal bakal usaha. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, termasuk bantuan peralatan usaha, yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ekstrem.

Grafik 3.31
Data Penerima Bantuan Usaha Ekonomi
Produktif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
s.d. 2024



Sumber : Dinas Sosial Prov Kepri

Upaya lainnya yang mendorong turunnya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dari sektor pendidikan yaitu pemberian bantuan bagi peserta didik sehingga dapat mengurangi beban biaya pendidikan, pemberian bantuan seragam sekolah.

Selanjutnya dari sektor kesehatan yaitu penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi. Kemudian melalui Biro Kesejahteraan Rakyat memberikan beasiswa pendidikan tinggi kepada mahasiswa kurang mampu sebanyak 751 orang sehingga secara tidak langsung berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan akses bagi kalangan kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sektor Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak juga melaksanakan pelatihan dan pengembangan kapasitas/ *life skill* perempuan khususnya kelompok rentan.

Sektor perikanan dan kelautan juga berupaya memberikan sarana penangkapan ikan yang diberikan kepada para nelayan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi yang dikeluarkan, menyediakan sarana dan prasarana, yang secara umum terdiri dari bibit dan pakan ikan, jaring keramba tancap dan apung, penyediaan lahan pembudidaya.

Sektor lingkungan hidup melaksanakan pemberian insentif langsung kepada pengurus dan anggota Kelompok Bank Sampah dalam pengelolaan sampah. Dari Sektor Koperasi dan UKM memberikan upaya pemberian hibah bantuan modal usaha sebanyak 2.588 pelaku usaha, meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Wirausaha dan UMKM memeberikan peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha, memberikan bantuan modal tanpa bunga Subsidi Margin 0 persen sebanyak 290 pelaku usaha.

Dari segi ketenagakerjaan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebanyak 748 orang.

Kemudian dari segi Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi sebanyak sapi 34 ekor kambing 57 ekor, pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian seperti ompa air 11 unit, handsprayer 195 unit, mulsa 35 roll, selang 5 gulung, pupuk npk 76751 kg, pupuk organik 126760 kg, handtraktor 7 unit, kultivator 18 unit, potong rumput 10 unit, gerobak sorong 20 unit, motor roda 3 6 unit, cangkul 100 unit, pupuk kandang 9800 kg, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti benih sawi caisim 53 sachet, benih kangkung 87 sachet, benih bayam 54 sachet, tanah hitam 170 m3, pupuk kompos 17000 pack, pupuk npk 850 kg, benih kacang panjang 85 sachet, benih okra 85 sachet, polybag 3400 kg, benih terong 51 sachet, modul hidroponik 3 unit, nutrisi hidroponik 3 pack, rockwool 9 meter, tds meter 3 unit.

Dari segi penataan perumahan dan kawasan pemukiman melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha sebanyak 21 rumah tidak layak huni.

Kemudian dari segi elektrifikasi yaitu pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan dengan kegiatan pengadaan pemasangan mesin diesel (genset). Penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu dengan kegiatan pengadaan dan pemasangan bantuan pasang baru listrik (BPBL) ini sangat membantu masyarakat tidak mampu yang belum berlistrik PLN. Dari segi pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan melaksanakan peningkatan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam penurunan angka kemiskinan sebagai berikut :

1. **Infrastruktur yang Kurang Memadai:** Infrastruktur yang belum memadai, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, menghambat distribusi barang dan layanan, serta akses masyarakat terhadap program-program pengentasan kemiskinan.
2. **Tantangan dalam Pendataan:** Kesulitan dalam mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kondisi masyarakat miskin dapat menghambat pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Program-program tersebut harus didasarkan pada data yang akurat agar efektif dalam mengurangi kemiskinan.
3. **Akses Transportasi :** Kurangnya akses transportasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman barang bantuan

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan dan

kedala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi yang memadai agar distribusi barang dan layanan dapat berjalan lancar.
2. Melakukan pendataan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi masyarakat miskin. Pemerintah perlu bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data yang digunakan dalam program bantuan sosial adalah valid dan tepat sasaran.
3. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data masyarakat miskin, sehingga program-program bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.
4. Memastikan bahwa program bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan lainnya dapat disinkronkan dengan program lokal untuk memaksimalkan dampak pengentasan kemiskinan.
5. Mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan pelatihan, akses modal, serta pemasaran produk lokal. Ini akan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.47
Program yang Menunjang Keberhasilan Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pengelolaan Pendidikan	20,372,730,000	19,616,529,800
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30,329,254,372	29,836,111,258
3	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	3,629,366,655	3,559,864,878
4	Peningkatan Kualitas Keluarga	2,452,414,230	2,412,603,567
5	Pengelolaan Perikanan Tangkap	15804463449	15,659,494,677.35
6	Pengelolaan Perikanan Budidaya	4943104821	4817863963
7	Pengelolaan Persampahan	246147805	227572050
8	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkh)	2,745,636,400	2,741,607,058
9	Pengembangan Umkm	1,084,081,323	982,329,994
10	Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,372,235,946	4,265,314,003
11	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	187,942,546	176,211,884
12	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	6,656,563,817	5,737,512,226
13	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	408,096,000	408,082,606
14	Peningkatan Kualitas Keluarga	7,555,989,285	7,555,989,285
15	Kawasan Permukiman	16,150,000,000	15,202,333,537
16	Pengelolaan Ketenagalistrikan	2,250,000,000	1.866.000.000,-
17	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	20,372,730,000	19,616,529,800
JUMLAH		119.188.026.649	113.199.420.786

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.119.188.026.649,- terealisasi sebesar Rp.113.199.420.786,- atau 94%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.5.988.605.863 (5,02%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Angka Kemiskinan (115,99%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (94%) sehingga efisiensi tercapai 21%.

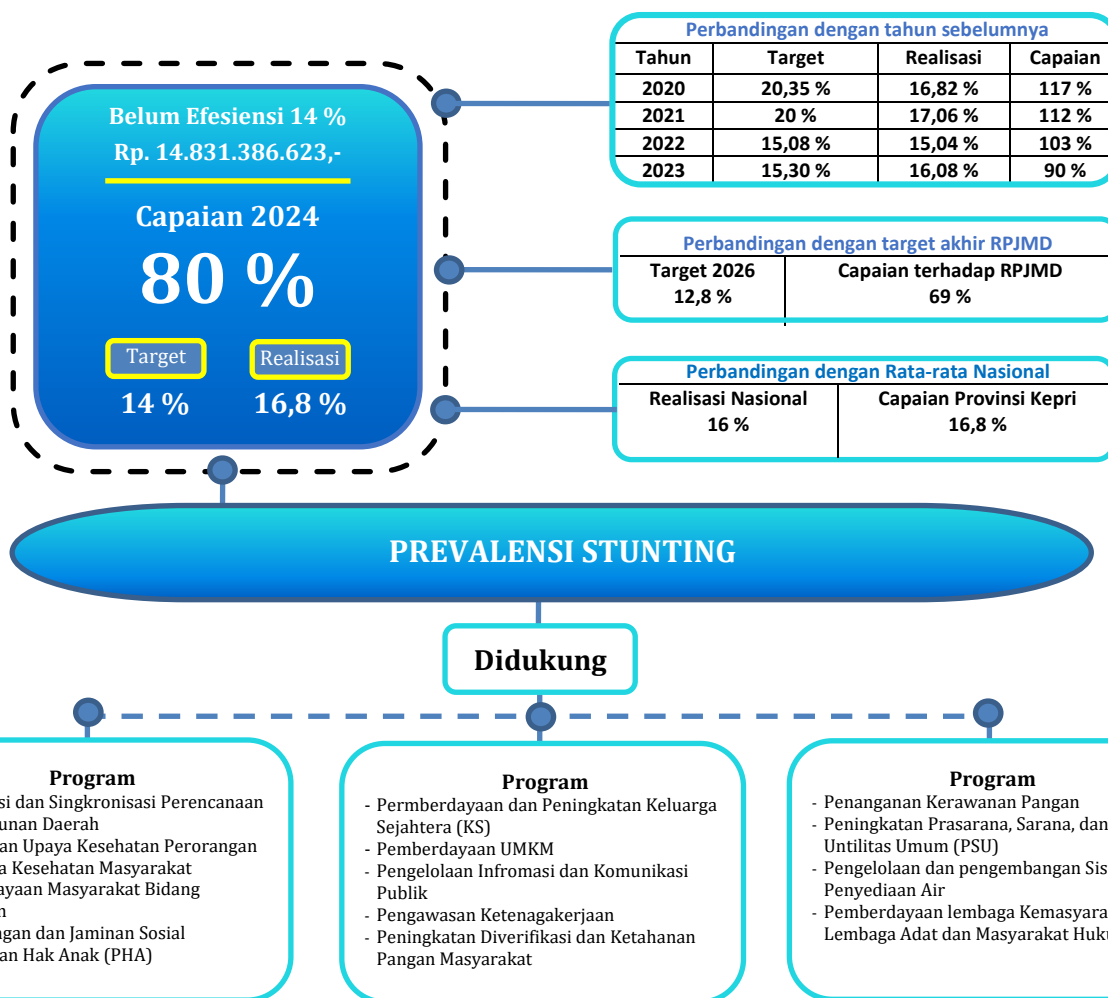
SASARAN :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

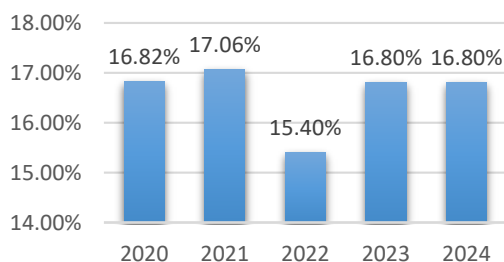
Indikator : Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan gagal tumbuh dan kembang, gagal pertumbuhan tinggi badan tidak tercapai sesuai dengan anak seusianya, di mana kecerdasan intelektual dan emosional tidak tercapai dengan ciri-ciri tinggi badan lebih pendek dari seusianya, anak menjadi lebih pendiam dan apatis, tidak banyak melakukan eye contact, IQ nya rendah, pertumbuhan melambat tanda pubertasnya juga melambat, wajah tampak lebih muda dari usianya dan pertumbuhan gigi terlambat. Realisasi Prevalensi Stunting pada Tahun 2024 sebesar **16,8 %** dari target sebesar **14 %** sehingga capaian kinerja sebesar **80 %** dengan predikat **BAIK**.



Tren Penurunan Prevalensi Stunting



Formulasi Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah jumlah balita yang mempunyai panjang badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur (PB/U atau TB/U -3 SD < -2 SD). Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Prevalensi Stunting diperoleh dari panjang badan/tinggi badan menurut umur (TB/U) dibawah -2 SD dibagi dengan jumlah balita yang diukur kemudian dikali 100 %.



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator prevalensi stunting. Dikarenakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 belum di publikasikan, maka capaian Tahun 2024 menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Berdasarkan data SKI, Realisasi Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **16,8 %** dan target dari yang telah ditetapkan sebesar **14 %** sehingga capaian kinerja sebesar **80 %** atau dalam kategori **BAIK**.

Tabel 3.48
Capaian Kinerja Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 – 2024

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
1.	Prevalensi stunting	2020	20,35	16,82
		2021	20	17,6
		2022	15,8	15,4
		2023	15,3	16,8
		2024	14	16,8

Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kepri

Stunting disebabkan oleh banyak faktor bukan hanya faktor kesehatan saja melainkan faktor multi sektor. Beberapa Penyebab stunting diantaranya adalah praktek pengasuhan yang tidak baik seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, bayi 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif dan Balita tidak mendapatkan MP-ASI yang padat gizi.

Selain itu penyebab lain stunting adalah terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (Ante Natal Care), Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Study menyebutkan bahwa 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu. Kurangnya akses Ibu hamil dan Balita ke makanan bergizi

seperti makanan bergizi mahal menyebabkan 1 dari 3 ibu hamil anemia.

Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting, data menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga masih BAB (buang air besar) di ruang terbuka. 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih dan cuci tangan dengan benar masih rendah.

Setiap tahun realisasi indikator prevelensi stunting mengalami turun dan naik, terlihat dengan perbandingan prevalensi stunting Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 – 2024. Kendala yang di hadapi dalam penanganan stunting adalah tenaga gizi terbatas, penimbangan balita masih rendah sehingga belum bisa menjangkau cakupan seluruh sasaran balita, alat antropometri di Posyandu belum semua terstandar, masih terdapat Pengukuran BB dan TB yang dilakukan oleh kader yang belum terorientasi pemantauan pertumbuhan.

Tabel 3.49
Prevalensi Stunting se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

NO	Kabupaten Kota	2021	2022	2023	2024
1.	KARIMUN	17,6	13,3	17,9	17,9
2.	BINTAN	20	17,8	21,6	21,6
3.	NATUNA	17,8	18	16,1	16,1
4.	LINGGA	25,4	18,9	20,5	20,5
5.	KEPULAUAN ANAMBAS	21,7	14	15,2	15,2
6.	BATAM	17,5	15,2	16,1	16,1
7.	TANJUNG PINANG	18,8	15,7	15,2	15,2
PROVINSI		17,6	15,4	16,8	16,8

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting tahun 2024 belum tersedia dikarenakan menunggu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 yang sedang dalam proses pendataan, maka dari itu persentase stunting Provinsi Kepulauan Riau masih menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau meningkat dari tahun

sebelumnya. Prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Bintan dengan capaian 21,6 % dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta Kota Tanjungpinang 15,2 %. Apabila dilihat angka Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan semua Kabupaten/Kota mengalami kenaikan, kecuali Kabupaten Natuna yang mengalami penurunan prevalensi sebesar 1,9 % dan Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebanyak 0,5 %. Kenaikan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 4,6% disusul dengan Kabupaten Bintan yang mengalami kenaikan 3,8% dan Kabupaten Lingga dengan kenaikan 1,6% dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja penurunan Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,8% dengan target sebesar 12,8% dengan capaian kinerja sebesar 89%.

Pada Tahun 2024, capaian Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada dibawah target nasional dengan nilai sebesar 16% dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 16,8%.

Determinan stunting adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting pada balita, dan saling terkait serta dapat memperkuat satu sama lain. Determinan ini terjadi pada 3 periode yaitu periode prenatal, kelahiran dan postnatal.

Periode waktu yang berperan terhadap stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Edukasi bagi ibu dan keluarga menjadi penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak pada 1000 HPK agar dapat mencegah stunting. Pola asuh orangtua, status ekonomi, BBLR, dan asupan gizi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk pencegahan stunting.

Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendapatkan perhatian khusus dan berbagai upaya telah dilakukan agar target benar-benar tercapai dan demi kepentingan masyarakat. Upaya sensitif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait penyediaan akses air bersih dan sanitasi.
- Setiap keluarga miskin harus memiliki Jaminan Sosial berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian dan Keluarga Berencana terkait layanan kesehatan dan KB
- Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Optimalisasi Pemanfaatan/Konsumsi Pangan Sayur, Buah dan Protein bersumber hewani kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan
- Kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan melalui program ketahanan pangan dan gizi.
- Meningkatkan konsumsi Ikan melalui Program Gemarikan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Selain upaya sensitif, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya di tahun 2024 juga melakukan upaya-upaya spesifik dalam menangani permasalahan dan pencegahan stunting diantaranya :

- Pemberian bantuan F100 bagi balita kasus gizi buruk
- Pelacakan kasus gizi buruk dan gizi kurang bagi balita yang tidak datang ke Posyandu melalui sweeping

- Pemberian Suplemen Taburia pada balita stunting
- Pengadaan Antropometri Kit Dalam Rangka Pemantauan Pertumbuhan
- Perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas dan Rujukan ke Rumah Sakit serta Pemantauan kasus gizi buruk pasca perawatan (Follow up)
- Distribusi dan Pemberian PMT lokal bagi Ibu Hamil dan Balita gizi kurang
- Konseling pada keluarga melalui kunjungan rumah
- Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) berupa pemberian tablet Fe (zat besi) pada Ibu Hamil, IMD, ASI Eksklusif, MP-ASI
- Pemberian tablet Fe kepada Remaja putri dengan konsumsi 1 tablet perminggu sepanjang tahun.
- Konseling pra nikah kepada calon pengantin dengan berkerjasama dengan KUA
- Integrasi program KIA – Gizi melalui Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita
- Sosialisasi Gerakan AKSI BERGIZI di sekolah melalui media massa dan elektronik.
- Melakukan kegiatan GERCEP ANTING (Gerakan Cepat Pananganan Stunting) yaitu memberikan bantuan kepada keluarga Balita stunting di wilayah Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk peningkatan status gizi
- Melakukan kegiatan penanganan balita kurus dan bumil KEK dengan konsep pencegahan yang melibatkan anak sekolah SMA/SMK sederajat di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun

Berdasarkan analisis dari beberapa indikator penyebab stunting dilihat dari intervensi spesifik, peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau diakibatkan oleh beberapa faktor yang belum mencapai target pada tahun 2024 diantaranya :

1. Pemantauan pertumbuhan

Pemantauan pertumbuhan adalah kegiatan penimbangan berat badan dan pengukuran Panjang atau Tinggi badan pada balita usia 0-59 bulan dilakukan setiap bulan di Posyandu serta pemantauan perkembangan melalui kegiatan SDIDTK. Penimbangan merupakan langkah awal dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Penimbangan yang rutin dilakukan setiap bulan di Posyandu, hal ini bertujuan untuk mengetahui atau deteksi dini apakah bayi /balita sakit atau tidak, kelengkapan Imunisasi dan mendapatkan penyuluhan gizi.

Cakupan penimbangan balita di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah 85,27% sedangkan target yang ditetapkan yaitu 85%.

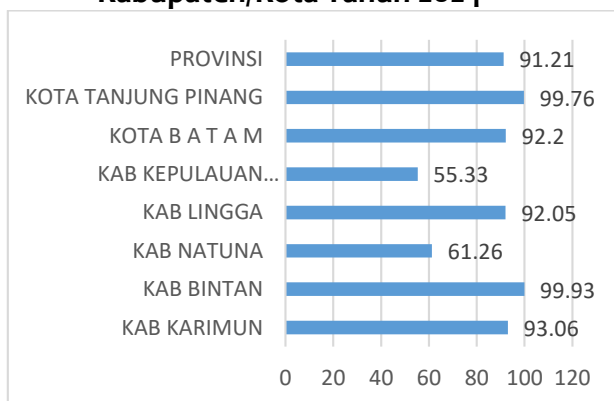
Target tersebut sudah tercapai akan tetapi dalam pencapaiannya masih terdapat beberapa kendala yaitu *mindset* yang berkembang adalah Posyandu hanya untuk menimbang berat badan dan memberikan vaksin anak. Hingga anak berusia 5 tahun, ibu harus rutin membawanya ke Posyandu. Para ibu terkadang tidak membawa anaknya ke Posyandu karena sudah PAUD. Mereka menganggap anaknya sudah sehat dan sudah bisa bersekolah sehingga tidak perlu lagi dibawa ke Posyandu. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama bagaimana caranya menggiatkan lagi posyandu sebagai pusat pemantauan pertumbuhan balita yang diminati masyarakat.

2. Persentase Sistem Data Surveilans Gizi Elektronik Dalam Pemantauan Intervensi Gizi Untuk Penurunan Stunting

Persentase sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting pada tahun 2024 adalah 91,21%. Dari ke 7 Kabupaten/Kota tersebut terdapat 2 Kabupaten yang di bawah 80% yaitu

Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Grafik 3.32
Persentase Pemantauan Intervensi Gizi
Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kepri

Dari grafik diatas terlihat bahwa belum 100% balita ditimbang di input ke eppgbm. Kendala yang dialami dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya tenaga entry, signal tidak memadai, aplikasi selalu berkembang sehingga terkadang eror, dan sarana prasarana pendukung kurang memadai. Upaya yang dilakukan adalah melakukan Validasi dan input Bersama data setiap bulan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung.

3. Memastikan Remaja Putri Yang Menerima Layanan Pemeriksaan Status Anemia (Hemoglobin).

Penanganan stunting harus dilakukan dan hulu salah satunya dengan mempersiapkan status gizi rematri dan WUS yang nantinya akan menjadi calon ibu. Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri merupakan salah satu upaya pencegahan anemi pada remaja putri dan WUS, akan tetapi upaya ini belum berjalan maksimal karena masih terdapat remaja putri yang di berikan TTD tapi tidak dikonsumsi sesuai yang di anjurkan.

Angka kejadian anemia erat kaitannya dengan kepatuhan dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Berdasarkan data tahun 2024 angka kepatuhan minum Tablet tambah

Darah masih rendah dimana 86.292 remaja putri dari 94.711 remaja putri kita tidak mengonsumsi TTD sesuai anjuran.

Penyebab tingginya prevalensi anemia remaja putri di Lingga adalah sekolah belum rutin melaksanakan kegiatan aksi bergizi, kepatuhan minum TTD pada remaja putri belum optimal, kebiasaan tidak sarapan pagi serta pola makan yang rendah protein dan tidak mengonsumsi sayuran hijau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah membuat surat edaran gubernur tentang pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri, Optimalisasi pelaksanaan aksi bergizi di sekolah, pemberian TTD rutin seminggu sekali sepanjang tahun, pemantauan kepatuhan konsumsi TTD.

4. Balita Yang Belum Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

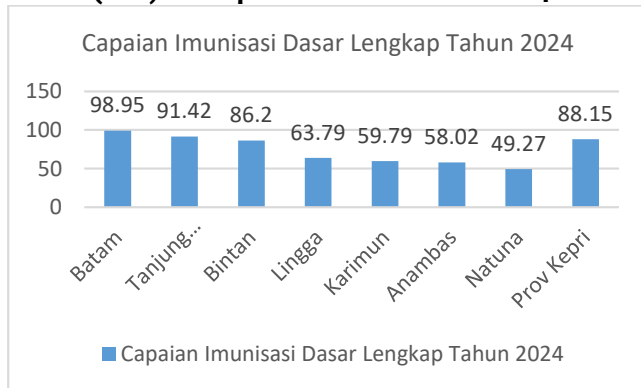
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sebagai salah satu upaya cost efektif mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Untuk itu cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Untuk mendeteksi dini terjadinya peningkatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, Imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans epidemiologi.

Realisasi persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar

88,15% masih rendah bila dibandingkan dengan target sebesar 94,60% dengan capaian kinerja 86%.

Grafik 3.33
Persentase Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten-Kota Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kepri

Beberapa kendala tidak tercapainya target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah :

- Kondisi aplikasi ASIK yang belum *running well* dan kondisi sinyal internet di daerah yang belum semuanya baik/lancar
- Masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi, termasuk penolakan terhadap Suntik Ganda
- Banyaknya aplikasi yang juga harus dikerjakan oleh petugas imunisasi/bidan di puskesmas
- Koordinasi antar petugas imunisasi dan Kesga di lapangan kurang maksimal
- Tugas ganda dari Petugas Imunisasi di puskesmas selain sebagai penanggungjawab program imunisasi
- Kurangnya dukungan Lintas Sektor/Program di daerah

Upaya yang dilakukan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai target imunisasi antara lain :

- Mendorong petugas imunisasi untuk Input Data ASIK sec. *Real-Time*
- Sosialisasi dan Edukasi Imunisasi secara Masif (Suntikan Ganda, Antigen Baru) Jejaring dengan PKK, Kader, Toma/Toga
- Menjaring/mencari sasaran yang belum lengkap imunisasi-nyadengan Sweeping,

Drop-out Follow Up (DOFU), Survei Cepat Komunitas (SCK)

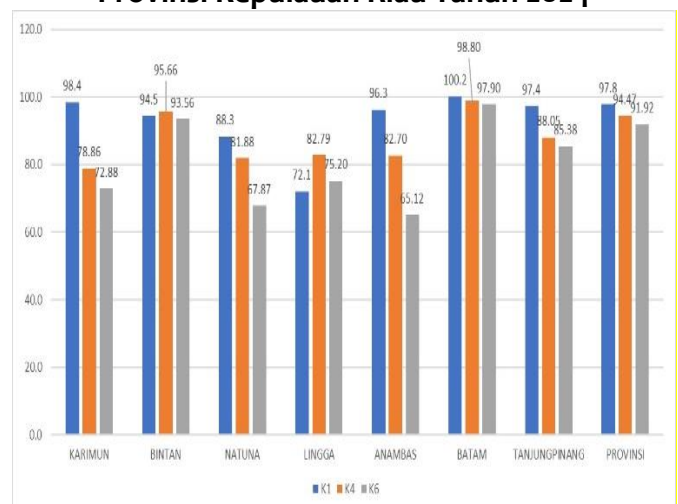
- Menskrining seluruh Ibu Hamil yang ada di wilker puskesmas dan Catat Capaiannya ke Register/Kohort Ibu,
- Menunjuk Admin ASIK dan PJ Penginput ASIK tiap fasyankes (saat ini sdh ada Helpdesk ASIK Provinsi)
- Bimbingan Teknis/Pendampingan dalam Pelaksanaan Imunisasi Rutin/Kejar → Desk Review, Monev, koordinasi pribadi
- Membuat Umpan Balik Capaian Imunisasi (ASIK) ke grup Forkom Imunisasi, Lintas Sektor/Program se-Kepri.

5. ANC (Ante Natal Care) Yang Belum Berkualitas

Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar, yang diberikan oleh tenaga kesehatan, meliputi dokter (dokter umum dan/ atau dokter kandungan), bidan dan perawat, minimal empat kali selama masa kehamilan yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga.

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Provinsi Kepulauan Riau digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.34
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kepri

Cakupan K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebesar 94,47% dan cakupan K6 sebesar 91,92%. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Provinsi Kepulauan Riau masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih adanya pemeriksaan kehamilan yang belum dilaksanakan sesuai standar 10T, kondisi geografis yang membatasi akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, dan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum lengkap.

Saat ini pelayanan kesehatan ibu hamil bahkan sudah diarahkan minimal 6 (enam) kali kunjungan selama kehamilan untuk meningkatkan deteksi dini pada ibu hamil, yaitu satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga dengan pemeriksaan oleh dokter minimal satu kali pada trimester pertama dan minimal satu kali pada trimester ketiga.

Ada 10 kriteria standar pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil (10T) yaitu :

- 1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
- 2) Ukur tekanan darah
- 3) Nilai status gizi (ukur lingkaran lengan atas / LiLa)
- 4) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- 5) Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- 6) Skrining status imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan berikan imunisasi jika diperlukan
- 7) Pemberian Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan
- 8) Tes laboratorium (umum dan khusus)
- 9) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan
- 10) Temu wicara (konseling).

Pelayanan kesehatan ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit atau gangguan yang diderita ibu hamil dan melakukan intervensi terhadap penyakit atau gangguan pada ibu hamil sedini mungkin. Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan menyeluruh (riwayat kesehatan, riwayat perilaku beresiko, riwayat penyakit

keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, skrining preeklampsia, skrining diabetes mellitus gestasional, skrining status imunisasi TT). Selain itu ibu hamil juga mendapat konseling gizi, mendapat suplemen asam folat dan zat besi, serta pendidikan kesehatan yang tepat. Semua itu dilakukan agar ibu terhindar preeklampsia berat, Kurang Energi Kronis (KEK), anemia defisiensi besi, kejadian infeksi, serta bayi terhindar dari kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) ataupun infeksi toksokoma/tetanus neonatorum yang dapat berujung pada kejadian stunting.

Kedepannya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan terus mengupayakan agar upaya preventif dalam pencegahan stunting dikedepankan melalui perbaikan status gizi remaja putri, calon ibu, ibu hamil dan Balita sehingga semakin dini stunting dideteksi maka penanganan akan semakin mudah.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi data setiap bulan melibatkan lintas program dan lintas sektor, penggerakan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga lebih banyak balita yang datang ke posyandu, revitalisasi posyandu melalui orientasi kader dan peningkatan sarana prasarana posyandu seperti pengadaan antropometri kit.



Tabel 3.50
Program yang Menunjang Indikator Prevalensi Stunting Provinsi Kepulauan Riau Beserta Anggaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	137,789,000	136,882,845
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,940,466,311	3,538,024,700
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	689,129,700	688,528,000
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,091,799,746	1,089,733,122
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	369,342,200	333,805,980
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	143,214,462	143,214,474
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	2,481,517,900	2,369,884,391
9	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	230,352,530	228,266,488
10	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	140,423,952	138,391,483
11	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,112,711,818	893,419,437
12	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60,131,700	5,549,100
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2,016,000,000	2,004,301,700
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2,418,507,304	2,376,231,265
JUMLAH		14,831,386,623	13,946,232,985

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.14.831.386.623,- terealisasi sebesar Rp.13.946.232.985,- atau 94%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.885.153.638,- (6%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Prevalensi Stunting (80%) lebih rendah dari realisasi anggaran (94%) sehingga belum efisiensi 14%.

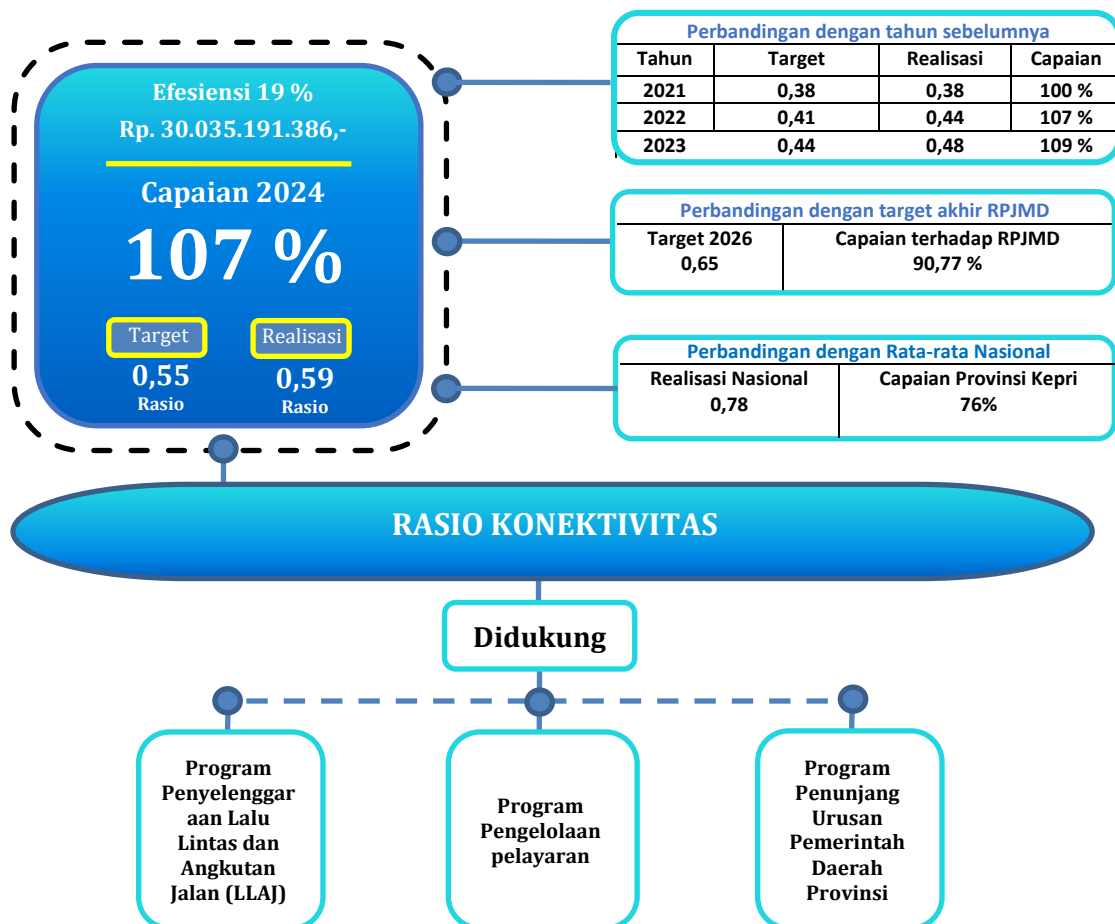
SASARAN :

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau

Indikator : Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas merupakan suatu komponen karakteristik suatu grafik yang mengekspresikan tingkat interaksi antar titik atau jumlah busur yang terjadi dalam suatu grafik. Dapat diartikan juga sebagai gabungan indikator kinerja angkutan darat, angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi. Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Konektivitas pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar **0,59** Rasio dari target sebesar **0,55** Rasio dan terealisasi sebesar **107 %**.



Formulasi Rasio Konektivitas

Rasio Konektivitas diukur dengan cara $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$. IK1 (angkutan jalan) adalah Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut. IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) adalah jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tersebut x bobot lintas dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau dilihat dari rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **0,59** Rasio dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **0,55** Rasio sehingga capaian kinerja sebesar **107 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan indikator Rasio Konektivitas, Indikator Rasio Konektivitas terbagi menjadi 2 indikator yaitu Rasio Konektivitas Angkutan Darat dan Rasio Konektivitas Angkutan Laut, dalam Rasio Konektivitas Angkutan Darat terdapat dua (Angkutan Perkotaan dan AKDP) sedangkan untuk Rasio Konektivitas Angkutan Laut terdapat angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan angkutan laut. Berikut ini adalah data jumlah layanan trayek angkutan darat (Angkutan Perkotaan dan AKDP), Lintas angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) pada provinsi dan jumlah trayek angkutan laut.

Tabel 3.51
Data Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di -
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kepri

Tabel 3.52
Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Lintas	Armada
1	Tanjungpinang (Pel. Sri Bintan Pura) - 75- Tanjung Balai Karimun -23- Moro - 81- Jagoh/ Dabo -80- P. Pekajang - 42- Belinyu -42- P. Pekajang -80- Jagoh/ Dabo -132- Tanjungpinang - 205- Tambelan - 131- Midai -50- Selat Lampa -71- P. Laut -71- Selat Lampa -65- Subi - 52- Serasan -92- Sintete -95- Tambelan - 227- Batam -25- Tanjungpinang.	KM. Sabuk Nusantara 48 (Kapal Penumpang) 19 Lintasan
2	Kijang (Pel. Sri Bayintan) -185- Tambelan -125- Pontianak -178- Serasan -52- Subi -65- Selat Lampa -71- P. Laut - 66- Sedanau -56- Midai -112- Tarempa - 37- Kuala Maras -162- Kijang (Pelabuhan Sri Bayintan).	KM. Sabuk Nusantara 80 (Kapal Penumpang) 10 Lintasan
3	Tg. Priok - 86 - Patimban - 502 - Kijang - 144 - Letung - 36 - Tarempa - 149 - Pulau Laut - 76- Selat Lampa - 61 – Subi - 47 - Serasan - 85 - Midai - 241- Kijang - 502- Patimban - 86 - Tg Priok.	KM. Logistik Nusantara 4 (Kapal Barang) 7 Lintasan
4	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 7 (Kapal Rede)
5	Tg. Balai Karimun -2 nm- Kapal -2 nmTg. Balai Karimun	KM Gandha Nusantara 8 (Kapal Rede)

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kepri

Dari tabel data diatas jumlah trayek angkutan darat, angkutan sungai danau dan penyeberangan serta trayek angkutan laut yang tersedia telah memenuhi kebutuhan trayek/lintas di tahun 2024. Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas pada tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.53

Data Lintasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) : • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) : • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : 1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 3.54
Realisasi Trayek / Lintas Angkutan Tahun 2024

No	Trayek/Lintas	Tahun 2024		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Trayek Angkutan Jalan	6	6	1	30%	8
2	Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	47	27	1	70%	52

Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kepri

Berkenaan dengan data diatas dapat dijelaskan perhitungan ketercapaian Rasio Konektivitas Tahun 2024 sebagai berikut :

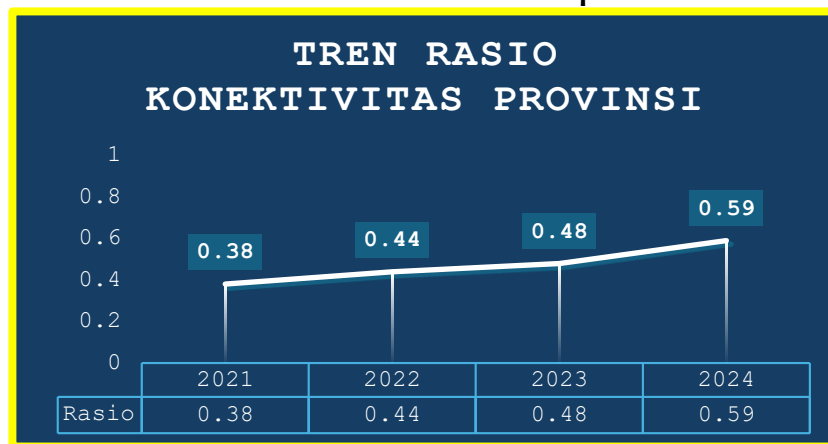
$$IK1 = (6 \times 1) / 8 = 0,75$$

$$IK2 = (27 \times 1) / 52 = 0,52$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio konektivitas} &= (IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan}) \\ &= (0,75 \times 30) + (0,52 \times 70) \\ &= 0,59 \end{aligned}$$

Capaian kinerja rasio konektivitas tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11 rasio . Dimana pada tahun 2023 peningkatan rasio konektivitas hanya sebesar 0,48 meningkat menjadi 0,59 pada tahun 2024.

Grafik 3.35
Tren Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Dinas Perhubungan Prov Kepri

Dilihat dari tren rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini tidak terlepas dari upaya dan koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah pusat dalam rangka peningkatan luas lintasan angkutan penyeberangan antar pulau di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Antar pulau dengan Indikator rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,59 rasio dengan target sebesar 0,65 rasio dengan capaian kinerja sebesar 90,77 %.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di bawah target nasional. Rasio konektivitas Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar 0,59 rasio dibandingkan dengan nasional sebesar 0,78 Rasio, dengan demikian tingkat capaian Provinsi dibanding Nasional sebesar 76 %.

Faktor yang mendukung ketercapaian peningkatan rasio konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain adalah :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatannya:
 - a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - b. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
 - b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
 - c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
 - d. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
 - e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian indikator sektor perhubungan “Rasio Konektivitas”

1. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi

Secara geografis wilayah Kepulauan Riau terdiri dari pulau – pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang sebagian besar merupakan perairan, kondisi geografis ini menyebabkan terbatasnya akses darat yang dapat dijangkau, hampir seluruh wilayah menggunakan akses transportasi laut. Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah ini diperlukan infrastruktur yang memadai sebagai sarana dan prasana moda transportasi. Kebutuhan akan infrastruktur transportasi ini merupakan alasan utama pendukung tercapainya konektivitas, akan tetapi disebagian besar wilayah Kepulauan Riau masih minim ketersediaan infrastruktur transportasi seperti kurangnya ketersediaan pelabuhan di pulau – pulau yang berpenghuni dan kurangnya moda transportasi yang laut yang melayani.

2. Aksesibilitas yang Terbatas:

Beberapa pulau atau daerah pesisir mungkin hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut atau udara, yang terkadang tidak teratur atau terhambat cuaca buruk. Aksesibilitas yang terbatas ini memperlambat pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan biaya logistik

3. Keterbatasan Armada Transportasi:

Armada transportasi laut atau udara yang terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitas, menghambat efisiensi dan frekuensi perjalanan antar pulau. Sering kali, biaya pemeliharaan armada yang tinggi serta masalah ketergantungan pada satu jenis transportasi dapat memperburuk situasi.

4. Biaya Tinggi:

Biaya transportasi di daerah kepulauan sering kali lebih mahal dibandingkan dengan daerah yang lebih terhubung dengan daratan utama. Biaya ini dipengaruhi oleh jarak yang jauh, kondisi cuaca, dan ketersediaan infrastruktur yang terbatas, yang semua berkontribusi pada tarif transportasi yang lebih tinggi, yang berdampak pada peningkatan konektivitas.

5. Kesulitan dalam Pengelolaan dan Koordinasi:

Banyaknya pulau dengan jarak yang terpisah jauh membuat pengelolaan transportasi dan koordinasi antar daerah menjadi lebih sulit. Layanan yang terpisah-pisah dan tidak terintegrasi menyebabkan ketidakefisienan dalam pergerakan barang dan orang.

6. Kurangnya Investasi dan Pendanaan:

Terbatasnya anggaran dan pendanaan untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur transportasi di daerah kepulauan sering kali menjadi kendala utama. Pemerintah dan sektor swasta mungkin kurang tertarik berinvestasi di daerah yang dinilai kurang menguntungkan atau memiliki risiko tinggi.

7. Tantangan Sosial dan Budaya:

Masyarakat di daerah kepulauan sering memiliki kebiasaan dan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat di daratan utama. Pemahaman dan adaptasi terhadap teknologi transportasi modern atau perubahan kebijakan transportasi sering kali menemui kendala dalam hal penerimaan sosial atau budaya lokal.

8. Keterbatasan SDM:

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang transportasi dan logistik, serta pelatihan teknis yang kurang memadai di daerah kepulauan, dapat memperburuk kualitas dan efisiensi sistem transportasi yang ada.

Dalam rangka meningkatkan indikator rasio konektivitas dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya:

1. Mengadakan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal keterhubungan wilayah atau konektivitas antar wilayah, agar terjadi sinkronisasi dan keselarasan yang baik dalam perencanaan bidang transportasi sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada peningkatan konektivitas wilayah provinsi
2. Memprioritaskan kegiatan yang menjadi pendukung peningkatan konektivitas provinsi yang akan direncanakan akan membangun pelabuhan pada Kabupaten Lingga dan Pelabuhan Anambas
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal Kerjasama layanan trayek transportasi dengan meminta dukungan pengadaan moda transportasi dan sarana prasarana transportasi.

Program-program yang mendukung peningkatan rasio konektivitas Tahun 2024 diantaranya :

Tabel 3.55
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung
Indikator Rasio Konektivitas

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.010.068.920	2.039.392.705,00	67,75%
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.935.685.870	1.924.943.084,00	99,45%
2	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	44.513.600	43.752.500,00	98,29%
3	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	957.588.900	988.000,00	0,10%
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	72.280.550	69.709.121,00	96,44%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.025.122.466	24.183.989.715	89,49%
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	13.804.446	13.804.446	100%
2	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern	27.240.804	27.240.804	100%
3	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	30.914.950	30.914.950	100%
4	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	30.219.207	30.219.207	100%
5	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	26.922.943.059	24.081.810.308	89%
Total		30.035.191.386	26.223.382.420	87%

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.30.035.191.386,- terealisasi sebesar Rp.26.223.382.420,- atau 87%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.3.881.808.966 (12,69%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas (107%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (87%) sehingga efesiensi tercapai 19%.

Gambar 3.18
Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan



SASARAN :

Peningkatan Pembinaan
Keagamaan, Pelestarian Budaya,
dan Harmoni Masyarakat

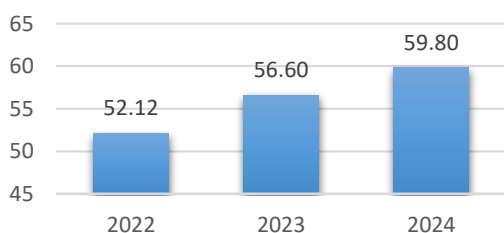
Indikator : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Indeks Pembangunan Kebudayaan pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **59,80** Indeks dari target sebesar **55,60** Indeks dengan capaian sebesar **108 %**.



Tren Peningkatan Indeks Pembangunan
Kebudayaan



Formulasi Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender.

Peningkatan pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat dilihat dari Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **59,80** Indeks berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **55,60** Indeks sehingga capaian kinerja sebesar **108 %** atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024, pembangunan kebudayaan Kepulauan Riau cukup baik, namun masih perlu terus ditingkatkan.

Metode Penghitungan indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut.
2. Menghitung nilai setiap indikator.
3. Menghitung bobot setiap komponen.
4. Menghitung indeks pembangunan kebudayaan secara keseluruhan.

Dengan skala pengukuran sebagai berikut:

1. Indeks rendah (0-40): Pembangunan kebudayaan kurang.
2. Indeks sedang (41-60): Pembangunan kebudayaan cukup.

3. Indeks tinggi (61-80): Pembangunan kebudayaan baik.
4. Indeks sangat tinggi (81-100): Pembangunan kebudayaan sangat baik.

Dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yang menggambarkan pembangunan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, masing-masing dimensi yang mendorong kenaikan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan pada di provinsi Kepulauan Riau dengan rentang nilai 0 – 100 sebesar 59,80 sedangkan untuk indeks pembangunan tingkat nasional 57,13 Pada tahun 2024 untuk realisasi indeks Pembangunan di Kepulauan Riau lebih tinggi dari nasional.

Adapun nilai untuk setiap dimensi sebagai berikut:

- dimensi ekonomi budaya (20,39)
- dimensi pendidikan (82,46)
- dimensi ketahanan sosial budaya (78,28)
- dimensi warisan budaya (51,91)
- dimensi ekspresi budaya (28,94)
- dimensi budaya literasi (68,98)
- dimensi kesetaraan gender (56,98).

Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 Dimensi Pendidikan memiliki nilai paling tinggi, sementara dimensi ekonomi budaya memiliki nilai paling rendah dibandingkan dengan dimensi lainnya sama.

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2018-2023

Tahun	Nasional	KEPULAUAN RIAU RPJMD
2018	53.74	58.83
2019	55.91	60.90
2020	54.65	59.24
2021	51.90	52.12
2022	55,13	56,60
2023	57,13	59,80

Sumber : IPK Direktorat Kebudayaan, Bapennas, BPS Nasional

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan

sebesar 3,2 Indeks. Dimana pada tahun 2023 peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya sebesar 56,60 Indeks meningkat menjadi 59,80 Indeks pada tahun 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepulauan Riau dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya dan muatan lokal pada pendidikan cukup baik. Namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi masih perlu terus ditingkatkan. diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Publikasi Indeks Pembangunan Kebudayaan ini akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan yang knowledge-based, agar perumusan kebijakan pembangunan kebudayaan dapat lebih presisi sesuai kondisi masing-masing daerah. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan peminat kajian kebudayaan untuk memperkaya data dan informasi terkait kebudayaan.

Ada beberapa faktor antara lain seperti faktor internal, yaitu : Kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap budaya lokal, Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, Kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan, Ketergantungan pada budaya asing, Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Adapun faktor eksternal, yaitu : Globalisasi dan pengaruh budaya asing, Keterbatasan akses ke teknologi dan informasi, Persaingan ekonomi global, Perubahan nilai-nilai budaya masyarakat, Pengaruh media sosial.

Selanjutnya yaitu faktor sosial seperti : Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya, Perubahan struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat, Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, Kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, Konflik antara generasi, Kurangnya pengembangan pariwisata budaya.

Untuk menyikapi hal tersebut maka upaya yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan kesadaran dan apresiasi budaya lokal, Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas budaya, Meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, Mengembangkan pariwisata budaya, Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta, Mengembangkan program pelestarian budaya, Meningkatkan akses ke teknologi dan informasi, Mengembangkan industri kreatif.

Tabel 3.57
Perbandingan Nilai Dimensi Tahun 2024

Dimensi	Nilai indeks	
	Nasional	Kepulauan Riau
Ekonomi Budaya	29,50	20,39
Pendidikan	73,35	82,46
Ketahanan Sosial Budaya	70,73	78,28
Warisan Budaya	51,54	51,91
Ekpresi budaya	34,91	28,94
Budaya Literasi	60,49	68,95
Gender	58,71	56,98
Total	57,13	59,80

Sumber : Dinas Pariwisata Prov Kepri

1. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Ekonomi Budaya

Grafik 3.36

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan, terhadap masyarakat 15 tahun ke atas (%)



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Ekonomi Budaya, yaitu :

- Kurangnya perencanaan strategis: Kurangnya perencanaan yang matang dan terstruktur.
- Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
- Kurangnya kesadaran budaya: Kurangnya apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal.
- Ketergantungan pada budaya asing: Ketergantungan yang terlalu besar pada budaya asing.
- Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan ekonomi budaya.
- Konflik kepentingan: Konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya
- Kurangnya kerjasama antar-stakeholder: Kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Ekonomi Budaya, yaitu :

- Perencanaan strategis: Perencanaan yang matang dan terstruktur.
- Ketersediaan sumber daya: Ketersediaan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
- Kesadaran budaya: Kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.
- Inovasi dan kreativitas: Pengembangan produk dan jasa budaya yang inovatif.
- Regulasi dan pengawasan: Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- Kerjasama antar-stakeholder: Kerjasama yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- Pemasaran dan promosi: Pemasaran dan promosi produk budaya yang efektif
- Pengembangan kapasitas: Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Ekonomi Budaya adalah sebagai berikut :

- Mengembangkan perencanaan strategis.
- Mengembangkan infrastruktur budaya
- Meningkatkan kerjasama antar-stakeholder.
- Mengembangkan produk dan jasa budaya yang inovatif.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.
- Meningkatkan pemasaran dan promosi produk budaya.

2. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Warisan Budaya

Grafik 3.37

Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.38

Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.39

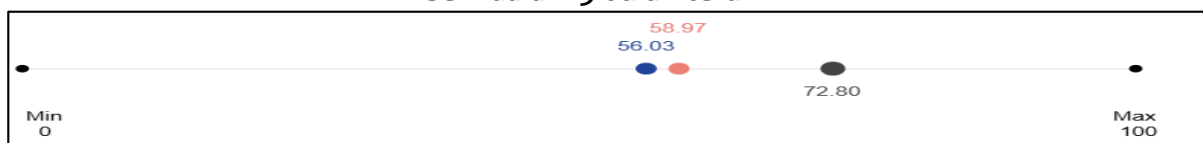
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.40

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir

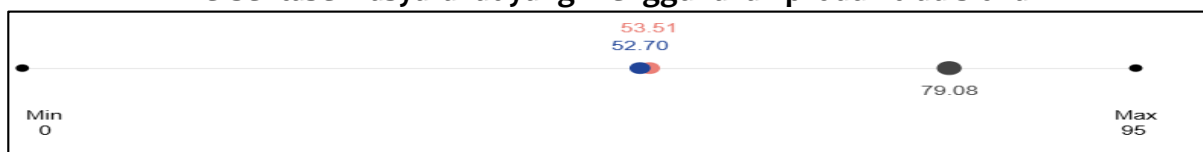


Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022.

Grafik 3.41

Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Warisan Budaya, yaitu :

- Kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang efektif.
- Keterbatasan sumber daya (dana, infrastruktur, SDM).
- Kurangnya kesadaran dan apresiasi masyarakat.
- Kerusakan atau kehilangan warisan budaya
- Konflik kepentingan antara pelestarian dan pengembangan ekonomi.
- Kurangnya dokumentasi dan inventarisasi.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Warisan Budaya, yaitu :

- Perencanaan dan pengelolaan yang efektif.
- Ketersediaan sumber daya memadai.
- Kesadaran dan apresiasi masyarakat tinggi.
- Pelestarian dan pengembangan warisan budaya berkelanjutan.
- Kerjasama antar-stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta).
- Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- Pengembangan infrastruktur pendukung.
- Dokumentasi dan inventarisasi yang baik.

Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Warisan Budaya adalah sebagai berikut :

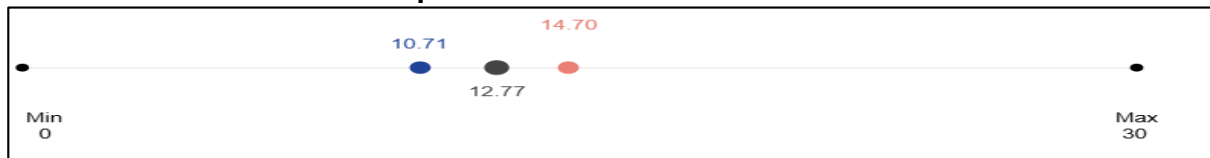
- Mengembangkan perencanaan strategis.
- Meningkatkan kesadaran budaya masyarakat.
- Mengembangkan infrastruktur pendukung.

- d. Meningkatkan kerjasama antar-stakeholder.
- e. Mengembangkan program pelestarian.
- f. Mengembangkan kapasitas SDM.
- g. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

3. Analisis IPK berdasarkan Dimensi Ekspresi Budaya

Grafik 3.42

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.43

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.44

Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Grafik 3.45

Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Terdapat beberapa analisis faktor kegagalan berdasarkan dimensi Ekspresi Budaya, yaitu :

- a. Kurangnya apresiasi dan kesadaran masyarakat terhadap ekspresi budaya.
- b. Keterbatasan sumber daya (dana, infrastruktur, SDM).
- c. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan swasta.
- d. Ketergantungan pada budaya asing.
- e. Kurangnya inovasi dan kreativitas.
- f. Konflik kepentingan antara kelompok budaya.
- g. Kurangnya dokumentasi dan inventarisasi.
- h. Keterbatasan akses teknologi.

Analisa faktor keberhasilan berdasarkan dimensi Ekspresi Budaya, yaitu :

- a. Perencanaan strategis dan pengelolaan efektif.
- b. Dukungan pemerintah dan swasta.
- c. Kesadaran dan apresiasi masyarakat tinggi.
- d. Inovasi dan kreativitas dalam ekspresi budaya.
- e. Kerjasama antar-kelompok budaya.
- f. Regulasi dan pengawasan yang efektif.
- g. Pengembangan infrastruktur pendukung.
- h. Dokumentasi dan inventarisasi yang baik.

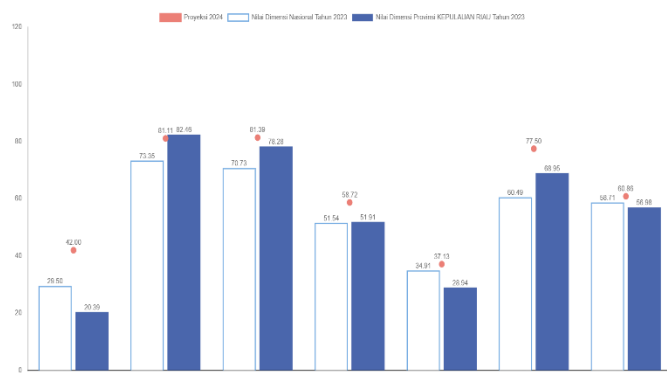
Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan upaya dalam strategi pengembangan dimensi Ekspresi Budaya adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perencanaan strategis.
- b. Meningkatkan kesadaran budaya masyarakat.
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung.
- d. Meningkatkan kerjasama antar-kelompok budaya.
- e. Mengembangkan program pendidikan budaya.
- f. Meningkatkan pemasaran dan promosi.
- g. Mengembangkan kapasitas SDM.
- h. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi.

Dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 59,80 Indeks dengan target sebesar 57,60 Indeks dengan capaian kinerja sebesar 103 %.

Pada Tahun 2024, capaian Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada di atas nilai nasional. Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar 59,80 dibandingkan dengan nilai Nasional sebesar 57,13 Indeks.

Grafik 3.46
Perbandingan Nilai Dimensi IPK Provinsi Kepri dan Nasional



Sumber : Susenas MSBP. BPS Nasional Kepri

Jika dilihat dari drafik diatas Skor IPK Provinsi : 59,80 berada di atas skor IPK Nasional (57,13) dan menduduki peringkat 5 dari 34. Provinsi Capaian IPK 2024 Provinsi Kepulauan Riau 56,60 (ada kenaikan sebesar 2,30 poin) Dimensi dengan skor tertinggi ada pada Dimensi Pendidikan, sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam berkomitmen membangun kebudayaan, pada tahun 2024 pemerintah pusat telah memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Kepulauan Riau yaitu anugerah kebudayaan Indonesia kategori Emas ini adalah pembuktian bahwa pemerintah provinsi kepulauan focus dalam membangun kebudayaan.

Gambar 3.19
Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia Kategori Emas



Sumber : Dinas Kebudayaan Prov Kepri

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut antara lain:

- Sinergi antara keberadaan kesenian tradisional sebagai identitas kultural masyarakat pendukung dan tuntutan industri pariwisata yang melakukan komodifikasi budaya antara lain: komodifikasi budaya menjadi keniscayaan di era ekonomi global yang berkembang di era pascamodernitas ini, terutama ditandai dengan kian berkembangnya industri pariwisata.
- Peningkatan kesadaran dan apresiasi budaya: Meningkatnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal.

- c. Pengembangan infrastruktur budaya: Pembangunan museum, teater, galeri, dan fasilitas budaya lainnya.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.
- e. Pengakuan dan perlindungan hak cipta: Pengakuan dan perlindungan hak cipta atas karya budaya.
- f. Kerjasama internasional: Kerjasama dengan negara lain untuk mempromosikan budaya.
- g. Melakukan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah
- h. Mengelola Perpustakaan Daerah seperti pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah
- i. Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai berikut :

- a. Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengembangan kebudayaan.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya tenaga kerja terampil dalam pengelolaan kebudayaan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan.
- d. Pengaruh globalisasi: Pengaruh globalisasi yang dapat mengancam keaslian budaya lokal.
- e. Kurangnya regulasi dan pengawasan: Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan budaya.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan dan mengurangi

permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara sebagai berikut :

1. Penggabungan yang tepat antara warisan budaya dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan perlindungan yang konsisten dari kondisi lingkungan dan tindakan-tindakan yang merugikan, tetapi juga bagaimana memelihara dan memperbaharui sumber daya itu secara terus menerus. Setiap pendekatan yang menempatkan warisan budaya sebagai karya masa lalu akan menimbulkan risiko mengubahnya menjadi entitas yang tetap dan beku, serta kehilangan relevansinya untuk saat ini dan untuk masa depan. Memang, pemahaman tentang warisan harus sedemikian rupa sehingga ingatan kolektif masa lalu dan praktik-praktik tradisional atas fungsi sosial dan budaya warisan tersebut, terus-menerus direvisi dan diperbarui, sehingga memungkinkan setiap masyarakat untuk menjaga hubungan dengannya dan tetap mempertahankan pemikiran, makna, dan fungsinya di masa depan.
2. Dalam menentukan indikator-indikator dalam dimensi IPK, data begitu penting. Selain data dari Ditjen Kebudayaan, dapat diperkirakan bahwa indikator dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan banyak mengacu pada data BPS yang selama ini banyak melakukan penghitungan statistik di bidang sosial budaya. Terkait ketersediaan data, menjadi tugas pemerintah untuk membuat platform data base kebudayaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Indikator-indikator pembangunan kebudayaan harus melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu merepresentasikan kondisi kebudayaan yang sesungguhnya

Tabel 3.58
Tabel Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran IPK

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan	
		Rp.	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.183.954.684	3.080.560.208	96,75
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.938.884.660	1.831.348.192	94,45
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	152.592.200	151.328.600	99,17
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	600.259.972	591.536.827	98,54
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	508.980.798	461.279.391	90,63
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405.402.792	330.631.467	81,55
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	581.721.380	429.671.573	73,86
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	345.535.546	Tunda Bayar	0
Total	7.717.332.032	6.876.356.258	89,10

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.7.717.332.032,- terealisasi sebesar Rp.6.876.356.258,- atau 89%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.840.975.774,- (10,89%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (108%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (89%) sehingga efisiensi tercapai 18%.

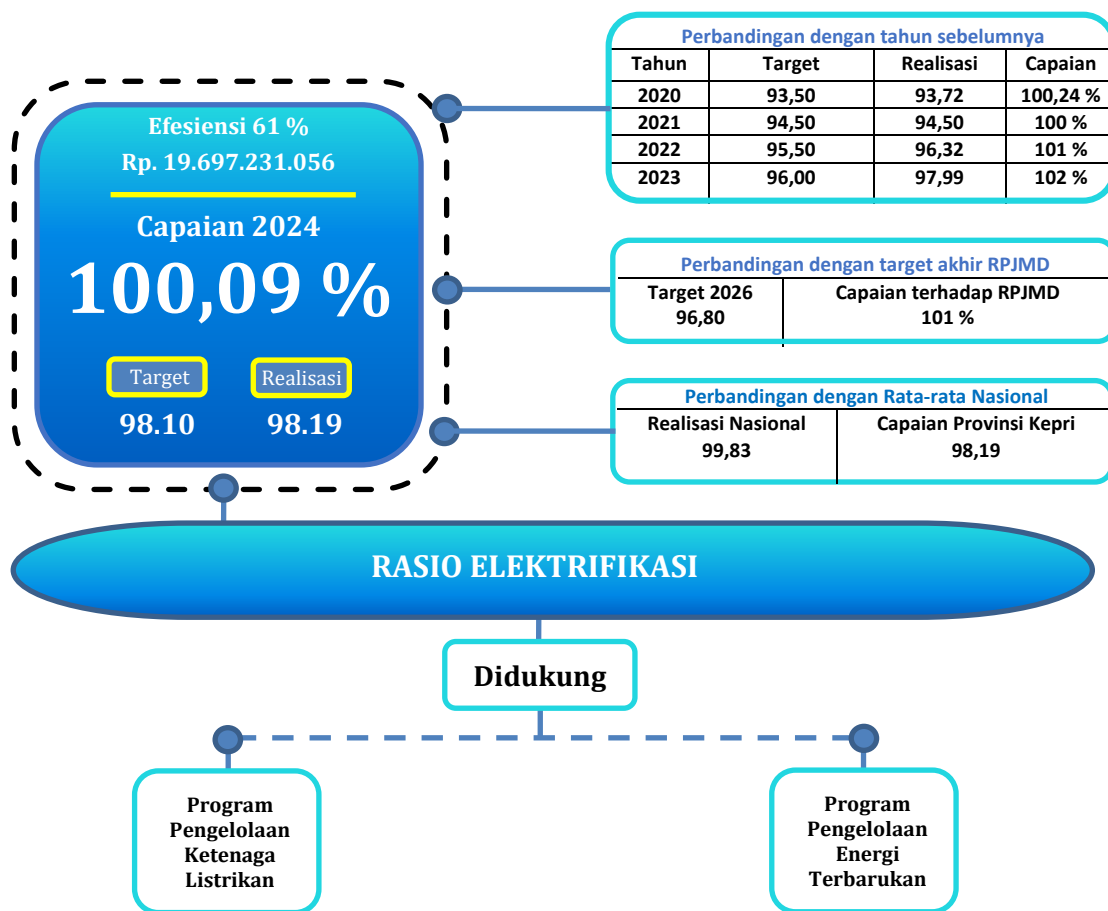
SASARAN :

Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar

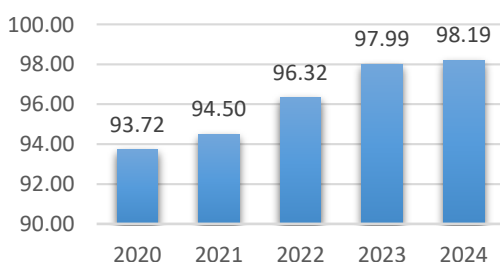
Indikator : Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Rasio Elektrifikasi pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar **100,09%** dari target sebesar **98,10** rasio dan terealisasi sebesar **98,19** rasio.



Tren Peningkatan Rasio Elektrifikasi

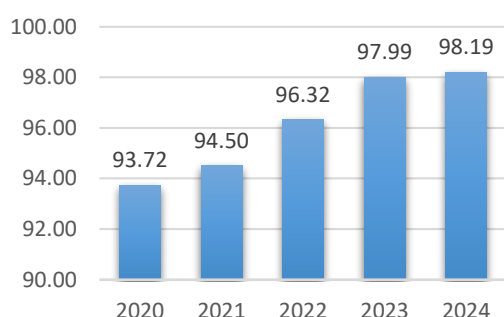


Formulasi Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN ditambah dengan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN dibagi dengan jumlah rumah tangga kemudian dikali 100 %.

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dilihat dari rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar **98.19** Rasio dilihat berdasarkan kinerja dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **98,10** Rasio dengan capaian realisasi sebesar **100,09** % atau dalam kategori **Sangat Baik**.

Grafik 3.47
Tren Perkembangan Rasio Elektrifikasi



Sumber : ESDM Prov Kepri

Capaian kinerja rasio elektrifikasi tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,20 rasio. Dimana pada tahun 2023 peningkatan rasio elektrifikasi hanya sebesar 97.99 rasio meningkat menjadi 98.19 rasio pada tahun 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dan kegiatan pengadaan mesin genset di Desa-Desa.

Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98.19 rasio dengan target sebesar 98,80 rasio dengan capaian kinerja sebesar 101 %.

Pada Tahun 2024, capaian Rasio Elektrifikasi Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan target nasional berada dibawah target nasional dengan nilai sebesar 99,89 dan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 98.19.

Tabel 3.59
Perhitungan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Kab/Kota	Rumah Tangga Kab/Kota	Rumah Tangga Berlistrik				RT Belum Berlistrik	RE(%)
				PLN	Non PLN	LTSHE	Jumlah		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)={((7)/(3))*100}
	Kepulauan Riau	2,183,290	641,475	627,564	2,177	296	629,847	11,628	98.19%
1	Karimun	263,340	87,780	84,607	266	-	84,873	2,907	96.69%
2	Natuna	85,660	26,769	25,423	-	-	25,423	1,346	94.97%
3	Lingga	102,010	30,912	29,899	47	161	29,946	966	96.87%
4	Batam	1,276,930	336,034	329,730	1,638	106	331,474	4,560	98.64%
5	Kepulauan Anambas	49,730	16,577	15,451	20	29	15,471	1,106	93.33%
6	Bintan	168,190	57,997	57,072	206	-	57,278	719	98.76%
7	Tanjung pinang	237,430	85,406	85,382	-	-	85,382	24	99.97%

Sumber : Dinas ESDM Prov Kepri

Faktor yang mendukung ketercapaian dalam mempengaruhi peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah penyambungan listrik kepada masyarakat oleh PT. PLN (Persero) dan dengan terlaksananya beberapa program ketenagalistrikan seperti kegiatan Bantuan Penyambungan Listrik (BPBL) bagi Rumah Miskin, kegiatan pengadaan mesin genset, kegiatan peningkatan mutu layanan listrik kepada masyarakat serta adanya kegiatan penambahan pembangunan ketenagalistrikan dari PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan rasio elektrifikasi yaitu:

1. Mendorong Peran aktif dari pemilik wilayah usaha ketenagalistrikan, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.
2. Pemasangan genset dengan Lokasi Pemasangan di Pulau Naja Kab. Lingga sebanyak 1 unit, di Pulau Bahan Kab. Karimun sebanyak 1 unit
3. Bantuan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System sebanyak 161 KK tersebar di Kota Batam dan Kab Lingga
4. Pemeliharaan PLTS Komunal sebanyak 1 unit di Pulau Telang, Desa Mantang Besar Kec. Mantang Kabupaten Bintan
5. Melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik sebanyak 744 RT tersebar di Kab Lingga 384 RT, Natuna 237 RT Bintan 65 RT dan batam 58 RT

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio elektrifikasi adalah:

1. Kondisi geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan jarak antara pulau yang terpisah jauh dan keterbatasan anggaran baik di PT. PLN (Persero), Pemerintah Pusat maupun APBD.

2. Rumah tangga yang berada dalam satu pulau kecil juga masih tersebar dengan jumlah rumah tangga yang terbatas sehingga membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang cukup besar.
3. Adanya peraturan pemerintah yang meminta PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berbasis energi bersih sehingga juga membutuhkan biaya investasi yang cukup besar.
4. Aset EBT yang sudah terbangun di Provinsi Kepulauan Riau juga tidak terawat diakibatkan minimnya anggaran pemeliharaan untuk aset EBT.

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara:

1. Menggunakan pembangkit yang kecil tersebar dan menghubungkan antar pulau yang berdekatan serta memanfaatkan sumber energi primer yang tersedia melimpah di Provinsi Kepulauan Riau, serta melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, alim ulama dan pemilik lahan yang akan dihibahkan atau jalur yang dilalui jaringan distribusi tegangan menengah;
2. Dengan mengusulkan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan EBT di daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Melaksanakan bantuan pemasangan baru listrik sebanyak 35 unit di Provinsi Kepulauan Riau

Program-program yang mendukung peningkatan rasio elektrifikasi Tahun 2024 diantaranya adalah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Tabel 3.60
Tabel Program/Kegiatan dan Realisasi Anggaran Rasio Elektrifikasi

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	11.663.605.756	4.892.814.681
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	8.033.625.300	2.793.524.831
Total	19.697.231.056	7.686.339.512

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.19.697.231.056,- terealisasi sebesar Rp.7.686.339.512,- atau 39 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.12.010.891.544,- (61 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Rasio Elektrifikasi (100,09%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (39%).

SASARAN :

Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir

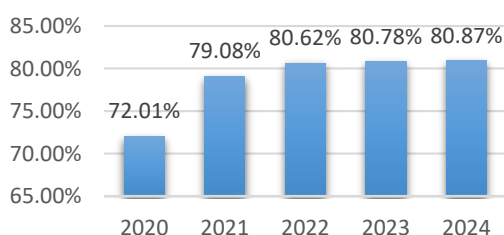
Indikator : Persentase Jalan Kondisi Mantap

Persentase Jalan Kondisi Mantap

Jalan kondisi mantap dapat didefinisikan sebagai jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Secara harafiah jalan didefinisikan sebagai jalur di mana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu. %tase Jalan Kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau meningkat. %tase Jalan Kondisi Baik pada Tahun 2024 sudah baik dengan realisasi kinerja sebesar **80,87 %** dari target sebesar **80,94 %** dengan capaian sebesar **99,91 %**.



Tren Peningkatan Persentase Jalan Kondisi Mantap



Formulasi Presentase Jalan Kondisi Baik

Persentase jalan kondisi mantap merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi kondisi mantap dengan panjang jalan provinsi dan dapat diketahui melalui sistem pengelolaan database jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD)



Persentase jalan kondisi mantap adalah indikator terbaru setelah dilakukannya perubahan RPJMD 2021-2026 untuk menyesuaikan dengan capaian kinerja jalan kondisi mantap hasil survey kondisi jalan yang dilakukan setiap tahun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dan menjadi dasar untuk digunakan sebagai usulan yang dilakukan setiap tahunnya ke Kementerian PU untuk mendapatkan dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan Provinsi di Kepulauan Riau.

Persentase jalan kondisi mantap merupakan gabungan dari persentase jalan kondisi baik ditambah dengan jalan kondisi sedang serta formula perhitungan persentase jalan kondisi mantap adalah Panjang jalan kondisi mantap (502,010 km) dibandingkan dengan Total Ruas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau (620,76 Km) sehingga didapatkan hasilnya 80,87%. Perhitungan kondisi jalan mantap berdasarkan pemetaan dari data dasar kondisi jalan tahun 2024 yang kegiatan surveynya dilakukan di akhir tahun 2023.

Tabel 3.61
Persentase Capaian Kinerja Jalan kondisi mantap

Panjang jalan kondisi mantap (Baik + Sedang)	Panjang jalan provinsi keseluruhan	Persentase Capaian Kinerja Jalan kondisi mantap (panjang jalan kondisi mantap dibagi Panjang jalan provinsi keseluruhan)
502,010 Km	620,76 Km	80,87%

Sumber : Dinas PUPP Prov Kepri

Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir dilihat dari persentase jalan kondisi mantap di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Realisasi indikator

persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 mencapai **80,87%**

walaupun masih belum dapat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebesar **80,94%** sehingga capaian kinerja sebesar **99,91%** atau dalam kategori **BAIK**.

Capaian kinerja persentase jalan mantap tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,09 %. Dimana pada tahun 2023 peningkatan persentase jalan mantap sebesar 80,78% meningkat menjadi 80,87% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh konsistennya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur untuk meningkatkan kualitas Jalan Provinsi di Kepulauan Riau, Pengawasan yang juga dilakukan oleh pemerintah maupun kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya kualitas jalan sehingga masyarakat selalu melaporkan jika ada jalan yang kondisinya kurang baik agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun juga capaian kinerja tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan di antaranya adalah sedikitnya paket-paket pekerjaan fisik untuk mendukung kondisi jalan provinsi dikarenakan anggaran dialihkan ke pemilu dan pilkada tahun 2024.

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tahun	Capaian Kinerja	Persentase Peningkatan Capaian
2022	80,62%	-
2023	80,78%	0,16%
2024	80,87%	0,09%

Sumber : Dinas PUPP Prov Kepri



Dilihat dari perspektif target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) realisasi kinerja persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 80,87% dengan target sebesar 81,26% dengan capaian kinerja sebesar 99,52 %.

Faktor yang mendukung dan mempengaruhi ketercapaian peningkatan persentase jalan mantap di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah :

1. **Pendanaan yang Memadai:** Anggaran yang cukup untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan adalah kunci utama. Tanpa dana yang memadai, proyek jalan tidak dapat berjalan dengan lancar.
2. **Perencanaan yang Matang:** Perencanaan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana.
3. **Pengawasan dan Evaluasi:** Pengawasan yang ketat serta evaluasi berkala terhadap proyek jalan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan waktu yang ditetapkan.
4. **Sumber Daya Manusia:** Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang konstruksi jalan sangat penting untuk menjamin kualitas hasil akhir.

Upaya lainnya yang mendukung keberhasilan peningkatan persentase jalan mantap adalah sebagai berikut :

1. **Kerjasama dan Koordinasi:** Kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kontraktor, dan masyarakat, dapat mempercepat proses penyelesaian proyek jalan.
2. Selain itu faktor **Teknologi dan Inovasi:** Penggunaan teknologi modern dan metode inovatif dalam konstruksi dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.

Adapun upaya spesifik yang dilakukan dalam mendukung ketercapaian indikator Jalan dalam kondisi mantap Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna.
2. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas.
3. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun.
4. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri).
5. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri).
6. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna.

Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam meningkatkan persentase jalan mantap sebagai berikut:

1. **Anggaran Terbatas:** Anggaran yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan. Biaya yang tinggi untuk material, tenaga kerja, dan peralatan bisa sulit terpenuhi dengan anggaran yang ada.
2. **Kualitas Material dan Pelaksanaan:** Penggunaan material yang berkualitas rendah dan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan jalan cepat rusak. Pembangunan jalan yang tidak sesuai spesifikasi juga bisa menyebabkan jalan cepat berlubang atau retak.
3. **Pengaruh Cuaca dan Kondisi Alam:** Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, dan tanah longsor dapat merusak jalan dengan cepat. Kondisi geografis yang sulit, seperti pegunungan atau daerah rawan bencana,

juga menyulitkan pembangunan jalan yang mantap.

4. **Pengelolaan dan Pengawasan:** Kurangnya pengelolaan dan pengawasan yang baik dalam proyek pembangunan jalan dapat mengakibatkan pekerjaan yang tidak berkualitas. Pengawasan yang lemah bisa membuka celah untuk korupsi dan penyimpangan.
5. **Lalu Lintas Berat:** Lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan dapat mempercepat kerusakan jalan. Jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat sering kali cepat rusak.
6. **Kurangnya Partisipasi Masyarakat:** Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat jalan dapat memperparah kondisi jalan. Kesadaran masyarakat untuk tidak merusak jalan dan melaporkan kerusakan juga penting.

Dalam rangka meningkatkan persentase jalan mantap dan mengurangi permasalahan dan kendala yang dihadapi di tahun-tahun selanjutnya, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan alternatif solusi untuk kedepannya dengan cara:

1. **Pemeliharaan Rutin:** Menganggarkan dan Melakukan pemeliharaan jalan secara rutin agar mencegah kerusakan yang lebih parah. Ini termasuk penambalan lubang, perbaikan permukaan jalan, dan penggantian lapisan aspal.
2. **Peningkatan Kualitas Infrastruktur:** Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknologi canggih dalam pembangunan jalan agar lebih tahan lama dan mampu menahan beban berat.

Tabel 3.63

Perbandingan Anggaran Program Pendukung Kinerja Beserta Realisasi dan Efisiensi Anggarannya

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
2023	164.247.211.765	159.162.729.178	96,92%	3,08%
2024	56.014.659.149	48.539.486.540	86,65%	13,35%

Sumber : Dinas PUPP Prov Kepri

Dari tabel diatas, anggaran yang diberikan di tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat perbedaan yang sangat jauh dikarenakan adanya penurunan anggaran di Dinas PUPP Tahun 2024. Efisiensi antara pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024, ada selisih sebesar 10,27% dikarenakan pada tahun 2024 efisiensi sebesar 13,35% yang disebabkan adanya tunda bayar paket pekerjaan di dalam program pendukung kinerja yang dijalankan.

Beberapa pekerjaan yang ada dari program penyelenggaraan jalan dan mendukung peningkatan kualitas jalan provinsi adalah:

1. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01),
2. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05),
3. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun (DAK - Tematik 03),
4. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri),
5. Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan) dan,
6. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna

Tabel 3.64
Tabel Kegiatan dan Realisasi Anggaran Presentase Jalan Kondisi Mantap

PAKET PEKERJAAN	PAGU (RP)	REALISASI KEUANGAN	
		(RP)	Persentase
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01)	6.371.400.000	6.370.245.000	99,98 %
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)	8.502.600.000	8.499.991.500	99,97 %
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun (DAK - Tematik 03)	11.322.000.000	11.315.191.600	99,94 %
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)	1.855.414.000	1.826.958.300	98,47 %
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan)	1.640.000.000	1.599.422.000	97,53 %
Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun dan Natuna	4.016.214.400	4.016.214.400	100 %
Total	33.707.628.400	33.628.022.800	99,76 %

Dari jumlah anggaran sebesar Rp.33.707.628.400,- terealisasi sebesar Rp.33.628.022.800,- atau 99,76 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.79.605.600,- (0,23 %). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian kinerja indikator Presentase Jalan Mantap (99,91%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,76%) sehingga efisiensi tercapai 0,14%

Gambar 3.20
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Bukit Leman - Trans Batubi Lanjutan, Kab. Natuna (DAK - Tematik 01)



Gambar 3.21
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Letung - Kuala Maras Lanjutan, Kab. Kepulauan Anambas (DAK - Tematik 05)



Gambar 3.25
Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sei Asam - Sebele - Penarah - Lebuhan Lanjutan, Kab. Karimun (DAK – Tematik 03)



Gambar 3.22
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan



Gambar 3.26
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)



Gambar 3.23
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Bintan



Gambar 3.27
Rekonstruksi Jalan Sp. Batu 14 - Pel. Tg. Berlian, Kab. Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepri)(Lanjutan)



Gambar 3.24
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Lingga



Gambar 3.28
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Natuna



Tabel 3.65
Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi Pagu (Rp)	Efektif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) - (9)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,9 %	5,02 %	100,4 %	197.881.726.762,67	189.067.450.970,32	96 %	8 %
		PDRB Per Kapita							
		A. PDRB Per Kapita ADHK	87,76 Juta Rupiah	96,16 Juta Rupiah	109 %	195.881.726.762,67	189.067.450.970,32	96 %	14 %
		B. PDRB Per Kapita ADHB	143,34 Juta RUpiah	161,42 Juta Rupiah	112 %				
		Indeks Gini	0,323 Indeks	0,357 Indeks	89 %	110.815.390.743,73	89.126.740.149,49	80 %	9 %
2	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54 %	6,39 %	115,25 %	151.716.833.076	120.775.299.101	79 %	36,25 %
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18 Indeks	75,05 Indeks	106 %	3.881.757.976	3.553.930.251	92 %	14 %
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,97 Indeks	82.47 Indeks	116 %	191.832.706.852,75	160.325.233.348	84 %	32 %
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,04 Indeks	79,89 Indeks	104 %	391.488.945.979	370.464.497.454	94,6 %	9,65 %
6	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	85,56 %	85,56 %	377.966.033.159	360.787.977.673	95 %	9 %
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55 Indeks	93,96 Indeks	100,49 %	4.737.199.984	4.662.148.445	98,41 %	2 %
8	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	5,69 %	4,78%	115,99%	119.188.026.649	113.199.420.786	94 %	21 %
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,00 %	16,8 %	80 %	14.831.386.623	13.946.232.985	94 %	-14 %

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) - (9)
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	0,55 Rasio	0,59 Rasio	107 %	30.035.191.386	26.223.382.420	87 %	19 %
11	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,60 Indeks	59,80 Indeks	108 %	7.717.332.032	6.876.256.258	89 %	18 %
12	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	98,10 Rasio	98,19 Rasio	100,09 %	19.697.231.056	7.686.339.512	39 %	61 %
13	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94 %	80,87 %	99,91 %	33.707.628.400	33.628.022.800	99,76 %	0,14 %
JUMLAH					103 %	1.457.615.664.122	1.311.255.481.295	89,95	13 %

BAB IV

PENUTUP



IV.1 Kesimpulan

LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2024. Berdasarkan informasi akuntabilitas kinerja yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Perubahan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terdiri dari 13 sasaran dan 15 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024.
2. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian 13 Sasaran dengan 15 indikator kinerja sasaran tersebut pada Tahun 2024, diperoleh rata-rata capaian sebesar 103% termasuk berhasil dengan kategori **“Sangat Baik”**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 11 Indikator tercapai dengan kategori **“Sangat Baik”** dengan capaian (>100%);
 - b. 4 sasaran tercapai dengan kategori **“Baik”** (> 75- 100%);
3. Beberapa indikator sasaran telah mencapai target tahun terakhir RPJMD diantaranya :
 - PDRB Perkapita (ADHK 108% dan ADHB 111%)
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (107%)
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (106%)
 - Indeks Reformasi Birokrasi (114%)
 - Indeks Pembangunan Manusia (103%)
 - Angka Kemiskinan (114%)
 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (103%)
 - Rasio Elektrifikasi (101%)
4. Dari 15 indikator kinerja yang mengukur sasaran, ada 2 indikator yang realisasinya menggunakan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dan Prevalensi stunting
5. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil menggunakan sumberdaya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.457.615.664.122,- Terealisasi sebesar Rp. 1.311.255.481.295,- atau 89,95%. Jika dibandingkan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 103% dengan realisasi anggaran sebesar 89,95% sehingga efisiensi tercapai 13,05%.

IV.2 Langkah Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang

Langkah Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang Penguatan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan selalu melakukan perbaikan secara terus menerus dalam memperbaiki implementasi SAKIP baik di level Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah. Perolehan Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan predikat BB sejak tahun 2015 menggambarkan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kuantabilitas kinerja kedepannya. Langkah-langkah peningkatan kinerja di masa yang akan datang yaitu:

1. Memaksimalkan peran pimpinan dalam mengawal implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah yang dipimpin.
2. Membangun crosscutting dan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah agar sasaran dapat tercapai dengan maksimal.
3. Dalam menetapkan target indikator kinerja, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mempertimbangkan dan mempedomani realisasi indikator kinerja tahun sebelumnya.
4. Secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan monitoring terhadap implelementasi SAKIP pada perangkat daerah.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan melalui aplikasi e- SAKIP

HASIL PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

No	Sasaran Staregis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,9 %	5,02 %	100,4 %	Sangat Baik
		PDRB Per Kapita				
		A. PDRB Per Kapita ADHK	87,76 Juta Rupiah	96,16 Juta Rupiah	109 %	Sangat Baik
		B. PDRB Per Kapita ADHB	143,34 Juta RUpiah	161,42 Juta Rupiah	112 %	Sangat Baik
		Indeks Gini	0,323 Indeks	0,357 Indeks	89 %	Baik
2	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54 %	6,39 %	115,25 %	Sangat Baik
3	Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	70,18 Indeks	75,05 Indeks	106 %	Sangat Baik
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	70,97 Indeks	82,47 Indeks	116 %	Sangat Baik
5	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	77,04 Indeks	79,89 Indeks	104 %	Sangat Baik
6	Meningkatnya Pemerataan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	100 %	85,56 %	85,56 %	Baik
7	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,55 Indeks	93,96 Indeks	100,49 %	Sangat Baik
8	Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan	5,69 %	4,78%	115,99%	Sangat Baik
9	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting	14,00 %	16,8 %	80 %	Baik
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas	0,55 Rasio	0,59 Rasio	107%	Sangat Baik
11	Peningkatan Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,60 Indeks	59,80 Indeks	108 %	Sangat Baik
12	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	98,10 Rasio	98,19 Rasio	100,09%	Sangat Baik
13	Peningkatan Pembangunan Konektivitas Antar Pulau dan Kawasan Pesisir	Persentase Jalan Kondisi Mantap	80,94 %	80,87 %	99,91 %	Baik

DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

1. Anugerah Tanda Kehormatan “Bintang Leguin Veteran RI” oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Leguin Veteran Republik Indonesia (LVRI);
2. Kepala Daerah pendukung pengelolaan zakat terbaik tingkat Provinsi oleh BAZNAS Republik Indonesia;
3. BAZNAS Kepulauan Riau meraih penghargaan sebagai Pengumpul Zakat Terbaik tahun 2023 tingkat Provinsi oleh BAZNAS Republik Indonesia;
4. BAZNAS Kepulauan Riau meraih penghargaan sebagai Koordinasi Terbaik Antar Lembaga tingkat Provinsi oleh Baznas Republik Indonesia;
5. Top Pembina BUMD 2024 Kategori Kepala Daerah oleh Majalah *Top Business*;
6. Penghargaan untuk Anggaran Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP) dan untuk yang ke-14 kalinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima Opini WTP secara berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Provinsi yang mendukung Pengembangan Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan pengadaan 2 (dua) unit perangkat ETLE statis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
8. TPID Award 2024 sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera oleh Presiden Republik Indonesia;
9. Bintang Abhinaya Jagadhita atas kepedulian terhadap Pengembangan Koperasi oleh Dewan Koperasi Indonesia;
10. Penghargaan kategori Kesempatan Kerja Terbaik 2024 oleh kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
11. Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia kategori Perekonomian dan UMKM Tahun 2024 oleh Tempo Media Grup;
12. Anugerah Merdeka Belajar kategori Transformasi Pembelajaran oleh KEMENDIKBUDRISTEK Republik Indonesia;
13. Anugerah Merdeka Belajar kategori Transformasi SDM Pendidikan oleh KEMENDIKBUDRISTEK Republik Indonesia;
14. Anugerah Merdeka Belajar kategori Pendidikan Vokasi oleh KEMENDIKBUDRISTEK Republik Indonesia;
15. Anugerah Merdeka Belajar kategori Pengelolaan PIP oleh KEMENDIKBUDRISTEK Republik Indonesia;
16. Anugerah Merdeka Belajar kategori Anugerah Utama – Transformatif Provinsi oleh KEMENDIKBUDRISTEK Republik Indonesia;
17. Penghargaan TP2DD Terbaik tingkat Provinsi (Provinsi Kepulauan Riau) oleh KEMENKO Perekonomian Republik Indonesia;
18. Penghargaan TP2DD Terbaik tingkat Kota (Kota Batam) oleh KEMENKO Perekonomian Republik Indonesia;
19. Penghargaan Program Unggulan tingkat Kabupaten (Kab.Karimun) oleh KEMENKO Perekonomian Republik Indonesia;
20. Penghargaan dalam kategori *Best Province Program* pada ajang *Indonesia Halal Industry Award* (IHYA) 2024 oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
21. Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang memiliki Komitmen dalam Pengelolaan Susut dan Sisa Makanan oleh Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia bekerjasama dengan Kementerian BPN/BAPPENAS Republik Indonesia;
22. Penghargaan UKPBJ Proaktif atas Transaksi UMK Tertinggi di E-Purchasing dan Provinsi dengan 100% UKPBJ Kab/Kota oleh LKPP;
23. Anugerah Predikat kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024 tingkat Pemerintah Provinsi dengan predikat “Kepatuhan Standar Pelayanan Publik” oleh Ombudsman Republik Indonesia;
24. BI Awards 2024 kategori Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Terbaik Wilayah Sumatera oleh Bank Indonesia;

25. BPH Migas Award 2024 kategori Pemerintah Terbaik yang Membantuk Program Pemerintah dalam Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi oleh BPH MIGAS Indoensia;
26. Anugerah Kebudayaan Indonesia kategori Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Tahun 2024 oleh KEMENDIKBUD Republik Indonesia;
27. Anugerah Upakarti 2024 untuk kategori Jasa Pengabdian oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.